



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon: (021) 7264010, surel: ppip.pembiayaan@pu.go.id

NOTA DINAS NOMOR PR0101/B/Pc/2026/2

Yth. : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
Hal : Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya TA 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya TA 2025 dengan materi sebagai berikut:

Bab	Judul Bab	Judul Subbab
I	Pendahuluan	1. Latar Belakang 2. Tugas dan Fungsi 3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4. Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pelatihan 5. Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> 6. Sarana dan Prasarana 7. Isu Strategis 8. Sistematika Laporan
II	Perencanaan Kinerja	1. Rencana Strategis 2. Perjanjian Kinerja 3. Metode Pengukuran 4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra
III	Akuntabilitas Kinerja	1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 2. Capaian Kinerja 3. Analisis Perbandingan Kinerja 4. Analisis Realisasi Anggaran 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
IV	Penutup	1. Simpulan Umum 2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya,



Pengecekan Keaslian Dokumen

Meike Kencanawulan Martawidjaja

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA TA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK) Tahun Anggaran (TA) 2025 dapat diselesaikan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja yang diharapkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah komponen utama penerapan manajemen kinerja guna menjamin ketersediaan layanan publik yang andal dan akuntabel.



Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja Direktorat PPICK TA 2025 yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis TA 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Adapun pengukuran kinerja secara umum adalah nilai perbandingan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang dicapai. Skala pengukuran kinerja yang diterapkan berbasis pada pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berjenjang, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan. Analisis pencapaian kinerja menyasar pada hal-hal yang mendukung sasaran kinerja, meliputi: indikator kinerja, permasalahan dalam pelaksanaan tugas, dan analisis *reward-punishment* dalam pencapaian kinerja.

Kami berharap bahwa hal-hal yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran utuh tentang capaian kinerja yang diraih oleh Direktorat PPICK dalam periode TA 2025 dan menjadi sarana umpan balik guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 15 Januari 2026

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya



Meike Kencanawulan Martawidjaja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat PPICK adalah Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang ditugasi untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur cipta karya. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur nasional, Kementerian PU telah merumuskan beberapa Sasaran Program (SP) yang salah satunya menjadi tanggung jawab DJPI, yaitu “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum”.

Dalam mendukung Sasaran Program tersebut, Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi target kinerja Direktorat PPICK adalah **“Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)”** dengan indikator yang digunakan adalah **“Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK”** dan **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas”** dengan indikator yang digunakan adalah **“Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya”** dan **“Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan”**. Pemenuhan indikator capaian kinerja Direktorat PPICK tersebut selanjutnya dipertajam dengan penyusunan rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPICK Tahun Anggaran (TA) 2025–2029. Renstra ini diselaraskan dengan Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029. Tujuan Direktorat PPICK berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah meningkatkan implementasi skema pembiayaan inovatif bidang cipta karya.

Berdasarkan target lima tahunan tersebut dan kondisi serta kebijakan nasional, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI) dengan Direktur PPICK. Dalam PK tersebut dicantumkan pula anggaran belanja Direktorat PPICK dalam satu tahun kerja. Pada tahun 2025, besaran awal anggaran belanja Direktorat PPICK yaitu sebesar Rp7.000.000.000, namun saat pelaksanaannya terdapat penyesuaian besaran anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran.

Direktorat PPICK sebagai Unit Eselon II turut menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PU.

Laporan Kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan AKIP dan sebagai wujud akuntabilitas Direktorat PPICK dalam pertanggungjawaban capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan ini menyajikan kapasitas organisasi, capaian kinerja, penyerapan anggaran Direktorat PPICK, dan juga analisis terhadap keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun ini. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan upaya-upaya yang

dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan AKIP tahun 2024 berdasarkan catatan-catatan Hasil Evaluasi.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPICK adalah sebanyak 9 paket kegiatan yang seluruhnya merupakan kegiatan swakelola. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai per tanggal 10 Januari 2026 berdasarkan data iemon PU dan e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp4.285.552.000 (75,50% dari total pagu DIPA). Besaran sisa anggaran terdiri dari self blocking sebesar Rp2.355.699.000 (23,88%) dan tidak terserap sebesar Rp34.925.000 (0,63%)

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPICK tahun ini adalah sebesar **79,51%** untuk IKK Dukungan Manajemen Direktorat PPICK dari target kinerja sebesar **72,50%** (deviasi positif 7,01%), 104,00 % untuk IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi PPICK dari target sebesar 100% dan 103,33% untuk IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan dari target 100%. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2025 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target Output	Target Proyek	Realisasi Output	Realisasi Proyek	Deviasi
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK		72,50%		79,51%		+7,01%
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya		100%		104,00%		+4,00%
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	-	3	-	-
	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	1 Proyek	2	1 Proyek	-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	-	2	-	-
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan		100%		103,33%		+3,33%
	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	1 Proyek	1	1 Proyek	-

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Salah satu kendala utama adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan perlu dilakukannya penyesuaian pada setiap kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga permasalahan masih rendahnya komitmen dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kendala ini bukanlah hal yang sederhana,

mengingat kompleksitas dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek KPBU. Kedepannya dalam menjaga capaian kinerja Direktorat PPICK, beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya yaitu perkuatan kualitas perencanaan dengan memperhatikan kebijakan yang ada, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sesuai ketentuan, serta meningkatkan pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan proyek pembiayaan inovatif agar lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR SINGKATAN	6
BAB I PENDAHULUAN	10
I.1 Latar Belakang	10
I.2 Tugas dan Fungsi	11
I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	12
I.3.1. Struktur Organisasi	12
I.3.2. Sumber Daya Manusia	17
I.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	19
I.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	21
I.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	27
I.4 Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan	33
I.5 Penerapan Rewards dan Punishment	36
I.6 Sarana dan Prasarana	39
I.6.1. Sarana dan Prasarana Fisik	39
I.6.2. Teknologi Informasi	45
I.7 Isu Strategis	47
I.8 Sistematika Laporan	48
BAB II PERENCANAAN KINERJA	50
II.1. Rencana Strategis	50
II.1.1. Visi dan Misi	51
II.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi	52
II.1.3. Program dan Kegiatan	53
II.2. Perjanjian Kinerja	53
II.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal	53
II.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	54
II.2.3. Kronologi Perubahan PK	55
II.3. Metode Pengukuran	58
II.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra	60
II.4.1. Reviu Capaian Target Renstra	60
II.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Renstra	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
III.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	64
III.1.1. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP	64
III.1.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi AKIP	65
III.1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP	70

III.2. Capaian Kinerja.....	73
III.2.1. Capaian Kinerja Per Indikator Output	81
III.3. Analisis Perbandingan Kinerja.....	88
III.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.....	88
III.3.2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah	90
III.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (Benchmarking)	90
III.4. Analisis Realisasi Anggaran	92
III.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	92
III.4.2. Realisasi Anggaran TA-2025.....	94
III.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran TA-2025 dengan Tahun Sebelumnya	99
III.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	102
III.5.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	102
III.5.2. Efisiensi Sarana dan Prasarana	103
III.5.3. Efisiensi Anggaran	104
III.5.4. Perbandingan Efisiensi/Efektivitas.....	106
BAB IV PENUTUP	108
IV.1. Simpulan Umum.....	108
IV.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan	108
IV.1.2. Permasalahan.....	108
IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	110
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Mutasi Pegawai Direktorat PPICK Tahun 2025	17
Tabel I.2.	CPNS Direktorat PPICK Tahun 2025	18
Tabel I.3.	Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025.....	21
Tabel I.4.	Status Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025	23
Tabel I.5.	Status Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025.....	27
Tabel I.6.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025	30
Tabel I.7.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025.....	33
Tabel I.8.	Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Direktorat PPICK Tahun 2025	33
Tabel I.9.	Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPICK	42
Tabel I.10.	Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPICK Berdasarkan Tahun Perolehan	44
Tabel II.1.	Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPICK Tahun 2025.....	54
Tabel II.2.	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Akhir Tahun 2025	54
Tabel II.3.	Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025.....	55
Tabel II.4.	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Juni Tahun 2025.....	56
Tabel II.5.	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Agustus Tahun 2025	57
Tabel II.6.	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK September Tahun 2025	57
Tabel II.7.	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Akhir Tahun 2025	58
Tabel II.8.	Indikator Kinerja Direktorat PPICK dan Cara Perhitungan Tahun 2025	59
Tabel II.9.	Target Kinerja Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Tahun 2025 .	60
Tabel II.10.	Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen 2025—2029	61
Tabel II.11.	Sandingan Target Kinerja Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	62
Tabel III.1.	Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	66
Tabel III.2.	Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	66
Tabel III.3.	Rekomendasi Evaluator atas AKIP Direktorat PPICK TA 2024	68
Tabel III.4.	Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025	74
Tabel III.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	75
Tabel III.6.	Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman”	77
Tabel III.7.	Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”	77
Tabel III.8.	Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025.....	78
Tabel III.9.	Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”	83
Tabel III.10.	Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”	85
Tabel III.11.	Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”	87
Tabel III.12.	Capaian Kinerja Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”.....	87
Tabel III.13.	Perbandingan Capaian Output Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2023, 2024 dan 2025 .	88

Tabel III.14.	Perbandingan Realisasi Anggaran Dit. PPICK.....	89
Tabel III.15.	Target Kinerja Direktorat PDPPI, Kementerian Keuangan Tahun 2025.....	91
Tabel III.16.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPICK TA 2025 Per Triwulan.....	97
Tabel III.17.	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Output Direktorat PPICK TA 2025	105
Tabel III.18.	Perbandingan Efisiensi/Efektivitas Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025	106
Tabel IV.1.	Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1.	Pengelolaan Air Limbah Menggunakan Mekanisme Oksidasi Kimia	11
Gambar I-2	Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	13
Gambar I-3.	Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Status Kepegawaian	20
Gambar I-4.	Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Golongan.....	22
Gambar I-5.	Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Tingkat Jabatan	26
Gambar I-6.	Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Gambar I-7	Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Kelompok Usia.....	31
Gambar I-8	Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPICK Berdasarkan Status Penilaian SKP Periode Triwulan III Tahun 2025	36
Gambar I-9	Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPICK Berdasarkan Predikat Penilaian SKP Periode Triwulan III Tahun 2025	37
Gambar I-10	Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kementerian PU Tahun 2025 pada Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2025	38
Gambar I-11	Denah Ruangan Dit. PPICK	40
Gambar I-12	Metode Rapat Daring Memanfaatkan BMN Perangkat Kantor	45
Gambar I-13.	Halaman Dashboard Potensi Investasi Sektor Air Minum yang Dikembangkan oleh Direktorat PPICK	46
Gambar I-14.	Penyerahan Penghargaan Transformasi Digital Kategori Unit Kerja pada Upacara Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2025	47
Gambar II-1.	Indikasi Pendanaan Major Project 2025 – 2029.....	51
Gambar III-1.	Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon II DJPI TA 2024	65
Gambar III-2.	Penilaian Implementasi AKIP di Direktorat PPICK Periode Tahun 2020 – 2024	67
Gambar III-3.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU TA 2024	71
Gambar III-4.	Audit Eksternal dalam rangka resertifikasi SMAP	82
Gambar III-5.	Identifikasi Potensi Proyek dalam Rencana Umum KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Cipta Karya	84
Gambar III-6.	Kunjungan Lapangan ke Lokasi Sumber Air Baku Proyek KPBU SPAM Balikpapan Tahun 2025	85
Gambar III-7.	Rapat Pembahasan SPAM Ayung 1 (Sarbagita)	86
Gambar III-8.	Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029.....	90
Gambar III-9.	Kronologis Revisi DIPA dan POK Dit. PPICK.....	92
Gambar III-10.	Pohon Anggaran Pagu TA 2025 Direktorat PPICK.....	94
Gambar III-11	Rapat Capaian Kinerja Bulan November 2025	95
Gambar III-12.	Rapat Pembahasan Capaian Kinerja DJPI Tahun Anggaran 2025	96
Gambar III-13.	Kurva S Direktorat PPICK TA 2025 (status 10 Januari 2026)	98
Gambar III-14.	DIPA Direktorat PPICK TA 2024 dan 2025 Berdasarkan Unit Pelaksana.....	99
Gambar III-15.	DIPA Direktorat PPICK TA 2024 dan 2025 Berdasarkan Rumpun KRO	101
Gambar III-16.	Distribusi Kegiatan Direktorat PPICK Tahun 2025 Berdasarkan Metode Pelaksanaan.....	103
Gambar III-17.	Distribusi Kegiatan Direktorat PPICK Tahun 2025 Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan	103
Gambar III-18.	Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I DJPI	104

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
B2B	:	<i>Business to Business</i>
BA	:	Berita Acara
BMN	:	Barang Milik Negara
BPIW	:	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
D3	:	Diploma 3
D4	:	Diploma 4
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIRJEN PI	:	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
DITJEN	:	Direktorat Jenderal
DJPI	:	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
E-SAKTI	:	<i>Electronic Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi</i>
ESG	:	<i>Environmental, Social, and Governance</i>
FCR	:	<i>Full Cost Recovery</i>
FS	:	<i>Feasibility Study</i>
ICOR	:	<i>Incremental Capital Output Ratio</i>
IEMON	:	<i>Integrated Electronic Monitoring</i>
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKSP	:	Indikator Kinerja Sasaran Program
IRJEN	:	Inspektur Jenderal
ISO	:	<i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	:	Inspektorat Jenderal
JFT	:	Jabatan Fungsional Tertentu
JP	:	Jam Pelajaran
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KEMEN PU	:	Kementerian Pekerjaan Umum
KEMENPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
LAKIN	:	Laporan Kinerja
LHE	:	Laporan Hasil Evaluasi
MONEV	:	Monitoring dan Evaluasi
MR	:	Manajemen Risiko
NIP	:	Nomor Induk Pegawai
NRW	:	<i>Non-Revenue Water</i>
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PC	:	<i>Personal Computer</i>

PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDPPI	:	Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
PERMEN	:	Peraturan Menteri
PERUMDA	:	Perusahaan Umum Daerah
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PK	:	Perjanjian Kinerja
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POK	:	Perencanaan Operasional Kegiatan
POKJA	:	Kelompok Kerja
PPICK	:	Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
PIIP	:	Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
PPISDA	:	Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN/BAPPENAS	:	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSSPP	:	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUSDATIN	:	Pusat Data dan Teknologi Informasi
RENSTRA	:	Rencana Strategis
RO	:	Rincian <i>Output</i>
RPD	:	Rencana Penarikan Dana
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
S1	:	Strata 1
S2	:	Strata 2
SDGS	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SE	:	Surat Edaran
SETDITJEN	:	Sekretariat Direktorat Jenderal
SK	:	Sasaran Kegiatan
SKP	:	Sasaran Kerja Pegawai
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMAP	:	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SMART	:	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SOP	:	<i>Standard Operational Procedure</i>
SP	:	Sasaran Program
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	:	Sasaran Strategis
SUBBAG	:	Subbagian

SUBDIT	:	Subdirektorat
TA	:	Tahun Anggaran
TIK	:	Teknologi Informasi dan komunikasi
TMT	:	Terhitung Mulai Tanggal
TNDE	:	Tata Naskah Dinas Elektronik
TPI	:	Tenaga Pendukung Individual
TTE	:	Tanda Tangan Elektronik
TU	:	Tata Usaha
TW	:	Triwulan
UKER	:	Unit Kerja
UNOR	:	Unit Organisasi
ZISWAF	:	Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, berjudul "Pendahuluan," membuka laporan ini sebagai pijakan integral yang memberikan konteks dan kerangka kerja esensial. Pendahuluan ini dirancang untuk menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi fokus analisis. Melalui pemaparan yang cermat terhadap konteks dan latar belakang subjek laporan, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi dan relevansi topik yang dibahas. Pendahuluan ini juga memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan kronologi laporan secara menyeluruh, memberikan pengantar terhadap setiap bab yang akan diuraikan, serta merinci temuan atau rekomendasi yang mungkin diungkapkan. Dengan demikian, bab pendahuluan berfungsi sebagai titik awal yang kokoh dan formal untuk membimbing pembaca menuju pemahaman yang mendalam terhadap substansi dan nilai informasional yang akan terungkap dalam setiap bab selanjutnya.

I.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah alat perbaikan sistem manajemen pemerintahan dan agenda penting pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai penyedia layanan sektor publik, Pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan proses birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang andal. Keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya praktik manajemen pemerintahan yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Salah satu komponen penyelenggaraan AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja



Gambar I-1. Pengelolaan Air Limbah Menggunakan Mekanisme Oksidasi Kimia

Sumber: tiwa.co.id

pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan publik. Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), serta memuat informasi faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*), dan faktor yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*). Dengan demikian, adanya informasi ini akan membantu instansi dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Direktorat PPICK berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen AKIP, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja yang disusun ini berbasis pada kegiatan Direktorat PPICK pada tahun 2025. Acuan yang digunakan dalam analisis capaian adalah Renstra Kementerian PU, Renstra DJPI, Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025 – 2029, dan Perjanjian Kinerja TA 2025.

I.2 Tugas dan Fungsi

Pada Tahun 2024, terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, salah satu unit kerja yang mengalami perubahan yaitu berubahnya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PIIP) menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK). Berdasarkan Pasal 793 dan 794 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat PPICK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPICK menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

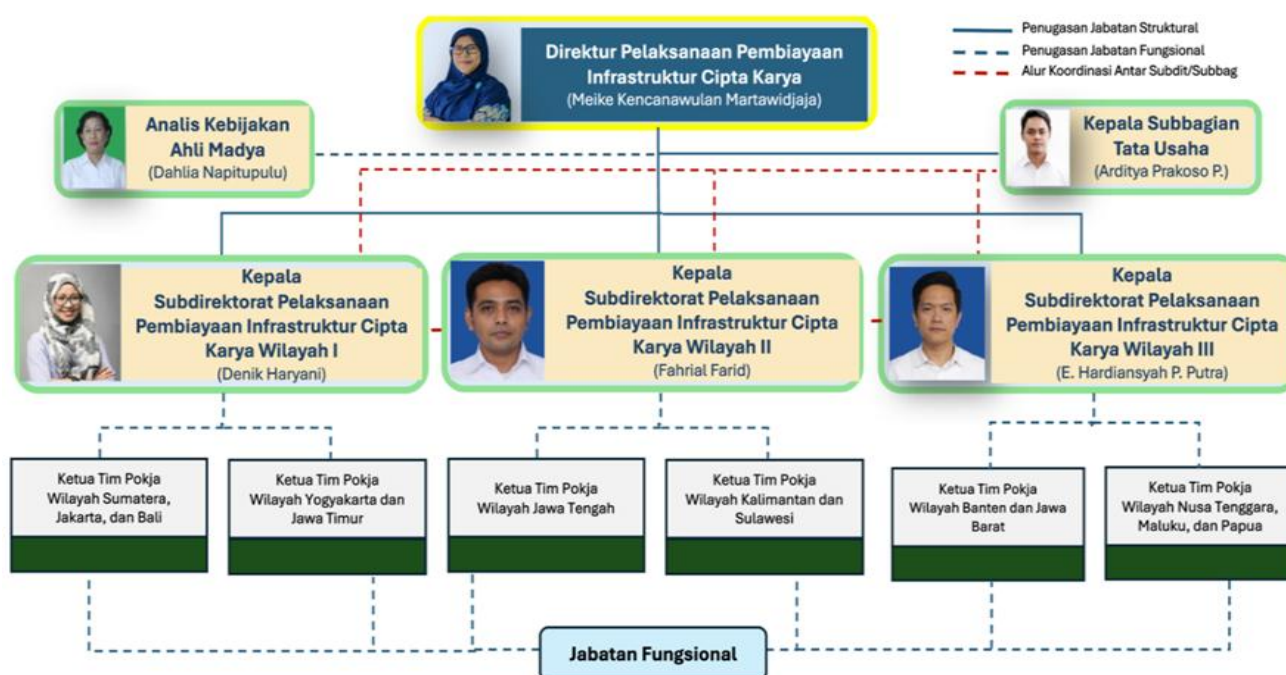
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- c. Pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- d. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- e. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- f. Pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- g. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- j. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

I.3.1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat PPICK pada Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat PPICK didukung oleh 3 (tiga) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Ada pun struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.



Gambar I-2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Sumber: SK Penugasan, diolah oleh Direktorat PPICK

Di samping penugasan secara struktural sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya juga didukung oleh pelaksana tugas jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Uraian Tugas dan Fungsi Penugasan Struktural Direktorat PPICK adalah sebagai berikut:

1) Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I

Berdasarkan Pasal 796 – 797 Permen PU Nomor 1/2024, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran pembiayaan infrastruktur cipta karya;

- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- c. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- d. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- e. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- f. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- g. penyusunan bahan masukan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pembiayaan infrastruktur cipta karya;
- h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa II yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta, dan Pulau Bali; dan
- j. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya.

Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I membawahi:

- a) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Pulau Sumatera, Jakarta, dan Bali
- b) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta

2) Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II

Berdasarkan Pasal 799 – 800 Permen PU Nomor 1/2024, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi;
- g. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa I yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.

Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II membawahi:

- a) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Jawa Tengah
- b) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi

3) Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III

Berdasarkan Pasal 802 – 803 Permen PU Nomor 1/2024, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi, penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan perjanjian kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan infrastruktur cipta

karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan identifikasi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyusunan studi pendahuluan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyusunan prastudi kelayakan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- d. penyusunan rekomendasi dukungan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- e. penyiapan transaksi dan/atau perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- f. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur cipta karya di wilayah Pulau Jawa III yang mencakup Provinsi Banten dan Jawa Barat, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- h. pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistem manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat.

Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III membawahi:

- a) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Banten dan Jawa Barat
- b) Ketua Tim Bidang Tugas Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

4) Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 805 Permen PU Nomor 1/2024, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor 12.1/KPTS/Ps/2025 tentang Penempatan dan Penugasan Aparatur Sipil Negara Beserta Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tanggal 1 Oktober 2025, terdapat 6 Jabatan Ketua Tim Pokja Bidang Tugas di Direktorat PPICK, yaitu.

1. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Sumatera, Jakarta, dan Bali;
2. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur;
3. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Jawa Tengah;
4. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
5. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Banten dan Jawa Barat;
6. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

I.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat PPICK, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Pada tahun 2025, terdapat perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 13 Desember 2024, yang mana terdapat perubahan nama Unit Kerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut, menjadikan Direktorat PPICK yang sebelumnya terdiri dari dua Subdirektorat yaitu Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, dan Subbagian Tata Usaha, menjadi tiga Subdirektorat yaitu Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III, dan Subbagian Tata Usaha. Pada periode tahun 2025 terdapat beberapa mutasi pegawai dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1. Mutasi Pegawai Direktorat PPICK Tahun 2025

No	Nama	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru	TMT
1	Fahrial Farid	Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	26 Mei 2025
2	Atika Sisilia	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	2 Juni 2025

No	Nama	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru	TMT
3	Meiky Susanto	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	01 Agustus 2025
4	Rizky Permadi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Otorita Ibu Kota Nusantara	01 September 2025
5	Alpius Tallu Lembang	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	01 Oktober 2025
6	Rachma Widi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	01 Oktober 2025

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Tabel I.2. CPNS Direktorat PPICK Tahun 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN FUNGSIONAL
1	Mohamad Nizarrahman Komeri, S.Aktr.	Penata Muda (III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
2	Sekolastika Febria Ema, S.T	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
3	Daffa Allam Hoesain, S.T	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
4	Julia Audi Pritama, S. Aktr.	Penata Muda (III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
5	Salwa Islami Athirah, A.Md.M	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN FUNGSIONAL
6	Fiorentina Novella Fajri Imani, S.Tr.T	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7	Shidqy Fajar, S.Aktr.	Penata Muda (III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
8	Ahmad Mahfuzh Arif, S.T.	Penata Muda (III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
9	Wina Ningsih Simanjuntak, S.Tr.T.	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10	Meisha Reihani Adlin, S.Aktr.	Penata Muda (III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
11	Hervindi Resta Pratiwi, A.Md.A.B.	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Terampil
12	Siska Maharani Hasibuan, S.T.	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Untuk itu, jumlah pegawai di Direktorat PPICK per tanggal 31 Desember 2025 adalah 55 orang.

1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Direktorat PPICK adalah entitas yang memiliki komposisi karyawan yang beragam, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Dalam struktur organisasi ini, masing-masing kategori pegawai memainkan peran penting yang mendukung kelancaran dan efektivitas operasional Direktorat PPICK.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi struktur dengan 21 orang atau 38% dari total pegawai. PNS di Direktorat PPICK bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan memastikan bahwa semua operasional berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

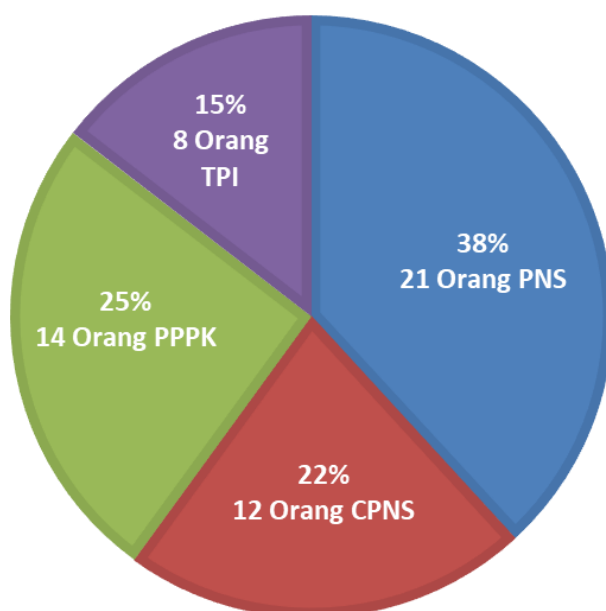
Sebanyak 14 orang atau 25% dari total pegawai Direktorat PPICK adalah PPPK. PPPK diberi tugas spesifik yang memerlukan keahlian tertentu dengan masa kerja terikat kontrak

dan memungkinkan Direktorat PPICK untuk lebih responsif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang baru.

Kategori Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencakup 12 orang atau 22% dari keseluruhan jumlah pegawai. CPNS adalah tenaga kerja yang direkrut untuk mengisi formasi di Direktorat PPICK. Keberadaan CPNS meningkatkan fleksibilitas organisasi dan memungkinkan Direktorat PPICK untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan atau tantangan yang muncul.

Terakhir, ada Tenaga Pendukung Individu (TPI) yang berjumlah 8 orang atau 15%. TPI membawa keahlian khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat PPICK.

Keseluruhan, terdapat total 55 pegawai di Direktorat PPICK, dengan masing-masing kategori pegawai berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Direktorat. Dengan komposisi yang beragam ini, menunjukkan komitmen Direktorat dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, yang pada akhirnya memastikan bahwa seluruh SDM dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di bidang pembiayaan infrastruktur cipta karya. Kombinasi berbagai kategori pegawai ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor publik. Komposisi kategori pegawai di Direktorat PPICK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-3. Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Analisis lebih lanjut terhadap komposisi pegawai di Direktorat PPICK dilakukan berdasarkan distribusi gender. Perbandingan antara perempuan dan laki-laki di setiap kategori pegawai memberikan wawasan penting tentang keragaman gender dalam organisasi.

Dalam kelompok PNS, pegawai dengan gender perempuan memiliki proporsi yang lebih besar dari pada laki-laki yaitu 52% dan pada kelompok CPNS sebesar 67%. Proporsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan.

Sementara itu, pada kelompok PPPK, distribusi gender seimbang dengan 50% perempuan dan 50% laki-laki. Proporsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan.

Untuk kategori TPI, dipenuhi dengan 100% gender laki-laki. Ini mungkin mencerminkan tren di industri tertentu atau bidang keahlian teknis yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

Secara keseluruhan, dari total pegawai di Direktorat PPICK, 47% adalah perempuan dan 53% adalah laki-laki. Data ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk kesetaraan gender, masih terdapat ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Situasi ini mendorong Direktorat PPICK untuk terus berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi kedua gender berdasarkan kategori kepegawaian. Distribusi pegawai berdasarkan gender ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel I.3. Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	10	11	21
CPNS	4	8	12
PPPK	7	7	14
TPI	8	0	8
Total	29	26	55

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Distribusi pegawai pada Direktorat PPICK berdasarkan golongan dan kelompok jabatan memberikan gambaran mengenai struktur kepangkatan dan tingkat profesionalisme dalam lingkungan kerja. Menilik klasifikasi golongan pegawai di Direktorat PPICK, terdapat variasi antara pegawai dengan status PNS, CPNS, dan PPPK. Untuk kelompok PNS dan CPNS terdiri dari golongan II, III, dan IV, sementara untuk kelompok PPPK terdiri dari golongan III, V, VII, dan IX. Grafik distribusi berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar I.5.

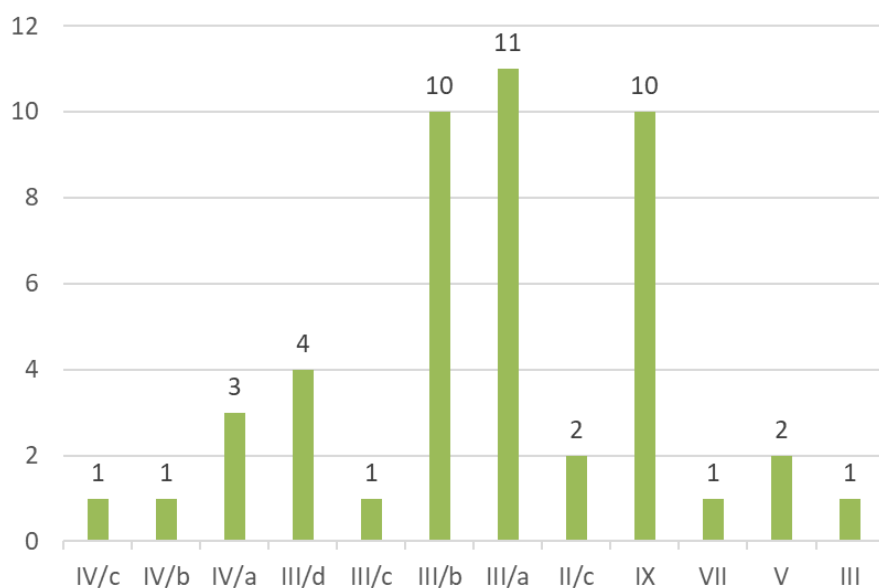
Komposisi berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III/a (PNS dan CPNS) sebanyak 11 orang (23,40%), diikuti golongan III/b (PNS) dan golongan IX (PPPK) sebanyak masing-masing 10 orang (21,27%), golongan III/d (PNS) sebanyak 4 orang (8,51%), golongan IV/a (PNS) sebanyak 3 orang (6,38%), selanjutnya golongan II/c (CPNS)

dan V (PPPK) sebanyak masing-masing 2 orang (4,25%), terakhir golongan IV/c (PNS), IV/b (PNS), III/c (PNS), VII (PPPK) dan III (PPPK) sebanyak masing-masing 1 orang (2,12%).

Golongan II/c mencakup 4,25%, meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan pegawai di golongan ini membantu jalannya kerja organisasi. Di sisi lain, golongan III/a mendominasi dengan proporsi 23,40%, diikuti oleh golongan III/b yang mencakup 21,27%. Kehadiran pegawai golongan III yang dominan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dit. PPICK berada pada tingkat menengah dalam hierarki pangkat. Golongan ini umumnya mencakup individu dengan latar belakang pendidikan Strata 1 dan atau Strata 2 yang telah memiliki pengalaman signifikan dan memiliki keahlian khusus, yang memiliki kritikal dalam pelaksanaan dan manajemen proyek infrastruktur.

Golongan III/d dan III/c, yang masing-masing menyumbang 8,5% dan 2,1%, melengkapi representasi golongan menengah. Keterwakilan yang merata dalam golongan-golongan ini menandakan adanya kesinambungan dalam pengembangan karier dan penerapan keahlian di Direktorat PPICK. Ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mengembangkan potensi pegawainya melalui berbagai tingkatan keahlian dan tanggung jawab.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada golongan IV (IV/c, IV/b, dan IV/a), meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan pegawai di golongan ini sangat penting. Ini mencakup individu-individu yang berada pada posisi senior, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kemungkinan pengambilan keputusan strategis. Kehadiran mereka tidak hanya vital dalam mengarahkan kebijakan dan strategi organisasi, tetapi juga dalam membimbing dan menginspirasi pegawai di golongan yang lebih rendah. Distribusi SDM berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar I-4. Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Golongan

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Tabel I.4. Status Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV (PNS)	2	3	5
III (PNS dan CPNS)	12	14	26
II (CPNS)	0	2	2
IX (PPPK)	5	5	10
VII (PPPK)	0	1	1
V (PPPK)	1	1	2
III (PPPK)	1	0	1
Total	21	26	47

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Sesuai Tabel I.4 di atas, komposisi gender di golongan IV (PNS) didominasi oleh gender perempuan sebanyak 3 orang (60%) sementara gender laki-laki sebanyak 2 orang (40%), golongan III (PNS dan CPNS) didominasi oleh gender perempuan sebanyak 14 orang (54%) sementara gender laki-laki sebanyak 12 orang (46%), golongan II (CPNS) dengan gender perempuan sebanyak 2 orang (100%), golongan IX dengan distribusi gender seimbang sebanyak 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki, golongan VII (PPPK) dengan gender perempuan sebanyak 1 orang (100%), golongan V dengan distribusi gender seimbang sebanyak masing-masing 1 orang, terakhir golongan III (PPPK) dengan gender laki-laki sebanyak 1 orang (100%).

Pada golongan III PPPK, dipenuhi dengan 100% laki-laki. Ini mencerminkan tren di bidang keahlian teknis yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Berbeda dengan golongan VII, dimana distribusi gender 100% perempuan.

Sementara itu, pada golongan IX dan V, distribusi gender seimbang dengan 50% perempuan dan 50% laki-laki. Proporsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan.

Golongan II/c, distribusi gender sebanyak 100% perempuan, sama halnya pada golongan III/d, III/c, III/b, III/a, yang merupakan kelompok terbesar, perempuan mendominasi 54% atau 14 perempuan, sementara laki-laki dengan 46% atau 12 laki-laki. Proporsi perempuan yang signifikan di golongan ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

Dalam golongan IV/c, IV/b, IV/a, terdapat keterwakilan perempuan sebesar 60%, dengan tiga perempuan dan dua laki-laki. Kondisi ini langka dan patut dicatat sebagai contoh kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, terutama di tingkat senior. Kehadiran

perempuan secara eksklusif di golongan ini membuktikan adanya kemajuan nyata dalam mendorong kesetaraan gender, sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki dalam mengisi posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dari perspektif pengembangan karier, data ini memberikan indikasi bahwa Direktorat PPICK telah berupaya mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Upaya ini penting tidak hanya dalam konteks keadilan sosial, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam, yang mana berbagai perspektif dan keahlian dapat dikolaborasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Keberadaan kesenjangan gender, terutama di golongan menengah menunjukkan perlunya strategi yang lebih terfokus untuk mempertahankan talenta perempuan di semua level organisasi. Direktorat PPICK dapat mengembangkan program *mentorship*, pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, dan inisiatif lain yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam peran kepemimpinan.

Dalam konteks yang lebih luas, kesetaraan gender di tempat kerja bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi penuh sumber daya manusia. Organisasi yang mampu memanfaatkan keahlian dan perspektif kedua gender cenderung lebih inovatif, adaptif, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Untuk Direktorat PPICK, terus mempromosikan kesetaraan gender berarti tidak hanya memenuhi komitmen sosialnya, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasional.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, distribusi golongan pegawai di Direktorat PPICK menunjukkan pola yang sehat. Dengan dominasi golongan menengah, terlihat bahwa ada ruang yang cukup bagi pegawai untuk berkembang dan naik pangkat. Hal ini penting dalam menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Untuk mendukung dinamika ini, Direktorat PPICK dapat melanjutkan dan meningkatkan inisiatifnya dalam pengembangan profesional, seperti pelatihan, seminar, dan program *mentorship*.

Selain itu, integrasi pegawai PPPK dalam golongan III, V, VII, dan IX menunjukkan adaptasi organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja yang fleksibel dan dinamis. Keberadaan golongan ini menambah keanekaragaman dalam struktur kepegawaian, yang dapat memperkaya kolaborasi dan inovasi. Direktorat PPICK dihadapkan pada tugas untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang ada mendukung kinerja dan kesejahteraan semua pegawai, terlepas dari status kepegawaian mereka.

Berdasarkan kelompok jabatan di Direktorat PPICK, struktur jabatan terdiri dari beberapa tingkatan yang mencakup Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta Jabatan Struktural yaitu Eselon II, III, dan IV. Distribusi pegawai pada masing-masing jenis jabatan ini memberikan gambaran tentang fokus organisasi dan struktur kepemimpinan yang diterapkannya.

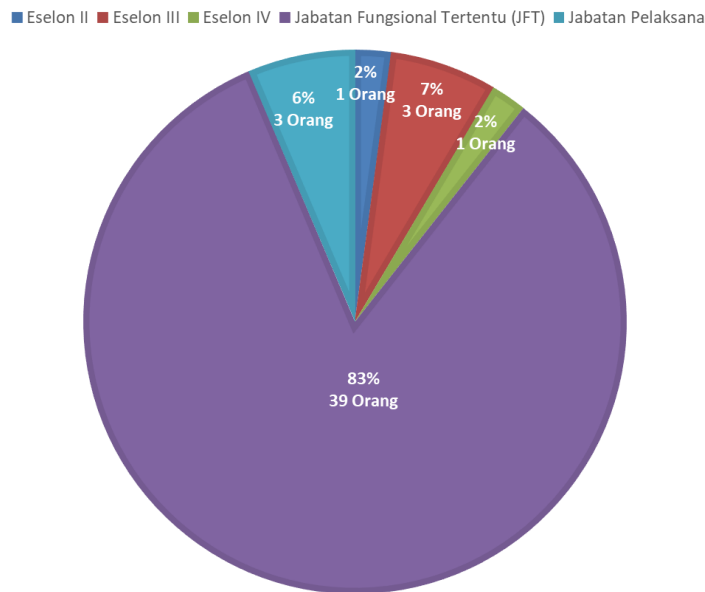
Berdasarkan Gambar 1.7., dapat dilihat bahwa kelompok jabatan paling dominan adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diisi oleh 39 pegawai, menyumbang 83% dari total

ASN. Kehadiran JFT dalam proporsi yang besar ini menandakan bahwa Direktorat PPICK memberikan penekanan kuat pada spesialisasi dan keahlian teknis. Pegawai pada jabatan fungsional ini mencakup berbagai spesialisasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan infrastruktur cipta karya, seperti analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, penata kelola penyehatan lingkungan, penata kelola bangunan dan gedung, perencana, keuangan, analisis kebijakan hingga arsiparis. Dominasi JFT dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa Direktorat PPICK mengutamakan kompetensi teknis dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Selanjutnya, pada tingkatan Eselon IV, terdapat 1 pegawai yang mewakili 2% dari total ASN. Posisi ini biasanya diisi oleh individu yang bertanggung jawab atas sub-unit atau seksi dalam sebuah departemen. Kehadiran pegawai Eselon IV, menunjukkan bahwa terdapat tingkat manajerial yang mengawasi operasional sehari-hari dan memastikan bahwa penatausahaan direktorat diimplementasikan dengan efektif.

Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Eselon III diisi oleh 3 pegawai, yang merupakan 7% dari total jumlah ASN. Jabatan ini menempatkan seseorang dalam posisi kepemimpinan yang lebih besar, dengan tanggung jawab atas satu subdirektorat. Individu pada posisi Eselon III memainkan peran penting dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Kelompok ini berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan operasional, memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang disusun oleh manajemen puncak dijalankan dengan baik.

Puncak struktur hierarki diisi oleh Eselon II, dengan 1 pegawai yang mewakili 2% dari total ASN. Posisi ini diisi oleh individu yang memegang peran kunci dalam organisasi sebagai direktur. Eselon II bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penentuan strategi, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Keberadaan satu pegawai pada tingkatan ini menegaskan struktur kepemimpinan yang terpusat di Direktorat PPICK, yang mana keputusan penting dan arahan strategis berasal dari tingkat manajemen yang sangat tinggi. Distribusi SDM berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar I-5. Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Tingkat Jabatan

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Analisis distribusi gender dalam struktur jabatan di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK) sebagaimana Tabel I.5 menunjukkan aspek penting lain dari organisasi ini. Menganalisis perbandingan gender di setiap tingkatan jabatan memberikan wawasan tentang keterwakilan dan keseimbangan gender dalam organisasi ini, yang berperan penting dalam pembentukan budaya kerja dan dinamika organisasi.

Tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) didominasi pegawai perempuan. Dari 39 orang pegawai JFT, 23 orang adalah perempuan (59%) dan 16 orang adalah laki-laki (41%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal perekrutan dan pengembangan karier di bidang teknis dan spesialisasi, Direktorat PPICK telah menerapkan pendekatan yang relatif egaliter. Keterwakilan perempuan yang signifikan pada jabatan ini menandakan adanya peluang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aspek teknis dan profesional organisasi. Keterlibatan perempuan dalam JFT juga bisa meningkatkan keragaman perspektif dan pendekatan dalam pengelolaan dan pemecahan masalah, yang penting untuk dinamika inovatif dan adaptif dalam pengelolaan infrastruktur cipta karya.

Terdapat perbedaan pola distribusi gender pada tingkat Eselon. Pada tingkat Eselon IV, jabatan ini diisi oleh laki-laki (100%). Sementara itu, pada tingkat Eselon III, terdapat dominasi pegawai laki-laki sebanyak dua orang dan pegawai perempuan sebanyak satu orang, dan Eselon II diisi oleh perempuan (100%). Kondisi ini mencerminkan adanya divergensi yang mencolok dalam keterwakilan gender pada tingkatan manajerial. Ketiadaan perempuan pada tingkat Eselon IV, dominasi laki-laki pada tingkat Eselon III dan perempuan pada tingkat Eselon II bisa mencerminkan berbagai dinamika, termasuk pola perekrutan, kesempatan promosi, dan dinamika sosial budaya yang mempengaruhi pilihan karier.

Pengisian gender perempuan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi (Eselon II) menunjukkan bahwa di Direktorat PPICK, perempuan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Ini adalah indikasi yang positif dari pemberdayaan perempuan dan menunjukkan sebuah lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier perempuan. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan tinggi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi pegawai perempuan lainnya di organisasi, memperkuat peran mereka dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Tabel I.5. Status Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025

Tingkat Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	0	1	1
Eselon III	2	1	3
Eselon IV	1	0	1
JFT	16	23	39
Pelaksana	2	1	3
Total	21	26	47

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

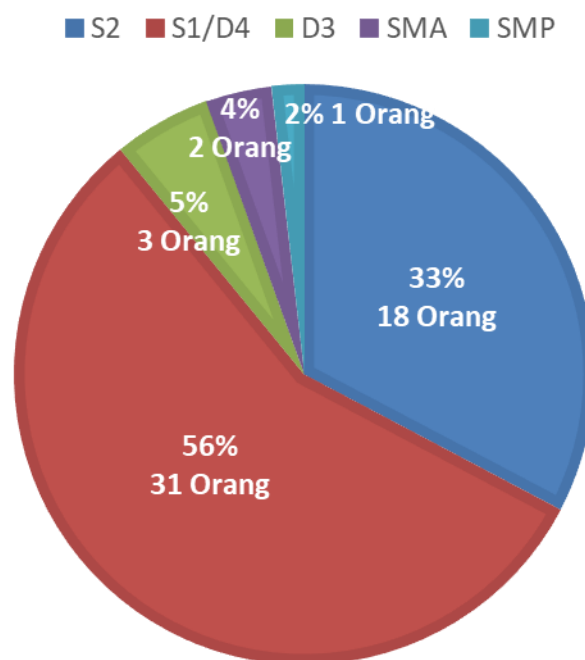
1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh dalam pembentukan sumber daya manusia sebuah organisasi. Di Direktorat PPICK, distribusi tingkat pendidikan pegawainya mencerminkan komitmen organisasi dalam mempertahankan standar kompetensi yang tinggi. Dari data yang tersedia, dapat terlihat variasi tingkat pendidikan, mulai dari SMP hingga S2, yang memberikan gambaran mengenai keragaman latar belakang pendidikan dalam organisasi.

Terdapat satu pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP. Meskipun jumlahnya kecil, keberadaan pegawai dengan pendidikan dasar ini menunjukkan kesempatan yang diberikan Direktorat PPICK kepada berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMP mungkin berperan dalam tugas-tugas yang lebih praktis, namun tetap penting dalam mendukung operasional organisasi secara keseluruhan. Sebanyak dua pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK tidak hanya fokus pada tingkat pendidikan tinggi tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kualifikasi menengah untuk berkembang dan memberikan kontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMP dan SMA ini mungkin menempati posisi yang membutuhkan keterampilan teknis atau administratif yang solid.

Terdapat tiga pegawai dengan latar belakang D3. Pendidikan diploma tiga ini memberikan kemampuan praktis yang membantu kerja organisasi. Mayoritas pegawai Direktorat PPICK memiliki latar belakang pendidikan S1/D4, dengan total 31 orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai di organisasi ini memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Pendidikan sarjana memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan kemampuan analitis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan kompleks dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur cipta karya. Kehadiran banyak lulusan S1/D4 juga mencerminkan standar tinggi yang diadopsi Direktorat PPICK dalam merekrut pegawainya, memastikan bahwa organisasi ini diisi oleh individu yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan.

Lebih lanjut, terdapat 18 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S2. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK mengedepankan pendidikan lanjutan dan spesialisasi. Pegawai dengan pendidikan S2 kemungkinan besar menempati posisi strategis, di mana keahlian khusus dan pengetahuan mendalam sangat diperlukan. Keberadaan pegawai dengan pendidikan S2 menggarisbawahi komitmen Direktorat PPICK dalam menerapkan praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam pembiayaan infrastruktur cipta karya. Grafik distribusi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-6. Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Analisis distribusi gender dalam tingkat pendidikan pegawai di Direktorat PPICK mengungkapkan wawasan tentang kesetaraan gender di tempat kerja. Persebaran ini tidak hanya mencerminkan komposisi tenaga kerja saat ini tetapi juga menyoroti bagaimana pendidikan dan kesempatan berkembang di antara pegawai perempuan dan laki-laki.

Dalam kategori pendidikan SMP, terdapat satu pegawai laki-laki, dan tidak ada pegawai perempuan. Meskipun jumlahnya terbatas, ini menunjukkan bahwa peluang bagi individu dengan pendidikan dasar untuk berkontribusi dalam organisasi terbuka bagi semua gender, meski dalam kasus ini diwakili oleh laki-laki.

Pada tingkat SMA, proporsi gender menunjukkan keseimbangan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan, yang mana masing-masing memiliki jumlah satu orang pegawai. Angka ini menunjukkan adanya keseimbangan gender di Direktorat PPICK.

Kategori tingkat D3, terdiri dari tiga pegawai perempuan yang mana keberadaan perempuan di tingkat ini menandakan bahwa Direktorat PPICK telah memberdayakan perempuan di semua tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Pada kategori tingkat S1/D4, terjadi peningkatan proporsi gender, dengan 13 orang perempuan (42%) dan 18 orang laki-laki (58%). Hal ini menandakan bahwa Direktorat PPICK memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, terutama di tingkat pendidikan sarjana, yang merupakan mayoritas kualifikasi pegawainya. Kehadiran signifikan perempuan dengan pendidikan S1/D4 menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang setara ke posisi-posisi yang memerlukan kualifikasi tinggi, memberikan mereka peluang untuk berkontribusi secara substansial dalam pengelolaan infrastruktur cipta karya.

Di tingkat S2, terjadi keseimbangan gender, dengan total 18 pegawai dengan pendidikan S2. Ini merupakan indikasi positif mengenai keterwakilan perempuan di posisi-posisi yang memerlukan keahlian dan pengetahuan spesialis, menandakan kemajuan Direktorat PPICK dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja yang lebih tinggi dan spesialis.

Analisis ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK telah membuat kemajuan signifikan dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mencapai keseimbangan yang lebih adil di tingkat pendidikan yang lebih rendah, tren umumnya positif.

Keberagaman gender di berbagai tingkat pendidikan menciptakan lingkungan kerja yang kaya akan perspektif dan pengalaman. Dengan memiliki pegawai perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, Direktorat PPICK memperkuat kemampuannya dalam menangani isu-isu yang kompleks dengan pendekatan yang lebih inklusif. Hal ini sangat penting dalam dunia pembiayaan infrastruktur cipta karya, di mana keputusan dan strategi yang efektif sering kali memerlukan pemahaman yang luas dan beragam.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang meningkat di tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan komitmen Direktorat PPICK dalam mendukung pengembangan karier perempuan. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya memperhatikan rekrutmen perempuan tetapi juga pengembangan karier mereka, termasuk pendidikan lanjutan dan posisi kepemimpinan.

Keragaman tingkat pendidikan di Direktorat PPICK memberikan perspektif dan keterampilan unik yang ketika digabungkan, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pegawai dengan pendidikan dasar dan menengah memberikan dukungan penting dalam operasional, sementara mereka dengan pendidikan tinggi memberikan wawasan strategis dan inovatif.

Dengan memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang pendidikan, organisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitasnya, tetapi juga memperkaya budaya kerja dengan keberagaman pengalaman dan perspektif. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur cipta karya, di mana solusi yang inovatif dan beragam sering kali diperlukan.

Selain itu, keberagaman tingkat pendidikan ini membuka peluang untuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar pegawai. Pegawai dengan pendidikan formal yang lebih tinggi dapat berbagi wawasan dan keterampilan mereka, sementara mereka yang memiliki pengalaman praktis memberikan perspektif yang berbeda. Interaksi semacam ini mendorong budaya belajar dan kolaborasi yang kaya, yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi yang dinamis dan adaptif seperti Direktorat PPICK.

Dalam konteks yang lebih luas, distribusi pendidikan pegawai di Direktorat PPICK menggambarkan sebuah organisasi yang menghargai pengetahuan dan pembelajaran. Dengan memastikan bahwa pegawainya memiliki beragam latar belakang pendidikan, Direktorat PPICK tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan. Tabel distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025

Tingkat Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	9	9	18
S1/D4	18	13	31
D3	0	3	3
SMA	1	1	2
SMP	1	0	1
Total	29	26	55

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

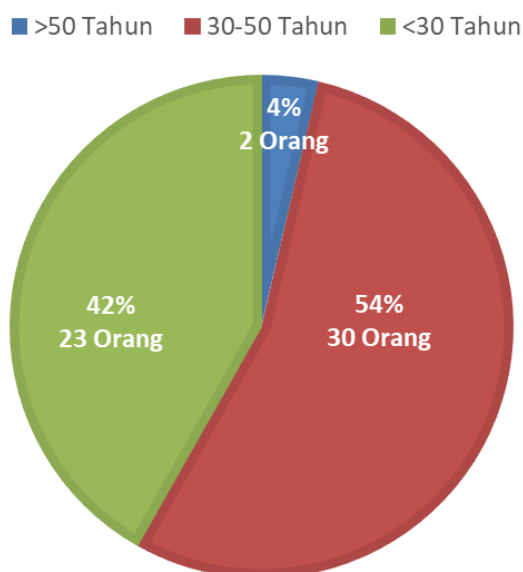
Dalam upaya memahami komposisi demografi pegawai di Direktorat PPICK, penting untuk melihat distribusi mereka berdasarkan kelompok usia. Data pegawai dibagi ke dalam tiga kelompok usia utama: di bawah 30 tahun, antara 30 hingga 50 tahun, dan di atas 50 tahun.

Analisis ini memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika kerja dan potensi perkembangan organisasi ke depan.

Kelompok usia di bawah 30 tahun mencakup 42% dari total pegawai, yang berjumlah 23 orang. Kehadiran jumlah yang signifikan dari pegawai muda ini menandakan adanya vitalitas dan inovasi dalam lingkungan kerja. Pegawai dalam kelompok usia ini biasanya membawa semangat baru, pendekatan yang berbeda, dan keakraban dengan teknologi terkini. Ini adalah aset berharga dalam mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tren dan tantangan baru di lingkungan kerja yang cepat berubah. Mereka juga menunjukkan potensi untuk pengembangan jangka panjang dalam organisasi, yang dapat dilatih dan dikembangkan untuk memegang peran kunci di masa depan.

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun adalah yang terbesar, dengan 54% atau 30 orang dari total pegawai. Kelompok ini biasanya memiliki pengalaman kerja yang lebih luas, kemampuan kepemimpinan yang matang, dan pengetahuan mendalam tentang operasional organisasi. Mereka seringkali berada di posisi kunci yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Kehadiran kelompok usia ini di Direktorat PPICK menunjukkan adanya fondasi yang kuat dan stabil. Pegawai dalam kelompok usia ini juga berperan penting dalam membimbing dan mengajar pegawai yang lebih muda, memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan praktik kerja yang efektif.

Sementara itu, pegawai yang berusia di atas 50 tahun hanya mencakup 4% dari keseluruhan tenaga kerja, berjumlah 2 orang. Meski jumlahnya terbatas, kelompok usia ini membawa pengalaman yang tak ternilai, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang sejarah dan perubahan organisasi. Keterlibatan kelompok ini penting untuk memastikan konsistensi dan stabilitas dalam kebijakan dan praktik organisasi. Komposisi distribusi pegawai Direktorat PPICK berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-7 Distribusi Pegawai Direktorat PPICK Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Analisis demografis pegawai Direktorat PPICK tidak hanya terbatas pada aspek usia, tetapi juga melibatkan komponen gender. Mengkaji distribusi gender dalam berbagai kelompok usia memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman di tempat kerja. Keseimbangan gender, terutama dalam konteks usia, membawa perspektif yang lebih beragam dan dapat meningkatkan dinamika kerja tim serta keputusan organisasi.

Pada kelompok usia di bawah 30 tahun, menunjukkan dominasi laki-laki, dengan 57% adalah laki-laki dan 43% perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada *level entry* atau awal karier, Direktorat PPICK telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perekrutan, ini mengindikasikan adanya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan kerja.

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun menunjukkan dominasi laki-laki, dengan 16 orang laki-laki (53%) dan 14 orang perempuan (47%). Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks karier menengah, yang seringkali berkaitan dengan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan pribadi. Meskipun demikian, kehadiran perempuan dalam kelompok ini penting karena mereka membawa perspektif yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi signifikan pada proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Direktorat PPICK dapat meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan inklusif untuk perempuan, khususnya dalam mendukung karier jangka panjang mereka.

Pada kelompok usia di atas 50 tahun, proporsi gender dipenuhi oleh 100% perempuan. Ini menunjukkan bahwa, perempuan dalam kelompok usia ini memiliki peran yang cukup kuat dalam organisasi. Hal ini bisa mencerminkan pengalaman dan ketahanan karier yang luar biasa dari perempuan-perempuan senior ini, yang telah berhasil menavigasi berbagai tantangan karier.

Dari analisis ini, terlihat bahwa Direktorat PPICK memiliki distribusi usia yang beragam. Keberagaman usia ini menguntungkan karena setiap kelompok usia membawa perspektif, keterampilan, dan pengalaman yang unik ke dalam organisasi. Untuk memanfaatkan kekuatan dari setiap kelompok, Direktorat PPICK dapat mengadopsi strategi yang berfokus pada kolaborasi lintas generasi. Misalnya, program *mentor-mentee* antara pegawai senior dan junior dapat menjadi sarana efektif untuk transfer pengetahuan. Selain itu, pengembangan pelatihan yang disesuaikan untuk setiap kelompok usia akan membantu memaksimalkan potensi mereka.

Kombinasi antara kekuatan, inovasi, dan pengalaman dari semua kelompok usia ini, jika dikelola dengan baik, akan menjadikan Direktorat PPICK sebuah organisasi yang resilien dan adaptif. Dengan memahami dan menghargai kontribusi setiap kelompok usia, Direktorat PPICK dapat membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi secara keseluruhan. Komposisi distribusi pegawai Direktorat PPICK berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.7. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Direktorat PPICK Tahun 2025

Tingkat Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
>50 tahun	2	0	2
30-50 tahun	14	16	30
<30 tahun	10	13	23
Total	26	29	55

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

I.4 Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 mewajibkan ASN untuk terus menerus mengembangkan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi agar relevan dengan tuntutan organisasi, mencakup pengembangan teknis, manajerial, dan sosiokultural, serta memberikan hak bagi ASN untuk pengembangan diri, termasuk pelatihan dan pengembangan talenta, dengan target jam pelajaran yaitu 20 JP per tahun untuk PNS dan minimal 24 JP per tahun untuk PPPK. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai Direktorat PPICK dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel I.8. Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Direktorat PPICK Tahun 2025

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	Jumlah JP
1	Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T., MDM	196905311997032001	IV/c	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	3	66
2	Denik Haryani, S.T., M.Sc.	198601152009122001	(IV/a)	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I	4	1016
3	Fahrial Farid, S.T., M.B.A.	198012072009031001	(IV/a)	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II	3	96
4	E. Hardiansyah Pranata P, ST, M.Sc	198501212008121001	(IV/a)	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III	5	160
5	Arditya Prakoso Putra, S.I.A., M.E.	199007262014021004	(III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	3	110

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPICK – DJPI TA 2025

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	Jumlah JP
6	Charles Sianturi, S.T, M.Sc	198907312010121005	(III/d)	Ketua Tim Pokja Wilayah Sumatera, Jakarta, Bali	4	48
7	Muhammad Erpin Al Ghifari, S.kom	199310252018021001	(III/b)	Ketua Tim Pokja Wilayah Yogyakarta, Jawa Timur	4	54
8	Nurul Ainy Gumilar, S.E., M.T	198712162010122007	(III/d)	Ketua Tim Pokja Wilayah Banten, Jawa Barat	3	35
9	Satriadi Utomo, S.Kom.	198105202009121001	(III/d)	Ketua Tim Pokja Wilayah Jawa Tengah	1	52
10	Reisi Rizqie Auliya, S.Tr.M	199510142019032008	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	5	49
11	Muhammad Yodi Rizkyardi, S.E., M.B.A	198911012020121002	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	5	97
12	Ir. Dahlia Napitupulu, M.M	196610031992032001	(IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	14
13	Ervia Yulanda, S.E.	198406262010122004	(III/d)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda	5	83
14	Regina Yuliani, S.E	199507072019032018	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	3	60
15	Ahmad Shauqi, S.E., M.M	198809272020121002	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	3	79
16	Dwi Nur Luthfiyyah, SPWK	199708122020122012	(III/a)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	7	54
17	Rina Erfina, S.ST., M.M	199006162020122003	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4	153
18	Arrum Dyah Apriliana, S.I.A., M.M	199004032020122004	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	9	80
19	Glenn Edo Prasetyo Roosland, S.I.A., M.M	199009072020121003	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	5	60
20	Medha Andika Prabowo, S.I.A., M.M	198912222020121003	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4	38
21	Raissa Rahmaditya Rabilla, S.E., M.M.	199209132020122005	(III/b)	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan	8	93

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPICK – DJPI TA 2025

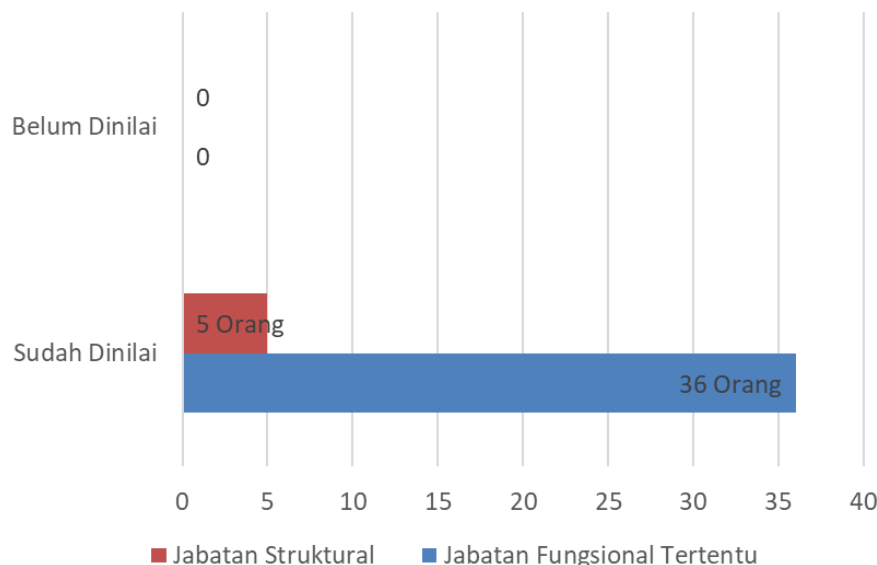
No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	Jumlah JP
				Umum dan Perumahan Ahli Pertama		
22	Mohamad Nizarrahman Komeri, S.Aktr.	199909182025061011	III/a	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	7	688
23	Sekolastika Febria Ema, S.T	199902102025062008	III/a	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	4	681
24	Daffa Allam Hoesain, S.T	199906182025061011	III/a	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	3	679
25	Julia Audi Pritama, S. Aktr.	199907232025062018	III/a	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4	681
26	Salwa Islami Athirah, A.Md.M	200004152025062017	II/c	Arsiparis Terampil	2	649
27	Fiorentina Novella Fajri Imani, S.Tr.T	199811192025062015	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	3	679
28	Shidqy Fajar, S.Aktr.	200001082025061009	III/a	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	7	688
29	Ahmad Mahfuzh Arif, S.T.	200108042025061013	III/a	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	3	679
30	Wina Ningsih Simanjuntak, S.Tr.T.	200106252025062018	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	5	701
31	Meisha Reihani Adlin, S.Aktr.	200105242025062017	III/a	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4	681
32	Hervindi Resta Pratiwi, A.Md.A.B.	199905022025062017	II/c	Pranata Keuangan APBN Terampil	6	714
33	Siska Maharani Hasibuan, S.T.	199708112025062010	III/a	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	4	681
34	Klara Nala Rita, S.T.	199505062023212026	IX	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	5	48
35	Esther Melisa Indiana Sembiring, S.E.	199601212023212031	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3	49
36	Lutfhy Ramadhan, S.T	199303062023211020	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	10	22
37	Haryadi, S.Pd, M.T	197905222024211001	IX	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	24	149
38	Nurafi' Hananprapoerti	199510272024212012	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	48
39	Zulfahmi, S.E	198203222024211003	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6	25

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	Jumlah JP
40	Nur Annisa, SST.	199308092024212049	IX	Arsiparis Ahli Pertama	5	44
41	Indriati, A.Md	198303152024212009	VII	Arsiparis Terampil	4	45
42	Adhar Rahman, SE	19821001202511040	IX	Arsiparis Ahli Pertama	1	0
43	Elaine Christianti, SS	198208252025212033	IX	Arsiparis Ahli Pertama	1	0
44	Herdian Tamtama Putra, SM	199712182025211024	IX	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	4	22
45	Syagita Rachmawati	198706172025212039	V	Pengadministrasi Perkantoran	1	0
46	Nono Warsono	197903012025211021	V	Operator Layanan Operasional	2	7
47	Ahmad Sofian	198311072025211032	III	Pengelola Umum Operasional	0	0

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

I.5 Penerapan *Rewards* dan *Punishment*

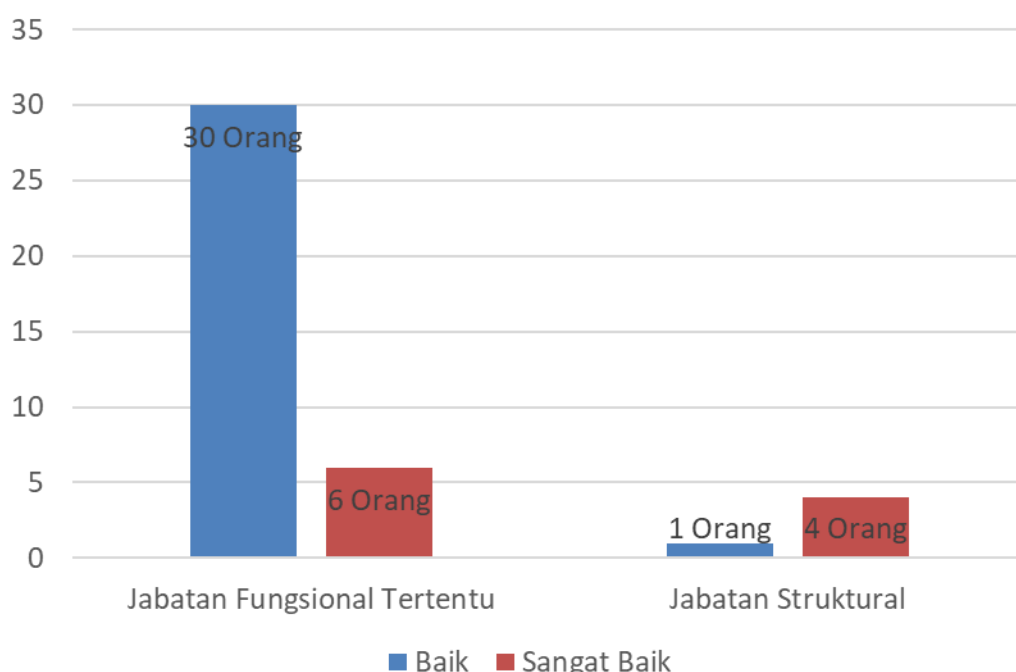
Sebuah langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia telah diimplementasikan, yaitu penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang terkait dengan pemberian tunjangan kinerja. Sistem ini telah diberlakukan bagi pegawai dengan status ASN, yang mencakup PNS dan PPPK. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat PPICK. Status penilaian SKP periode triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-8 Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPICK Berdasarkan Status Penilaian SKP Periode Triwulan III Tahun 2025

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Penerapan sistem *reward* dan *punishment* ini berlandaskan pada dasar penilaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari periode sebelumnya. SKP menjadi alat ukur yang penting dan objektif dalam menentukan kinerja setiap pegawai. Melalui sistem ini, pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan atau *reward*, sedangkan mereka yang kinerjanya di bawah standar akan menerima *punishment* atau sanksi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka, sekaligus menjadi sarana untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pegawai ASN Direktorat PPICK berdasarkan predikat penilaian SKP periode triwulan III tahun 2025 dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar I-9 Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPICK Berdasarkan Predikat Penilaian SKP Periode Triwulan III Tahun 2025

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Hingga penerbitan laporan kinerja ini, SKP seluruh ASN Direktorat PPICK untuk periode Triwulan IV tahun 2025 belum dilakukan penilaian. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi sistem penilaian ini, dapat diambil contoh dari penilaian SKP ASN Direktorat PPICK untuk Triwulan III tahun 2025. Dalam periode tersebut, seluruh ASN telah dinilai, sebanyak 31 pegawai mendapatkan predikat "BAIK" dan sebanyak 10 pegawai mendapatkan predikat "SANGAT BAIK". Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dan usaha yang baik dari pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Predikat ini menjadi indikator positif bahwa pegawai Direktorat PPICK memiliki kompetensi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Sistem *reward* dan *punishment* berbasis kinerja ini, jika diterapkan dengan efektif, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas kerja ASN secara keseluruhan. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara

umum, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian SKP dilakukan secara adil, transparan, dan tepat waktu untuk menjamin keberhasilan penerapan sistem ini.

Penerapan sistem *reward* dan *punishment* ini merupakan langkah progresif dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan Direktorat PPICK. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, sistem ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan standar kinerja dan motivasi pegawai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada tanggal 22 September 2025, Direktorat PPICK mengusulkan satu pegawai sebagai Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PU.



Gambar I-10 Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kementerian PU Tahun 2025 pada Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2025

Sumber: Dokumentasi Direktorat PSSPP

Arrum Dyah Apriliana (pada Gambar I.10. ketiga dari kanan) adalah Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama di Direktorat PPICK yang diusulkan sebagai Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PU. Pegawai ini telah menunjukkan

bahwa dedikasi dan kerja keras dapat menghasilkan dampak yang signifikan.

Pengusulan Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PU ini tidak hanya merupakan pengakuan atas prestasi dan kedisiplinan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh anggota Direktorat PPICK untuk terus berinovasi, disiplin, dan bekerja keras. Pegawai teladan ini telah menjadi contoh nyata bahwa kerja keras dan komitmen terhadap kualitas dapat membawa pengakuan serta perubahan positif dalam organisasi dan sektor yang dilayani.

I.6 Sarana dan Prasarana

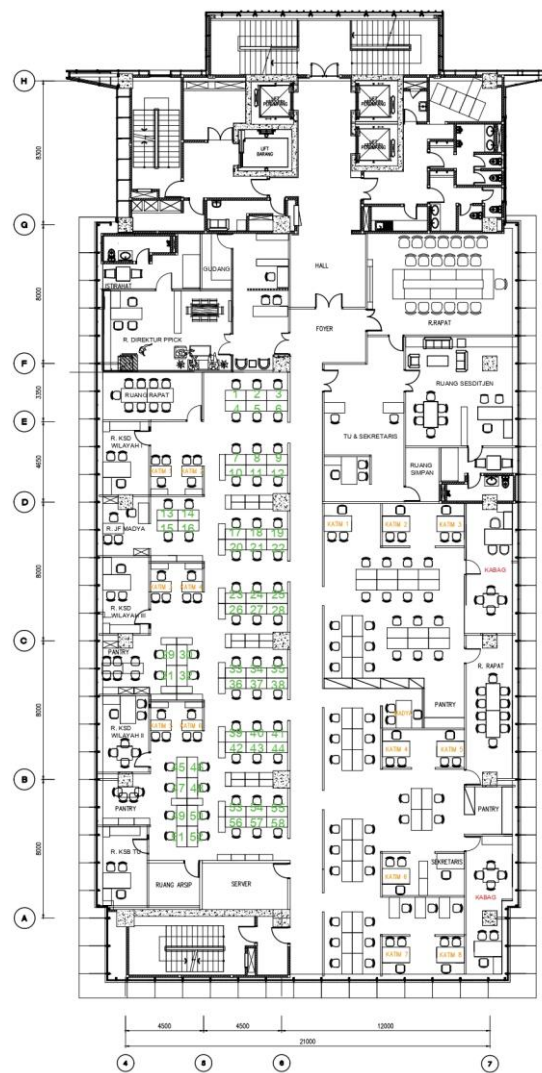
Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus terencana. Direktorat PPICK telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik (*software*). Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) sarana dan prasarana Direktorat PPICK dapat dilihat pada Tabel I.9.

I.6.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Pada bulan Februari Tahun 2025, Direktorat PPICK yang semula berkantor di Gedung A2 lantai 3 wing 1 di jalan Raden Patah No.1 pindah berkantor di Gedung G lantai 5 Jalan Pattimura 20. Ruang Kerja Direktorat PPICK di Gedung G lantai 5 mencakup kapasitas untuk 63 (enam puluh tiga) pejabat dan pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Direktur
- 3 (tiga) Kepala Subdirektorat
- 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha
- 6 (enam) Ketua Tim Pokja
- 52 (lima puluh dua) Staf
- 2 (dua) Ruang Rapat dengan kapasitas 25 orang dan 10 orang
- 1 (satu) Ruang Arsip
- 2 (dua) *Pantry* beserta meja makan

Denah Ruang Direktorat PPICK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-11 Denah Ruangan Dit. PPICK

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Sesuai dengan inventarisasi terkini, tercatat sejumlah perangkat yang mendukung kegiatan di direktorat beserta kondisinya sebagai berikut:

1. Kursi besi/metal menempati posisi teratas dalam daftar ini, dengan total 61 unit, seluruhnya dalam kondisi baik.
2. Meja kerja kayu menempati posisi kedua dalam daftar ini, dengan total 54 unit berada dalam kondisi baik, menunjukkan keandalan dalam mendukung tugas-tugas harian.
3. Komputer PC berjumlah 33 unit, dengan 26 unit dalam kondisi baik dan 2 unit yang mengalami kerusakan ringan yang memerlukan penanganan yang baik agar dapat digunakan dengan maksimal.
4. Laptop berjumlah 17 unit, dengan 15 di antaranya dalam kondisi baik dan 2 unit yang mengalami kerusakan berat perlu segera ditangani.
5. Lemari penyimpanan dengan kondisi baik sebanyak 17 unit, memiliki peran yang penting dalam menyimpan dokumen pekerjaan atau berupa barang.

6. Lemari kayu sebanyak 7 unit, dalam kondisi baik dengan fungsinya yang sama dengan lemari penyimpanan.
7. Sofa ruang tunggu, berjumlah satu unit dengan kondisi baik, berfungsi sebagai tempat menunggu bagi tamu yang berkunjung ke Direktorat PPICK.
8. Kasur Direktur, dengan jumlah satu unit dengan kondisi baik dalam manajemen aset dan pemeliharaan rutin, yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi Direktur.
9. Meja rapat direktur, dengan jumlah satu unit dengan kondisi baik, digunakan oleh Direktur untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan pengambilan keputusan kedinasan.
10. Partisi ruang Direktur dengan jumlah tiga unit dengan seluruh kondisi baik, ini dapat membantu menciptakan tampilan ruang Direktur yang tertata dan *representative*.
11. Partisi ruang tunggu yang berjumlah satu unit dengan kondisi baik, yang berfungsi sebagai pembatas antara area ruang tunggu dan area kerja pegawai sehingga tercipta suasana tertib dan kenyamanan bagi tamu.
12. Televisi Direktur yang berjumlah satu unit dengan kondisi baik, yang berfungsi untuk menunjang kegiatan di ruang kerja Direktur seperti rapat, presentasi dan pemantauan media lainnya.
13. Lemari besi/metal yang berjumlah tiga unit dengan kondisi baik, ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan.
14. Meja ruang rapat lantai 5, yang berjumlah satu unit dengan kondisi baik, ini menunjukkan manajemen aset yang efektif karena sering digunakan untuk kegiatan rapat.
15. Rak besi berjumlah lima unit dengan semua kondisi baik, ini merupakan BMN yang penting karena berguna untuk menyimpan dokumen agar tidak tercecer atau hilang.
16. Meja makan yang dikategorikan ke dalam alat rumah tangga lainnya, terdapat empat unit dengan kondisi baik, ini berfungsi sebagai area khusus di Direktorat PPICK sebagai tempat istirahat untuk makan siang pegawai.
17. Peralatan *printer*, yang jumlahnya 17 unit, mayoritas dalam kondisi baik (16 unit). Ini menunjukkan keefektifan dalam manajemen aset dan pemeliharaan rutin. Terdapat satu unit mengalami kerusakan berat, dan ini memerlukan penanganan untuk menjaga efisiensi operasional secara keseluruhan.
18. *Scanner*, terdapat 2 unit dan memiliki peran yang tidak kalah penting. Dari dua unit yang ada, satu diantaranya berada dalam kondisi rusak ringan, sedangkan satu unit lainnya mengalami kerusakan berat. Ini menunjukkan sebuah area yang memerlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya *scanner* dalam digitalisasi dokumen dan pengarsipan data.
19. Kamera dan lensa berjumlah empat unit semuanya dalam kondisi baik. Ini mencerminkan manajemen aset yang efektif dalam menjaga peralatan yang mungkin tidak sering digunakan tapi memiliki peran penting dalam dokumentasi kegiatan Direktorat PPICK. Data sarana dan prasarana Direktorat PPICK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.9. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPICK

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer (PC)	33	26	2	5
2	Laptop	17	15	0	2
3	Printer	17	16	0	1
4	Scanner	2	0	1	1
5	Kamera & Lensa	4	4	0	0
6	Lemari Penyimpanan	17	17	0	0
7	Lemari Kayu	7	7	0	0
8	Sofa Ruang Tunggu	1	1	0	0
9	Sofa Ruang Tamu Direktur	3	3	0	0
10	Kursi Ruang Tunggu Direktur	2	2	0	0
11	Kasur Direktur	1	1	0	0
12	Meja Rapat Direktur	1	1	0	0
13	Partisi Ruang Direktur	3	3	0	0
14	Partisi Ruang Tunggu	1	1	0	0
15	Televisi Direktur	1	1	0	0
16	Kursi Besi/Metal	61	61	0	0
17	Lemari Besi/Metal	3	3	0	0
18	Meja Kerja Kayu	54	54	0	0
19	Meja Ruang Rapat Lt.5	1	1	0	0
20	Rak Besi	5	5	0	0
21	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	4	0	0

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Dengan sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia, pengadaan aset dilakukan secara bertahap sejak 2015 hingga 2023. Fokus utama pengembangan terletak pada tahun 2018 untuk penataan ruang pimpinan dan tahun 2023 untuk pembaruan fasilitas kerja pegawai (meja dan kursi) guna meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan tamu. Ada pun sarana dan prasarana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Furnitur dan Ruang Kerja Pegawai

- 2015: 17 unit lemari penyimpanan dokumen.
- 2018: 1 unit partisi pemisah ruang tunggu dan ruang kerja.

- 2023: Pengadaan skala besar berupa 61 kursi besi/metal dan 54 meja kerja kayu untuk produktivitas pegawai, serta 3 unit lemari besi dan 5 unit rak besi untuk kearsipan.

2. Fasilitas Ruang Direktur (Pimpinan)

- 2018: 3 unit sofa tamu dan 3 unit partisi ruangan agar lebih efisien.
- 2022: 1 unit televisi sebagai media rapat pimpinan.
- 2023: Peningkatan kenyamanan dan efektivitas kerja melalui pengadaan 1 unit kasur, 2 kursi tunggu ramah tamu, serta 1 meja rapat pimpinan.

3. Fasilitas Umum dan Operasional

- 2015: 1 unit meja makan sebagai area istirahat dan diskusi informal.
- 2018: 7 unit lemari kayu tambahan (dokumen) dan 1 unit sofa ruang tunggu tamu.
- 2023: Pengadaan meja rapat lantai 5 untuk mendukung kelancaran kegiatan koordinasi.

Kemudian, pengadaan aset BMN Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) paling signifikan terjadi pada periode 2021 dan 2025, yang mencerminkan respons terhadap rencana strategis dan kebutuhan operasional, yang mana pada tahun 2020 terdapat 10 pegawai CPNS dan pada tahun 2025 terdapat 12 pegawai CPNS. Berikut rincian per kategori:

- Komputer PC dan Laptop: Terjadi tren pembaruan rutin pada PC (2021 dan 2025) untuk menjaga kapasitas. Sementara itu, pengadaan laptop meningkat tajam pada 2025 (10 unit) guna mendukung mobilitas kerja staf.
- *Printer* dan *Scanner*: Pengadaan printer diakomodasi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 6 (enam) unit, sedangkan scanner sebanyak 2 (dua) unit.
- Kamera dan lensa: Fokus pengadaan terjadi pada 2020 untuk mendukung proyek dokumentasi khusus.

Analisis data tahun perolehan ini penting untuk memahami siklus hidup aset dan merencanakan penggantian atau pembaruan perangkat. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi anggaran yang efektif dan efisien untuk pemeliharaan dan pengadaan BMN. Dengan mempertimbangkan usia perangkat, Direktorat PPICK dapat menetapkan prioritas dalam alokasi dana, baik untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru, sehingga dapat memastikan bahwa peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi optimal. Data sarana dan prasarana Direktorat PPICK berdasarkan tahun perolehan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.10. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPICK Berdasarkan Tahun Perolehan

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Komputer (PC)	34	1	2	1	6	1	4	10	1	1	0	7	
2	Laptop	17	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	10	
3	Printer	17	3	2	2	6	1	3	0	0	0	0	0	
4	Scanner	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kamera dan Lensa	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
6	Lemari Penyimpanan	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Lemari Kayu	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sofa Ruang Tunggu	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	Sofa Ruang Tamu Direktur	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kursi Ruang Tunggu Direktur	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
11	Kasur Direktur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
12	Meja Rapat Direktur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
13	Partisi Ruang Direktur	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
14	Partisi Ruang Tunggu	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
15	Televisi Direktur	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
16	Kursi Besi/Metal	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
17	Lemari Besi/Metal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
18	Meja Kerja Kayu	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	
19	Meja Ruang Rapat Lt 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
20	Rak Besi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
21	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			27	5	4	27	2	11	10	3	131	1	17	

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK telah melakukan pengelolaan BMN dengan cukup baik. Contoh penggunaan perangkat kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



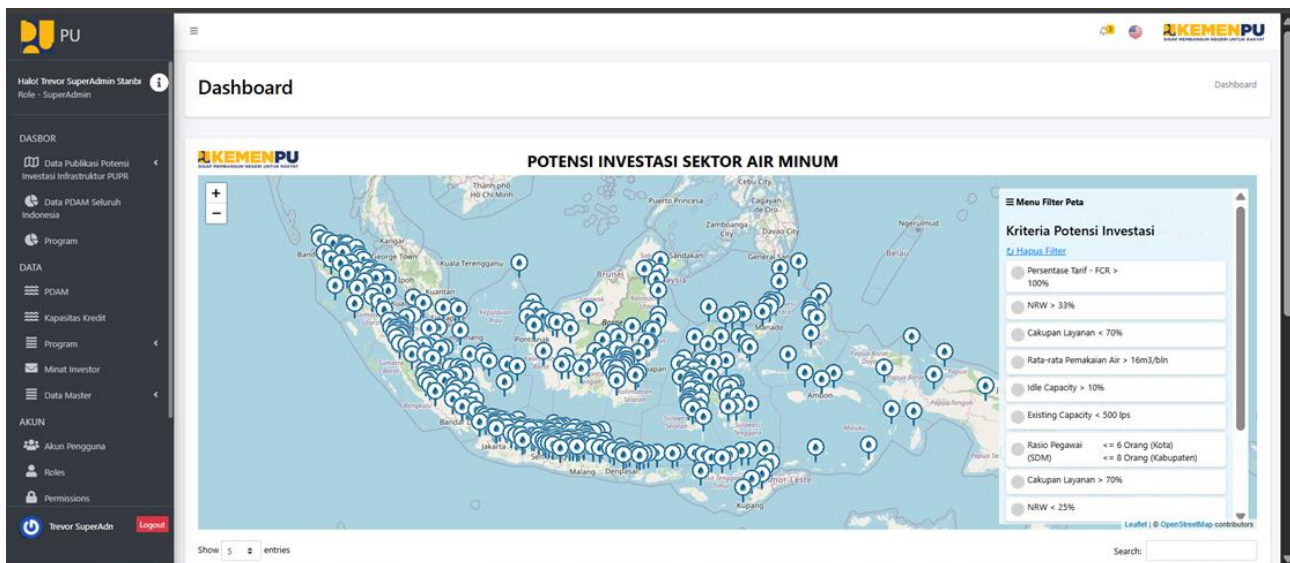
Gambar I-12 Metode Rapat Daring Memanfaatkan BMN Perangkat Kantor

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

I.6.2. Teknologi Informasi

Penerapan Teknologi Informasi merupakan fondasi utama dalam mendorong Transformasi Digital di lingkungan organisasi pemerintahan. Transformasi Digital tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan perangkat teknologi semata, tetapi sebagai upaya strategis untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap tata kelola, proses bisnis, serta budaya kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, penerapan Teknologi Informasi di Direktorat PPICK diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE menjadi kerangka kerja terpadu yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara digital. Melalui penerapan SPBE, berbagai layanan internal maupun eksternal dapat diselenggarakan secara lebih cepat, tepat, dan terukur, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan *real time*.



Gambar I-13. Halaman Dashboard Potensi Investasi Sektor Air Minum yang Dikembangkan oleh Direktorat PPICK

Sumber: dashboard potensi investasi sektor air minum PPICK, 2025

Bukti penerapan SPBE di Direktorat PPICK adalah penggunaan *Dashboard* Satu Data dan *Dashboard* Potensi Investasi Sektor Air Minum. Penggunaan *Dashboard* Satu Data membantu layanan internal dan eksternal melalui integrasi data proyek KPBUs sektor cipta karya ke dalam *Dashboard* Simpul KPBUs yang dikelola DJPI, sedangkan *Dashboard* Potensi Investasi Sektor Air Minum membantu layanan eksternal kepada investor yang berminat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum melalui skema KPBUs.

Implementasi SPBE di Direktorat PPICK berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang terintegrasi mampu meminimalkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan koordinasi lintas unit, serta memperkuat aspek transparansi dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional Transformasi Digital Pemerintah yang menekankan pada efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan peningkatan kepercayaan publik.

Komitmen Direktorat PPICK dalam penerapan SPBE dibuktikan dengan mengikuti penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 yang diadakan oleh Kementerian PU. Komponen penilaian terdiri dari 4 (empat) kriteria, yaitu kriteria organisasi, proses, data, dan teknologi. Kriteria organisasi terdiri dari tata kelola SPBE, anggaran, dan peningkatan kompetensi SDM. Kriteria proses terdiri dari penggunaan e-mail PU, *Workspace Microsoft 365*, TNDE, TTE, Aplikasi Bravo, dan pemanfaatan TIK. Kriteria Data terdiri dari tata kelola data dan distribusi/publikasi data atau informasi. Kriteria teknologi terdiri dari internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, aset TIK, inovasi, dan keamanan informasi.

Sebagai wujud komitmen dan konsistensi dalam penerapan Teknologi Informasi dan SPBE, pada tahun 2025 Direktorat PPICK berhasil meraih peringkat dua Penilaian Transformasi

Digital dalam Kategori Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penyerahan penghargaan atas capaian ini dilakukan pada Upacara peringatan Hari Bakti PU Ke-80 tanggal 3 Desember 2025 di Bandung yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I-14. Penyerahan Penghargaan Transformasi Digital Kategori Unit Kerja pada Upacara Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2025

Sumber: Dokumentasi Direktorat PSSPP

Capaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja dan inovasi yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan transformasi tata kelola digital yang berkelanjutan. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE serta memperkuat peran Teknologi Informasi sebagai pengungkit utama Transformasi Digital di Direktorat PPICK.

1.7 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPICK adalah sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mempengaruhi pola kerja dan pencapaian kinerja di tahun 2025.
2. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
3. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU yang belum maksimal;
4. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);
5. Kinerja dan keberlanjutan proyek KPBU masih belum optimal akibat tantangan tarif, daya beli, kepastian pendapatan, serta kinerja operator yang tidak efisien;
6. Belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
7. Belum adanya kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku untuk beberapa proyek KPBU SPAM dengan PJPK daerah yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPICK;

8. Belum tersedianya dokumen penyiapan SPAM sisi hilir untuk proyek KPBU SPAM regional dengan PJPK pusat dan PJPK daerah;
9. Fasilitasi KPBU bagi proyek dengan PJPK daerah belum optimal, baik dari sisi teknis, fiskal, maupun kelembagaan;
10. Kelembagaan, regulasi, dan kapasitas operator layanan sektor air minum, persampahan, dan air limbah yang belum optimal dalam mendukung pembiayaan inovatif.

I.8 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada sistematika yang tertuang dalam Pedoman Penulisan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan konteks penyelenggaraan serta struktur pendukung kinerja organisasi yang memuat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, penerapan *reward dan punishment*, sarana dan prasarana, isu strategis dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (Renstra) organisasi yang meliputi visi dan misi, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, Perjanjian Kinerja 2025, metode pengukuran dan target kinerja tahun pelaporan dalam pemenuhan target Renstra yang berisi revidi capaian target renstra dan target kinerja berdasarkan Renstra.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara terukur dan objektif yang memuat pengukuran capaian kinerja per indikator *output*, melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, target jangka menengah, target nasional, dan standar nasional, serta analisis realisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian, efektivitas, dan efisiensi kinerja organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum capaian kinerja utama dan tingkat keberhasilan organisasi, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang berisi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan suatu unit kerja didasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun secara sistematis. Penyusunan Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Renstra merupakan turunan dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan lima tahunan tersebut diuraikan ke dalam perencanaan kinerja melalui penetapan kegiatan tahunan beserta indikatornya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penetapan Perencanaan Kinerja ini adalah dasar pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPICK tahun 2025 mengacu pada Renstra DJPI, Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025 – 2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PPICK Tahun 2025.

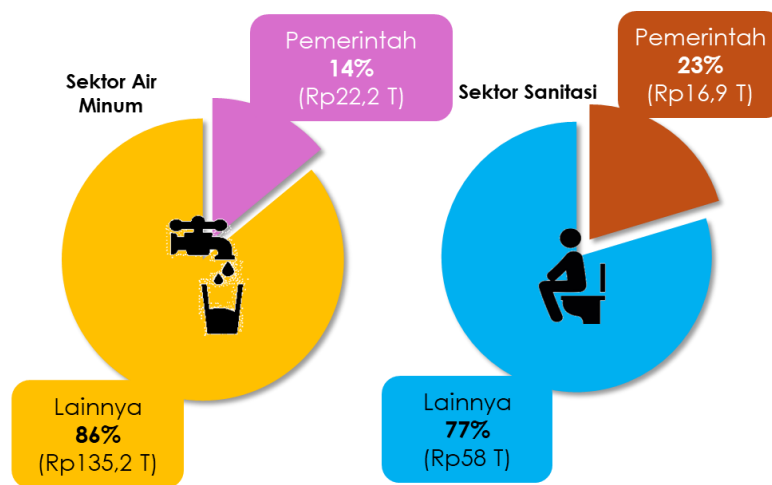
II.1. Rencana Strategis

Renstra Direktorat PPICK disusun dalam rangka perwujudan RPJMN Tahun 2025 – 2029, Permen PU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029, dan Renstra DJPI Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat PPICK yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor air minum, sanitasi, dan persampahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya skema pembiayaan yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Target pembangunan sektor ini telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang sejalan dengan komitmen global dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Untuk sektor air minum dan sanitasi, Indonesia menetapkan visi untuk mencapai 100% akses terhadap air minum yang aman dan 70% akses terhadap sanitasi yang aman pada tahun 2045. Dalam jangka menengah, RPJMN 2025-2029 menargetkan peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum aman sebesar 43%, akses terhadap sanitasi layak sebesar 40,2%, serta penurunan praktik buang air besar sembarangan hingga 30%.

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029, estimasi total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target air minum adalah sebesar Rp157,2 Triliun, dengan 14% (Rp22,2 T) ditargetkan dipenuhi melalui dana pemerintah, dan sisanya yaitu sebesar 86% (Rp135,2 T) direncanakan dipenuhi melalui pembiayaan inovatif. Untuk sektor sanitasi, diperlukan dana sebesar Rp74,9 T yang direncanakan dipenuhi oleh pemerintah sebesar Rp16,9 T (23%) sehingga menyisakan selisih pendanaan sebesar Rp58 T (77%) yang harus dipenuhi dari pembiayaan inovatif.

Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk penyediaan Infrastruktur di tengah keterbatasan APBN Kemen PU menyebabkan *funding gap* dan membutuhkan alternatif solusi pemenuhan pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, telah diatur bahwa jenis Infrastruktur sektor permukiman yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan. Ada pun persentase kebutuhan sebagaimana penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II-1. Indikasi Pendanaan *Major Project* 2025 – 2029

Sumber: Olahan Dit. PPICK berdasarkan data RPJMN 2025-2029

Potensi di sektor pembiayaan infrastruktur cipta karya tidak lepas dari berbagai tantangan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemenuhan akses layanan air minum yang layak perlu didukung dengan peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang sehat. Berdasarkan data buku kinerja PDAM 2024, masih terdapat BUMD Air Minum yang memiliki kinerja belum optimal yang ditunjukkan dengan data bahwa sebanyak 66% BUMD Air Minum dinilai memiliki kinerja sehat dan hanya 46,5% BUMD Air Minum yang telah menerapkan tarif air minum *Full Cost Recovery (FCR)*. Begitu pula pada sektor persampahan dan air limbah, kesiapan kelembagaan menjadi salah satu faktor yang perlu diperbaiki dan disiapkan.

II.1.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian PU yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas Melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan”, dijabarkan dengan Sasaran Utama yang dikenal dengan ‘608’. Program ini memiliki tiga sasaran utama: efisiensi investasi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8% per tahun. Pencapaian sasaran '608' ini akan menjadi kontribusi nyata Kementerian PU dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan sumber daya air nasional
2. Membangun infrastruktur konektivitas yang berkualitas dan terintegrasi
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar keciptakarya yang berkualitas
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional
5. Meningkatkan kapasitas SDM bidang konstruksi dan infrastruktur
6. Mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel
7. Mewujudkan infrastruktru PU Perkotaan yang Berkelanjutan

II.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Direktorat PPICK sebagaimana dalam Renstra Direktorat PPICK 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat proses dan memperkuat tata kelola proyek KPBU bidang cipta karya
- b. Memperkuat kelembagaan dan SDM di Pusat dan Daerah
- c. Menerapkan perencanaan proyek KPBU infrastruktur cipta karya yang terintegrasi dari sistem hulu hingga hilir

Dalam menjalankan arah kebijakan tersebut, diperlukan beberapa strategi dalam penentuan kebijakan pembiayaan infrastruktur cipta karya, yaitu:

- a. Menyusun dan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pembiayaan bidang cipta karya yang tertib dan terukur.
- b. Menyusun pedoman bersama yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*.
- c. Menyusun daftar proyek potensial KPBU dan Pembiayaan Inovatif Lainnya untuk bidang cipta karya.
- d. Meningkatkan partisipasi *multi-stakeholder* dalam pembiayaan infrastruktur cipta karya secara inklusif mulai dari tahap perencanaan proyek sampai dengan tahap manajemen proyek.
- e. Memperluas penerapan skema pembiayaan inovatif bidang cipta karya termasuk *blended finance*, KPBU, CSR, Ziswaf, dan pembiayaan inovatif lainnya.
- f. Mengembangkan transformasi pembiayaan inovatif penyelenggaraan infrastruktur air minum dan sanitasi.
- g. Menentukan skala prioritas pemberian fasilitasi untuk proyek KPBU PJPk daerah yang difasilitasi oleh Dit. PPICK.
- h. Memanfaatkan transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi untuk pengembangan data pembiayaan infrastruktur cipta karya.

- i. Mendukung PJPK daerah dan operator bidang cipta karya dalam menerapkan skema pembiayaan inovatif untuk proyek infrastruktur bidang cipta karya.
- j. Melakukan penguatan perencanaan proyek pembiayaan inovatif sektor Cipta Karya yang terintegrasi sejak tahap awal, penyiapan studi yang komprehensif dan berbasis kebutuhan layanan.
- k. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
- l. Memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KPBU sektor cipta karya.
- m. Menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dalam proyek KPBU bidang cipta karya.

II.1.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki 1 (satu) Program yaitu Program Dukungan Manajemen. Program tersebut merupakan program yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis Kementerian PU. Sasaran Strategis tersebut diturunkan menjadi Sasaran Program DJPI yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya.

Menindaklanjuti sasaran program tersebut, Direktorat PPICK melaksanakan Sasaran Kegiatan 01 (SK01) yaitu Meningkatnya layanan dukungan manajemen dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK, dan Sasaran Kegiatan 03 (SK03) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas dengan IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya serta IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan.

II.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai jaminan atas target yang diharapkan, para pihak dalam sistem akuntabilitas harus menandatangani pernyataan komitmen atau sebuah Perjanjian Kinerja (PK). PK adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam PK terdapat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Direktur PPICK telah menandatangani dokumen PK / kontrak kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan pagu awal anggaran Rp7.000.000.000 pada bulan Januari 2025.

II.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

PK Awal yang diterbitkan pada bulan Januari 2025 masih mengacu pada Renstra Dit. PPICK 2020-2024, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas dengan IKK Tingkat

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya. Besaran pagu awal Direktorat PPICK sesuai PK awal adalah sebesar Rp7.000.000.000 dengan rincian PK Awal dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPICK Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%
Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp7.000.000.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (Januari 2025)

II.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kali revisi PK sehingga menghasilkan PK Akhir yang diterbitkan pada 24 Desember 2025. Berdasarkan PK Akhir yang mengacu pada Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025-2029, terdapat dua sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)” dengan IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya serta sasaran kegiatan “Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas” dengan IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dan IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan. Besaran pagu sesuai PK Akhir yaitu Rp5.676.176.000, dengan rincian PK Akhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Akhir Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp596.357.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp5.079.819.000

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (24 Desember 2025)

II.2.3. Kronologi Perubahan PK

Sepanjang tahun 2025, dokumen PK Direktorat PPICK telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Juni, Agustus, September, dan Desember. Perubahan terjadi pada alokasi anggaran seiring dengan adanya revisi DIPA dan pada indikator kinerja sesuai dengan terbitnya Renstra tahun 2025-2029. Rincian dokumen PK revisi dan kronologis perubahan PK dapat dilihat pada Tabel II.3, II.4, II.5, II.6, dan II.7 berikut.

Tabel II.3. Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	Satuan	PK Awal	PK Revisi-1	PK Revisi-2	PK Revisi-3	PK Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)						
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)						
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	-	-	-	72,50	72,50
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif						

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	Satuan	PK Awal	PK Revisi-1	PK Revisi-2	PK Revisi-3	PK Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas						
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	30	30	30	100	100
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Proyek	-	-	-	1	1
Kegiatan						
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp (Ribu)	-	-	-	Rp659.667	Rp596.357
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp (Ribu)	Rp7.000.000	Rp6.288.787	Rp6.249.713	Rp5.590.046	Rp5.079.819

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Tabel II.4. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Juni Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%
Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp6.288.787.000

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (Juni 2025)

Tabel II.5. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Agustus Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%
Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp6.249.713.000

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (Agustus 2025)

Tabel II.6. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK September Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp659.667.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp5.590.046.000

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (September 2025)

Tabel II.7. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Akhir Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp596.357.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp5.079.819.000

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 (24 Desember 2025)

II.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran merupakan cara untuk mengidentifikasi besaran suatu capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat terhadap target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tingkat kinerja Direktorat sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan mutu kinerja ke depan. Metode pengukuran yang digunakan oleh Direktorat PPICK yaitu berdasarkan Manual Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra Tahun 2025 – 2029 Direktorat PPICK. Uraian metode perhitungan dapat dilihat pada Tabel II.8.

Tabel II.8. Indikator Kinerja Direktorat PPICK dan Cara Perhitungan Tahun 2025

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Jenis Indikator (4)	Metode Perhitungan (5)
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK (%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) Nilai AKIP (20%). Transformasi Digital Unit Kerja (20%) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%).	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya (%)	Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya (100%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)
3		Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan (Proyek)	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Indikator: Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan

Sumber: Renstra Direktorat PPICK TA 2025 – 2029

II.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran kegiatan sesuai Renstra, Direktorat PPICK merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Renstra Direktorat PPICK TA 2025 – 2029 serta Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan.

II.4.1. Reviu Capaian Target Renstra

Ringkasan capaian target pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.9. Target Kinerja Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Output		
			Satuan	2025	
				Target Renstra	Realisasi
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)					
Indikator Kegiatan:			%	72,50	79,51
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya					
Layanan Perkantoran			Layanan	1	1
IKP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas					
Indikator Kegiatan:			%	100,00	104,00
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya					
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	3	3
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	2
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	2
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	-
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Dokumen	2	2
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	2	2
Indikator Kegiatan			Proyek	1	1

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output		
			Satuan	2025	
				Target Renstra	Realisasi
		Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan			
1		Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	1
	1	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	1	1

Sumber: Renstra Direktorat PPICK TA 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas, seluruh target renstra dapat terealisasi sesuai dengan rencana, dengan satu *output* yang mengalami perubahan target pada tahun berjalan yaitu “Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”. Perubahan *output* ini dikarenakan pada tahun berjalan tidak terdapat proyek KPBU yang dapat difasilitasi pada kegiatan tersebut, sehingga alokasi anggaran pada kegiatan dukungan tersebut dialihkan pada kegiatan Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman.

II.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Renstra

Target kinerja pada Sasaran Kegiatan di dalam Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada Tabel II.10 di bawah ini.

Tabel II.10. Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen 2025—2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	SK 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	IKK 5. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	-	72,50	72,50	72,51	72,52	72,53
2.	SK 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	IKK 3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	-	100	100	100	100	100
3.		IKK 5. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)	8	9	11	11	12	13
4.		IKK 6. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)	0	0	0	1	1	2

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPICK – DJPI TA 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
5.		IKK 7. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Proyek	0	0	0	0	1	0

Sumber: Renstra Direktorat PPICK 2025-2029, 2025

Sandingan target kinerja yang tercantum pada Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.11. Sandingan Target Kinerja Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Renstra	PK
1.	SK 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	IKK 5. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	72,50	72,50
2.	SK 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	IKK 3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%	100	100
3.		IKK 5. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)	9	9
4.		IKK 6. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)	0	0
5.		IKK 7. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Proyek	0	0

Sumber: Dit. PPICK, 2025

Sandingan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian target antara dokumen Renstra Dit. PPICK 2025-2029 dengan PK tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini membahas secara rinci mengenai akuntabilitas kinerja Direktorat PPICK pada Tahun Anggaran 2025. Akuntabilitas kinerja menjadi fokus utama dalam mengevaluasi sejauh mana Direktorat PPICK dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Dalam menghadapi dinamika pembangunan infrastruktur permukiman, akuntabilitas menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Bab ini tidak hanya memberikan gambaran holistik mengenai pencapaian kinerja, tetapi juga akan merinci capaian spesifik Direktorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut.

III.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

III.1.1. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah entitas tertinggi yang bertanggung jawab mengevaluasi implementasi AKIP di Kementerian PUPR. Khusus untuk unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja, Itjen akan mendelegasikan tugas tersebut kepada ASN pada unit organisasi internal terkait, dengan syarat telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis AKIP atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan AKIP.



Gambar III-1. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon II DJPI TA 2024

Sumber: Dokumentasi DJPI , 2024

Untuk evaluasi implementasi AKIP TA 2024, Tim Penyelenggara AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bertindak sebagai evaluator AKIP dan Direktorat PPICK sebagai evaluatan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP TA 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, tujuan evaluasi implementasi AKIP Direktorat PPICK adalah untuk: (1) Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP; (2) Menilai tingkat implementasi AKIP; (3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; (4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran V Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, reviu laporan kinerja merupakan bagian dari evaluasi AKIP, bertujuan untuk membantu penyelenggaraan AKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Hal-hal yang turut menjadi ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi: (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

III.1.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi implementasi AKIP terhadap beberapa komponen masing-masing memiliki bobot penilaian. Tabel di bawah ini menguraikan komponen-komponen tersebut menurut Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 dan berlaku untuk penilaian pada tahun 2023. Berdasarkan penilaian evaluator, implementasi AKIP Direktorat PPICK Tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 86,40% (predikat A - memuaskan). Nilai tersebut meningkat 2,40% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP pada tahun sebelumnya dengan nilai 84,00%.

Tabel penilaian evaluasi AKIP Direktorat PPICK tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,60%
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,60%
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,20%
4	Evaluasi Internal	25%	21,00%
TOTAL		100%	86,40%

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Dit. PPIP, 2025

Tabel III.2. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,60%
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,30%
4	Evaluasi Internal	25%	21,00%
TOTAL		100%	84,00%

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Dit. PPIP, 2024

Pada tahun 2020, Direktorat PPICK memperoleh total penilaian AKIP sebesar 77,43%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,82%, Pengukuran Kinerja 19,87%, Pelaporan Kinerja 11,84%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja memainkan peran penting dalam menyusun landasan kinerja organisasi, sedangkan Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat melakukan introspeksi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, terlihat adanya peningkatan total penilaian AKIP menjadi 79,58%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai 26,04%, Pengukuran Kinerja 19,02%, Pelaporan Kinerja 13,62%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Direktorat PPICK dalam memperbaiki kualitas kinerjanya dan terus mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur permukiman.

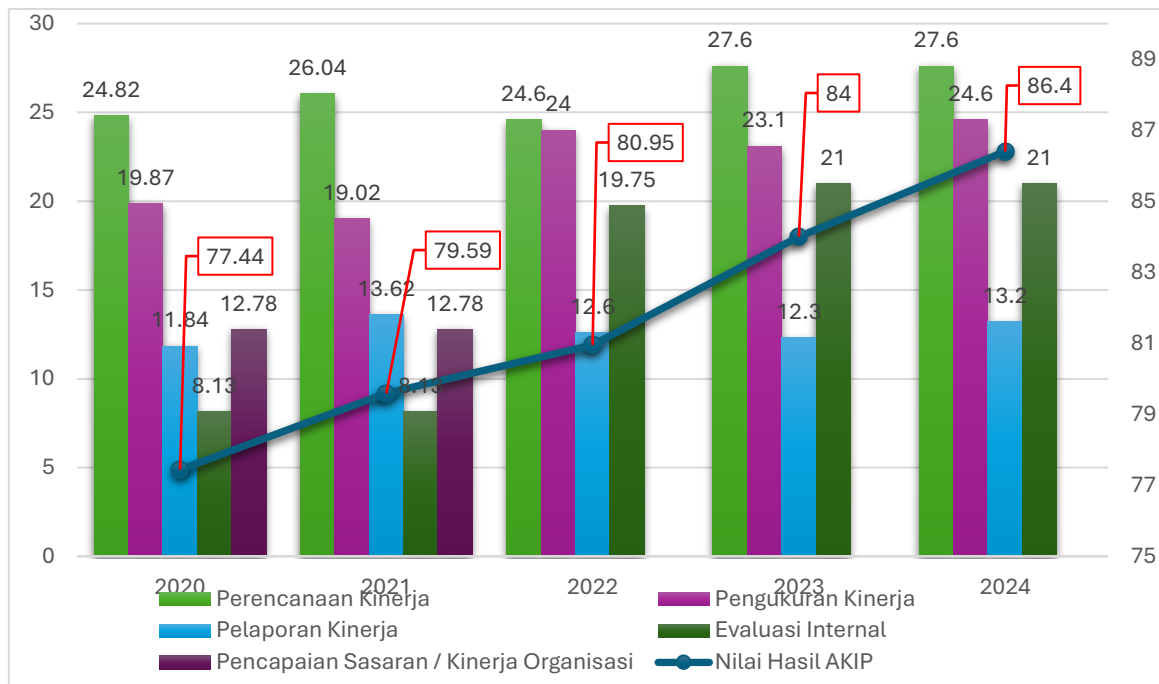
Tahun 2022 mencatat total penilaian AKIP Direktorat PPICK sebesar 80,96%, menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,6%, Pengukuran Kinerja 24,00%, Pelaporan Kinerja 12,6%, dan Evaluasi Internal 19,75%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK semakin matang dalam melaksanakan evaluasi internal dan mencapai target kinerjanya.

Selama ketiga tahun tersebut, Direktorat PPICK terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dengan fokus pada semua aspek yang dinilai dalam AKIP. Peningkatan yang konsisten pada setiap komponen menunjukkan keseriusan organisasi dalam meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Tantangan dan evaluasi internal juga menjadi kunci dalam proses peningkatan kinerja ini.

Pada tahun 2023, Direktorat PPICK mencatat peningkatan total penilaian AKIP menjadi 84%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pengelolaan infrastruktur permukiman. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK telah berhasil memperkuat proses perencanaan dan pengukuran kinerja, yang merupakan landasan penting dalam mencapai target organisasi. Evaluasi internal yang lebih matang juga berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang meningkat menunjukkan bahwa Direktorat PPICK semakin efektif dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

Pada tahun 2024, hasil dari evaluasi AKIP Direktorat PPICK mengalami peningkatan sebesar 2,40% apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan tersebut salah satunya terkait komponen pelaporan kinerja, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK terus memperbaiki dan meningkatkan proses pelaporan kinerja pada tahun 2024. Melalui perolehan nilai total AKIP yang positif, Direktorat PPICK membuktikan dedikasinya dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur permukiman. Periode evaluasi ini memberikan dasar yang kuat untuk terus mengoptimalkan kinerja organisasi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.



Gambar III-2. Penilaian Implementasi AKIP di Direktorat PPICK Periode Tahun 2020 – 2024

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Berdasarkan evaluasi AKIP TA 2024, terdapat beberapa catatan rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti pada 3 (tiga) komponen penilaian, antara lain pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sementara perencanaan kinerja tidak ada catatan rekomendasi dari evaluator. Hasil evaluasi AKIP TA 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3. Rekomendasi Evaluator atas AKIP Direktorat PPICK TA 2024

No.	Komponen/ Sub Komponen	Permasalahan/Rekomendasi
1. Perencanaan Kinerja		
a.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	-
b.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	-
2. Pengukuran Kinerja		
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<u>Permasalahan:</u> Belum melakukan rapat pembahasan pemantauan yang dilakukan secara berkala setiap bulannya (sesuai dengan penyusunan laporan monev bulanan berdasarkan Permen PUPR 9/2018 dan rekomendasi Itjen pada LHE DJPI) <u>Rekomendasi:</u> Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan pemantauan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	<u>Permasalahan:</u> Pembahasan terkait capaian kinerja dilakukan berkala setiap triwulan, belum terdapat pembahasan setiap bulan. Dalam laporan monev bulanan telah disampaikan perubahan pada revisi DIPA namun tidak dibahas lebih lanjut. <u>Rekomendasi:</u> Melakukan penyampaian terkait penjelasan dari adanya perubahan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada laporan monitoring dan evaluasi bulanan.
3. Pelaporan Kinerja		
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<u>Permasalahan:</u> Laporan monev kinerja bulanan telah <i>upload</i> di e-AKIP namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan

No.	Komponen/ Sub Komponen	Permasalahan/Rekomendasi
		selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. <u>Rekomendasi:</u> Memperhatikan batas waktu penyampaian laporan monitoring dan evaluasi berkala dan laporan kinerja kepada entitas di atasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	-
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	<u>Permasalahan:</u> Terdapat tim evaluator yang belum memiliki sertifikat berdasarkan Surat Tugas Dirjen Nomor 18.5/SPT/Dp/2025 <u>Rekomendasi:</u> Semua yang masuk dalam Tim Evaluator Internal dalam surat tugas harus memiliki sertifikat sesuai standar minimal Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 dan SE Irjen Nomor 2 Tahun 2023.
c.	Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internai sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	<u>Permasalahan:</u> Terdapat rekomendasi LHE tahun 2023 dan 2022 yang belum selesai untuk ditindaklanjuti terkait penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan yang sesuai dengan permen PUPR 9/2018. Belum terdapat persentase nilai efisiensi dalam laporan kinerja tahun 2023. <u>Rekomendasi:</u> Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Unor dan Unker tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja. Menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja.

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Direktorat PPIP TA 2024, 2025

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki oleh Direktorat PPICK yaitu sebagai berikut:

1. Pada Perencanaan Kinerja tidak terdapat permasalahan, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, termasuk pencapaian hasil dengan ukuran kinerja *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat PPICK telah berhasil menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Hal ini akan memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa masalah dalam komponen ini, termasuk keterlambatan dalam mengunggah laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-AKIP dikarenakan adanya transisi struktur organisasi baru, sehingga perlu peningkatan kedisiplinan dalam mengunggah dokumen laporan yang tepat waktu pada tahun mendatang.
3. Meskipun dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Laporan monitoring kinerja bulanan telah diunggah di e-AKIP, namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Rekomendasinya adalah menyusun dan memublikasikan laporan monitoring bulanan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan AKIP di Kementerian PUPR. Selain itu, laporan kinerja telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas sehingga perlu dilakukan pencantuman tanggal legalitas pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Secara keseluruhan, evaluasi AKIP ini menekankan pentingnya peningkatan disiplin, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang lebih analitis dan komparatif dalam pelaksanaan tugas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, serta memastikan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

III.1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi AKIP TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

Direktorat PPICK telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar 25%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari serangkaian upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan

kinerja. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada Perencanaan Kinerja tidak terdapat permasalahan, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pencapaian targetnya. Menindaklanjuti evaluasi tersebut, Direktorat PPICK telah berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar perencanaan kinerja yang telah dicapai pada penyusunan Renstra Dit. PPICK Tahun 2025-2029.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP TA 2024 terkait dengan Pengukuran Kinerja, Direktorat PPICK telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil kerjanya. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan permasalahan keterlambatan dalam mengunggah laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-AKIP, Direktorat PPICK telah meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan laporan dan pengunggahan laporan ke dalam e-AKIP. Pada tahun 2025, telah dilakukan usaha yang lebih terstruktur dan disiplin dalam menyusun dan mengirim laporan kinerja bulanan. Meskipun ada perbaikan yang signifikan, masih terdapat beberapa periode yang mana terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyusunan laporan.

Pembahasan capaian kinerja Direktorat PPICK telah dilaksanakan setiap bulan pada rapat pemantauan capaian kinerja bulanan dan telah dicantumkan dalam laporan monitoring bulanan sejak Maret 2025. Langkah ini merupakan



Gambar III-3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU TA 2024

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di Direktorat PPICK. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan. Dengan meningkatkan disiplin dalam penyusunan dan pengumpulan laporan, serta menerapkan sistem *reward*

dan *punishment* yang berbasis pada kinerja, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan lebih efektif.

3. Pelaporan Kinerja

Direktorat PPICK telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah laporan monev kinerja bulanan yang telah diunggah di e-AKIP tidak memenuhi kriteria penyusunan dan penyampaian selambat-lambatnya lima hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Sebagai tindak lanjut, Direktorat PPICK telah berupaya disiplin dalam mengunggah laporan monev bulanan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan AKIP di Kementerian PUPR. Ada pun rincian penyampaian laporan bulanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Laporan bulan Januari disampaikan pada 7 Februari 2025
- Laporan bulan Februari disampaikan pada 7 Maret 2025
- Laporan bulan Maret disampaikan pada 17 April 2025
- Laporan bulan April disampaikan pada 8 Mei 2025
- Laporan bulan Mei disampaikan pada 16 Juni 2025
- Laporan bulan Juni disampaikan pada 7 Juli 2025
- Laporan bulan Juli disampaikan pada 7 Agustus 2025
- Laporan bulan Agustus disampaikan pada 4 September 2025
- Laporan bulan September disampaikan pada 6 Oktober 2025
- Laporan bulan Oktober disampaikan pada 7 November 2025
- Laporan bulan November disampaikan pada 5 Desember 2025
- Laporan bulan Desember disampaikan pada 8 Januari 2026

Meskipun perbaikan telah dilakukan secara signifikan, masih terdapat beberapa periode yang terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyusunan laporan.

Dengan upaya-upaya ini, Direktorat PPICK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan serta publikasi laporan bulanan, sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan masih adanya tim evaluator yang belum memiliki sertifikat, Tim AKIP Direktorat PPICK telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diadakan oleh DJPI pada tanggal 18-25 Agustus 2025, dan akan memastikan seluruh anggota tim evaluator internal pada evaluasi berikutnya adalah

pegawai yang telah memiliki sertifikat yang memenuhi standar minimal Permen PUPR No. 9/2018 dan SE Irjen No. 2/2023.

Berdasarkan rekomendasi untuk mengoptimalkan tindak lanjut evaluasi AKIP, langkah konkret telah diambil. Direktorat PPICK telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2023 dan 2022 yaitu terkait kedisiplinan dalam mengunggah dokumen laporan monitoring bulanan, serta penyajian laporan monitoring bulanan yang sesuai dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 9/2018. Selain itu terkait dengan belum adanya perbandingan persentase antara efisiensi/efektivitas, Direktorat PPICK telah menyajikan perbandingan presentase antara efisiensi/efektivitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menanggapi rekomendasi evaluasi. Penggunaan teknologi informasi, pembahasan khusus untuk membahas rekomendasi, implementasi rekomendasi tersebut, dan penggunaan AKIP digital adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil. Hal ini tidak hanya menunjukkan progres dalam menangani masalah spesifik yang diidentifikasi, tetapi juga komitmen organisasi dalam meningkatkan standar dan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara keseluruhan. Ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa organisasi tidak hanya responsif terhadap umpan balik, tetapi juga proaktif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

III.2. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengelola sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan dengan regulasi yang berlaku. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif akan menjadi katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Hal ini membutuhkan pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan. Capaian kinerja Direktorat PPICK tahun 2025 diterjemahkan ke dalam perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja. Hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.4. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%	79,51%	109,67%
IKP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%	104,00%	104,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33%

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Kinerja IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK dengan realisasi 79,51% dari target sebesar 72,50%. Dengan hasil tersebut, maka capaian kinerja mencapai 109,67%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor ketercapaian nilai Kearsipan, AKIP, Transformasi Digital, dan Manajemen Risiko dengan rata-rata diatas 80, selain itu adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif pada kegiatan operasional turut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK.

Kinerja IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dengan realisasi 104,00% dari target 100%. Dengan hasil tersebut, maka capaian kinerja mencapai 104,00%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan tata kelola fasilitasi kepada Pemda, perbaikan kualitas monitoring dan evaluasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Balikpapan, calon pemrakarsa, dan unor teknis terkait untuk mempercepat tahap evaluasi FS SPAM Balikpapan. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif realisasi keuangan pada RO Perencanaan, Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Prastudi Kelayakan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK.

Pada IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan, telah tercapai realisasi 1 proyek dari target 1 proyek. Dengan mempertimbangkan komponen anggaran dan kegiatan, maka capaian kinerja mencapai

103,33%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor koordinasi intensif dengan Perumda Kerta Bali Saguna selaku PJPK Proyek SPAM Regional Ayung dan unor teknis di Kementerian PU sehingga proyek SPAM Regional Ayung dapat memulai tahap persiapan transaksi pada TA 2025. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dan deviasi positif realisasi keuangan pada RO Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK. Perhitungan seluruh capaian tersebut didasarkan pada alokasi pagu efektif yang tersedia di tahun 2025.

Direktorat PPICK telah melaksanakan paket-paket kegiatan sepanjang tahun 2025 guna memenuhi target *output* yang telah direncanakan, meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
 - b) Identifikasi Rencana Pengembangan Program Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
 - c) Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- 2) Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, melalui kegiatan:
 - a) Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman
 - b) Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan
- 3) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan, melalui kegiatan Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman.
- 4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, melalui kegiatan:
 - a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II

Untuk mendukung target *output* tersebut, Direktorat PPICK juga dibekali dengan mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPICK. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja atas *output* dari pelaksanaan paket kegiatan selama tahun 2025.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output			
		Satuan	2025		
			Target	Realisasi	Deviasi
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)					
Indikator Kegiatan:		%	72,50	79,51	+7,01%
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output			
			Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Deviasi
IKP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas						
Indikator Kegiatan:			%	100,00	104,00	+4,00%
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya						
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	3	3	-
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	2	-
	1	Jumlah Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	2	-
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	-	-
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Dokumen	2	2	-
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	2	2	-
Indikator Kegiatan			Proyek	1	1	-
Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan						
1	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan		Kesepakatan	1	1	-
	1	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	1	1	-

Sumber: Renstra Direktorat PPICK Tahun 2025-2029 dan PK Direktorat PPICK TA 2025

Berdasarkan tabel di atas, seluruh target renstra dapat terealisasi sesuai dengan rencana, dengan satu output yang mengalami perubahan target pada tahun berjalan yaitu “Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”. Perubahan output ini dikarenakan pada tahun berjalan tidak terdapat proyek KPBU yang dapat difasilitasi pada kegiatan tersebut, sehingga alokasi anggaran pada kegiatan dukungan tersebut dialihkan pada kegiatan Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman, sehingga secara target total seluruh output kegiatan dapat tercapai.

Seluruh capaian kinerja IKK di Direktorat PPICK telah tercapai melebihi target, yaitu pada indikator Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, telah tercapai sebesar 79,51% dari target 72,50%, pada IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya telah terealisasi sebesar 104% dari target 100%, dan pada IKK Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan telah tercapai 1 proyek dari target 1 proyek. Target dan realisasi proyek sesuai lampiran PK ditunjukkan pada Tabel III.6. dan III.7. berikut ini.

Tabel III.6. Target dan Realisasi Komponen *Output* “Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Infrastruktur Permukiman”

No	Target Berdasarkan PK 2025	Realisasi
1	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)
Total	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Pada Januari 2025, Direktorat PPICK menetapkan sejumlah target berdasarkan PK 2025 pada indikator Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan yaitu SPAM Regional Ayung I. Selama berjalannya tahun anggaran telah dilakukan beberapa kegiatan koordinasi oleh Direktorat PPICK guna mendukung perkembangan proyek KPBU SPAM Regional Ayung I ke tahap berikutnya sehingga dapat terealisasi sebagai capaian dengan nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000.000.

Tabel III.7. Target dan Realisasi Komponen *Output* “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Target PK 2025	Realisasi
1	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)
Total	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dit. PPICK tahun 2025 adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel III.5. Nilai tersebut dihitung dengan mempertimbangkan ketercapaian *output* dari masing-masing indikator target. Penghitungan nilai capaian kinerja lebih detail ditunjukkan pada Tabel III.8 di bawah ini.

Tabel III.8. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025

Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif														
IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK)														
SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			INDIKATOR			RINCIAN OUTPUT			REALISASI ANGGARAN	REALISASI FISIK	PENILAIAN		
	JENIS INDIKATOR	TARGET	REALISASI	JENIS INDIKATOR	BOBOT	REALISASI	RINCIAN OUTPUT	BOBOT	REALISASI			NILAI %	REALISASI NILAI	RENTANG NILAI
1	2	3	4=3x7	5	6	7=6x10	8	9	10=((11+12+13)/3)	11	12	13	14	15
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK)	72.50%	79.51%	Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20.00%	21.00%	Layanan Perkantoran	100.00%	105.00%	110.00%	100.00%			• Nilai 70 ≤ nilai ≤ 72,5% Kinerja 100% • Nilai 72,6 ≤ nilai ≤ 80% Kinerja 110% • Nilai 80,1 ≤ nilai ≤ 90% Kinerja 120% • Nilai 90,1 ≤ nilai ≤ 100% Kinerja 130%
				Nilai Pengawasan Kearsipan	20.00%	22.00%	Layanan Perkantoran	100.00%	110.00%	110.00%	100.00%	120.00%	85.92	
				Nilai SAKIP	20.00%	22.00%	Nilai SAKIP	100.00%	110.00%	110.00%	100.00%	120.00%	86.40	
				Nilai Transformasi Digital Unit Kerja	20.00%	22.67%	Nilai Transformasi Digital Unit Kerja	100.00%	113.33%	110.00%	100.00%	130.00%	97.00	
				Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	20.00%	22.00%	Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	100.00%	110.00%	110.00%	100.00%	120.00%	86.04	

IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Sektor Cipta Karya

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			INDIKATOR			RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN			REALISASI ANGGARAN	REALISASI FISIK	PENCAPAIAN PROYEK		
	JENIS INDIKATOR	TARGET	REALISASI	JENIS INDIKATOR	BOBOT	REALISASI	RINCIAN OUTPUT	BOBOT	REALISASI	KOMPONEN OUTPUT	BOBOT	REALISASI			PROYEK %	REALISASI	TARGET
1	2	3	4=3x7	5	6	7=6x10	8	9	10=9X13	11	12	13=((14+15)/2)	14	15	16	17	18
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	100.00%	104.00%	Perencanaan, Penganggaran, Identifikasi dan Pemantauan	40.00%	42.00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50.00%	52.50%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100.00%	105.0%	110.00%	100.00%	0.0	-	-
							Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	30.00%	31.50%	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	100.00%	105.0%	110.00%	100.00%	0.0	-	-
							Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20.00%	21.00%	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100.00%	105.0%	110.00%	100.00%	0.0	-	-
				Proyek KPBU pada tahap penyediaan	60.00%	62.00%	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100.00%	103.33%	Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100.00%	103.3%	110.00%	100.00%	100.00%	1	1
	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	100.00%	103.33%	Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	100.00%	103.33%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	100.00%	103.33%	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100.00%	103.3%	110.00%	100.00%	100.00%	1	1

Berdasarkan Tabel III.8. di atas, dapat dilihat bahwa Target capaian IKK Direktorat PPICK merupakan pembobotan nilai dengan persentase tertentu untuk setiap Jenis Indikator; Rincian *Output*; dan Komponen *Output*. Berikut tahap-tahap perhitungan *cascading* kinerja Direktorat PPICK sebagaimana Tabel III.8:

A. IKK Dukungan Manajemen

1) Realisasi komponen IKK **Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK** diperoleh dari:

- Indikator Layanan Kepegawaian = $20\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan Kepegawaian})/2)$
- Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan = $20\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Nilai Kearsipan})/3)$
- Indikator Nilai SAKIP = $20\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Nilai AKIP})/3)$
- Indikator Nilai Transformasi Digital Unit Kerja = $20\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Nilai Transformasi Digital})/3)$
- Indikator Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko = $20\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Nilai MR})/3)$

2) Kinerja anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi pagu efektif TA 2025 dengan rencana penarikan dana (RPD) prognosis triwulan IV dengan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

- Deviasi $-15\% \leq dv \leq -11\%$ Kinerja 90%
- Deviasi $-10\% \leq dv \leq -6\%$ Kinerja 95%
- Deviasi $-5\% \leq dv \leq 0\%$ Kinerja 100%
- Deviasi $+1\% \leq dv \leq +5\%$ Kinerja 105%
- Deviasi $+5\% \leq dv$ Kinerja 110%

3) Kinerja berdasarkan nilai dihitung dengan rentang sebagai berikut:

- Nilai $70 \leq \text{nilai} \leq 72,5\%$ Kinerja 100%
- Nilai $72,6 \leq \text{nilai} \leq 80\%$ Kinerja 110%
- Nilai $80,1 \leq \text{nilai} \leq 90\%$ Kinerja 120%
- Nilai $90,1\% \leq \text{nilai} \leq 100\%$ Kinerja 130%

B. IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi PPICK

1) Realisasi komponen IKK **Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi PPICK** diperoleh dari:

- Indikator Perencanaan, Penganggaran, Identifikasi dan Pemantauan = $40\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan})/2)$ pada Rincian Output Perencanaan dan Penganggaran, Rincian Output Identifikasi Proyek dan Rincian Output Pemantauan Evaluasi
- Indikator Proyek KPBU pada tahap penyiapan = $60\% \times ((\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Proyek})/3)$ pada Rincian Output Prastudi Kelayakan

- 2) Kinerja anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi pagu efektif TA 2025 dengan rencana penarikan dana (RPD) prognosis triwulan IV dengan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - Deviasi $-15\% \leq dv \leq -11\%$ Kinerja 90%
 - Deviasi $-10\% \leq dv \leq -6\%$ Kinerja 95%
 - Deviasi $-5\% \leq dv \leq 0\%$ Kinerja 100%
 - Deviasi $+1\% \leq dv \leq +5\%$ Kinerja 105%
 - Deviasi $+5\% \leq dv$ Kinerja 110%
- 3) Nilai capaian proyek pada tahap penyiapan sebesar 100% jika target tercapai

C. IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Air Minum yang Siap Dikerjasamakan

- 1) Realisasi Komponen IKK **Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Air Minum yang Siap Dikerjasamakan** diperoleh dari:
Indikator Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang siap dikerjasamakan = $(\text{Kinerja Anggaran} + \text{Kegiatan} + \text{Proyek})/3$
- 2) Kinerja anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi pagu efektif TA 2025 dengan rencana penarikan dana (RPD) prognosis triwulan IV dengan rentang nilai kinerja sebagai berikut:
 - Deviasi $-15\% \leq dv \leq -11\%$ Kinerja 90%
 - Deviasi $-10\% \leq dv \leq -6\%$ Kinerja 95%
 - Deviasi $-5\% \leq dv \leq 0\%$ Kinerja 100%
 - Deviasi $+1\% \leq dv \leq +5\%$ Kinerja 105%
 - Deviasi $+5\% \leq dv$ Kinerja 110%
- 3) Nilai capaian proyek pada tahap transaksi sebesar 100% jika target tercapai

III.2.1. Capaian Kinerja Per Indikator *Output*

Berikut adalah uraian capaian kinerja, untuk setiap indikator di masing-masing *output* kegiatan, berdasarkan IKK Direktorat PPICK Tahun 2025.

1. Komponen *Output*: Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Komponen *output* Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2025 ditargetkan menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi kebijakan. Target tersebut diupayakan melalui tiga paket kegiatan.

Paket kegiatan pertama, yaitu "Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dengan kode 7766.ABF.009.051.A memiliki pagu efektif sebesar Rp336.347.000. Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terperinci, mencakup program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat PPICK. Pengampu paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I.

Paket Kegiatan kedua yaitu “Penyusunan Profil *Pipeline* Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” dengan kode 7766.ABF.009.051.B memiliki pagu efektif sebesar Rp485.783.000. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan *profil pipeline* yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proyek-proyek bidang infrastruktur permukiman, implementasi zona integritas, sistem manajemen anti penyuapan dan penerapan manajemen risiko. Pengampu kegiatan ini adalah Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II dan Wilayah III.

Salah satu kegiatan yang dijalankan, yaitu menerapkan SPBE dalam aktivitas internal dan eksternal Direktorat PPICK. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan Dashboard Satu Data dan *Dashboard* Potensi Investasi Sektor Air Minum. Bentuk komitmen lainnya adalah keikutsertaan Direktorat PPICK dalam Transformasi Digital Tahun 2025 yang diadakan oleh Kementerian PU dengan menilai empat komponen kriteria yang terdiri dari kriteria organisasi, proses, data, dan teknologi. Hasil penilaian, Direktorat PPICK berhasil memperoleh peringkat kedua dalam kategori Unit Kerja di Kementerian PU.



Gambar III-4. Audit Eksternal dalam rangka resertifikasi SMAP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Direktorat PPICK telah melaksanakan Audit Surveillance SMAP ke-1 sebagai tindak lanjut atas keberhasilan perolehan Sertifikat

SMAP SNI ISO 37001:2016 pada tahun 2024, serta pada tahun 2025 Direktorat PPICK dinyatakan mampu mempertahankan kesesuaian penerapan SMAP dan direkomendasikan untuk melanjutkan Sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016.

Paket Kegiatan ketiga yaitu “Identifikasi Rencana Pengembangan Program Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” dengan kode 7766.ABF.009.052.A memiliki pagu efektif sebesar Rp467.984.000. Kegiatan ini berfokus pada identifikasi potensi proyek sektor cipta karya yang dapat ditindaklanjuti menggunakan skema pembiayaan

alternatif pada tahap berikutnya. Kegiatan identifikasi yang dilaksanakan berupa pembahasan terhadap potensi proyek bidang cipta karya yang terdapat di Ditjen Cipta Karya untuk dilihat potensinya apabila dilaksanakan menggunakan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU dan BtoB. Selain itu juga, potensi proyek tersebut akan masuk dalam daftar rencana umum proyek pembiayaan inovatif. Pengampu kegiatan ini adalah seluruh Subdirektorat.

Pada komponen *output* ini, telah tercapai realisasi sebanyak 3 rekomendasi kebijakan dari total target sebanyak 3 rekomendasi kebijakan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.9. Capaian Kinerja Komponen *Output* “Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdirektorat PPICK Wilayah I
2	Penyusunan Profil <i>Pipeline</i> Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdirektorat PPICK Wilayah II dan Wilayah III
3	Identifikasi Rencana Pengembangan Program Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdirektorat PPICK Wilayah I, II, III

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Salah satu contoh kegiatan dalam Paket Kegiatan Identifikasi Rencana Pengembangan Program Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu Identifikasi Potensi Proyek dalam Rencana Umum KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Cipta Karya.

Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi proyek infrastruktur sektor Cipta Karya yang berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema KPBU. Tujuannya adalah menghasilkan daftar potensi proyek KPBU yang dapat dicantumkan dalam Rencana Umum KPBU.



Gambar III-5. Identifikasi Potensi Proyek dalam Rencana Umum KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Cipta Karya

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

2. Komponen *Output*: Jumlah Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Komponen *output* Jumlah Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2025 ditargetkan menghasilkan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Target tersebut diupayakan melalui dua paket kegiatan.

Paket kegiatan pertama, yaitu "Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman" dengan kode 7766.ABF.011.053.A memiliki pagu efektif sebesar Rp601.970.000. Kegiatan ini difokuskan pada proses evaluasi dokumen prastudi kelayakan dan dokumen pendukung SPAM Kota Balikpapan. Pengampu kegiatan ini yaitu Subdirektorat PPICK Wilayah II.

Paket kegiatan kedua, yaitu "Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan" dengan kode 7766.ABF.011.053.B memiliki pagu efektif sebesar Rp939.661.000. Kegiatan ini fokus pada kajian model alternatif pembiayaan sektor persampahan dan air minum. Pengampu kegiatan ini, yaitu Subdirektorat PPICK Wilayah I dan III.

Pada komponen *output* ini, telah tercapai realisasi sesuai target sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan.



Gambar III-6. Kunjungan Lapangan ke Lokasi Sumber Air Baku Proyek KPBU SPAM Balikpapan Tahun 2025

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

Kegiatan Pertama, yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk proyek KPBU SPAM Kota Balikpapan. Rangkaian pekerjaan pada proyek KPBU SPAM Kota Balikpapan meliputi

evaluasi Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung, serta mengkaji aspek kelembagaan untuk pengalihan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari pusat ke daerah. Gambar III-6 merupakan dokumentasi kunjungan lapangan ke Kota Balikpapan.

Pada kegiatan Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan, dihasilkan rekomendasi kebijakan dengan menghasilkan Studi Model KPBU Sektor Air Minum dan Studi Model Pembiayaan Persampahan yang dapat diimplementasikan dalam pembiayaan infrastruktur bidang cipta karya. Rincian capaian pada output prastudi kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10. Capaian Kinerja Komponen *Output* “Jumlah Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdirektorat Wilayah II
2	Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdirektorat Wil I dan III

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

3. Komponen *Output*: Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan

Komponen *output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2025 ditargetkan menghasilkan 1 kesepakatan. Target tersebut diupayakan melalui satu paket kegiatan yaitu "Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman" dengan kode 7766.ABF.009.051.A memiliki pagu efektif sebesar Rp762.872.000. Kegiatan ini difokuskan pada proses penyiapan transaksi proyek KPBU SPAM Regional Ayung, Provinsi Bali dan pendampingan penyiapan transaksi proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra, Provinsi Jawa Barat. Pengampu kegiatan ini yaitu Subdirektorat PPICK Wilayah I dan Wilayah III.

Pada komponen *output* ini, telah tercapai realisasi sesuai target sebanyak 1 kesepakatan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk proyek KPBU SPAM Regional Ayung, Provinsi Bali. Rangkaian pekerjaan pada proyek ini meliputi koordinasi intensif dengan PJPK dan *stakeholder* terkait, kunjungan lapangan, asistensi persiapan transaksi, dan proses pengajuan fasilitasi dari PJPK kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU. Gambar di bawah merupakan pertemuan dengan *stakeholder* terkait untuk membahas SPAM Regional Ayung I.



Gambar III-7. Rapat Pembahasan SPAM Ayung 1 (Sarbagita)

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

Selain kegiatan tersebut, telah dilaksanakan pendampingan dalam penyiapan transaksi proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra di Provinsi Jawa Barat. Pendampingan ini difokuskan pada pemberian masukan terhadap pelaksanaan evaluasi dokumen Studi Kelayakan oleh PJPK, khususnya terhadap dokumen yang disampaikan kembali oleh calon pemrakarsa sebagai bagian dari proses pembaruan Studi Kelayakan sehubungan dengan adanya penyesuaian nilai investasi.

Tabel III.11. Capaian Kinerja Komponen *Output* “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	1	1	100%	Subdirektorat Wilayah I dan Wilayah III

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

4. Komponen *Output*: Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Komponen *output* Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2025 ditargetkan menghasilkan sebanyak 2 dokumen. Target tersebut diupayakan melalui dua paket kegiatan.

Paket kegiatan pertama, yaitu "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Paket I" dengan kode 7766.EBD.953.055.A memiliki pagu efektif sebesar Rp162.495.000. Kegiatan ini difokuskan pada proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek yang berada pada Wilayah II dan Wilayah III, dengan pengampu kegiatan ini yaitu Subdirektorat PPICK Wilayah II.

Paket kegiatan kedua yaitu "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Paket II" dengan kode 7766.EBD.953.055.B memiliki pagu efektif sebesar Rp137.256.000. Kegiatan ini difokuskan pada proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek yang berada pada Wilayah I dan Wilayah III, dengan pengampu kegiatan ini yaitu Subdirektorat PPICK Wilayah I dan Wilayah III.

Pada komponen *output* ini, telah tercapai realisasi sesuai target sebanyak 2 dokumen. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III.12. Capaian Kinerja Komponen *Output* “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Paket I	Dokumen	1	1	100%	Subdirektorat Wilayah II
2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Paket II	Dokumen	1	1	100%	Subdirektorat Wilayah I dan III

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

III.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Pada bab ini akan dibahas perspektif analitis yang mendalam tentang pencapaian dan tantangan Direktorat PPICK. Dengan membandingkan data tahunan, maka akan dapat dievaluasi perkembangan dan pertumbuhan Direktorat PPICK dari tahun ke tahun, menyoroti area-area peningkatan serta aspek-aspek yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sejalan dengan itu, perbandingan kinerja Direktorat PPICK terhadap target-target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi salah satu kunci dalam mengukur sejauh mana sinergi dan kontribusi Direktorat PPICK dalam mencapai tujuan nasional. Sementara itu, perbandingan dengan instansi sejenis, meskipun terbatas oleh keunikan fungsi dan peran masing-masing entitas, tetap memberikan wawasan berharga tentang posisi Direktorat PPICK dalam konteks lebih luas di antara lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang serupa.

III.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam menganalisis capaian kinerja Direktorat PPICK selama tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya perkembangan yang signifikan meskipun terdapat beberapa hambatan. Sasaran kegiatan Direktorat PPICK yang berfokus pada "Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan" telah menghasilkan perubahan yang menunjukkan upaya konstan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Perbandingan capaian *output* kinerja Direktorat PPICK pada tahun 2023, 2024, dan 2025 terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.13. Perbandingan Capaian *Output* Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2023, 2024, dan 2025

Sasaran Kegiatan		SK 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	SK 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
Indikator Kinerja Kegiatan		IKK 5. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	IKK 3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	IKK 5. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan
2023	Target	-	25,00%	-
	Realisasi	-	24,80%	-
	Kinerja	-	99,20%	-
2024	Target	-	25,00%	-
	Realisasi	-	25,42%	-
	Kinerja	-	101,68%	-
2025	Target	72,50%	100,00%	100,00%
	Realisasi	79,51%	104,00%	100,00%
	Kinerja	109,67%	104,00%	103,33%

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Berdasarkan capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel di atas, target capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 masih menggunakan Perjanjian Kinerja sesuai Renstra 2020-2024 dengan Sasaran Kegiatan (SK) “Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan”. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan realisasi kinerja sebesar 24,80% pada tahun 2023 dan 25,42% pada tahun 2024. Sementara itu, pada awal tahun 2025, indikator kinerja yang digunakan masih mengacu pada *draft* renstra. Akan tetapi terdapat perubahan seiring dengan diterbitkannya Renstra PPICK tahun 2025-2029.

Perubahan ini ditandai dengan diberlakukannya Perjanjian Kinerja baru, yang memuat sasaran dan indikator kinerja yang lebih relevan dengan mandat dan fokus strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Dalam Perjanjian Kinerja baru, Sasaran Kegiatan berubah menjadi “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur”. Indikator yang digunakan adalah Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK), dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,51%.

Selain itu, pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas”. Sasaran ini diukur melalui dua indikator, yaitu:

- Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya, dengan realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 104%, serta
- Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang siap dikerjasamakan, tercapai 1 proyek pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 103,33% yang mempertimbangkan komponen anggaran dan kegiatan dalam perhitungannya.

Dari sisi anggaran, penyerapan anggaran Direktorat PPICK tahun 2024 sebesar Rp10.621.960.953 (97,10%) dari total pagu sejumlah Rp10.939.520.000, sedangkan untuk tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp 4.285.552.145 (99,19%) dari total pagu efektif sebesar Rp4.320.477.000 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.14. Perbandingan Realisasi Anggaran Dit. PPICK

TA	Pagu	Realisasi	Persentase	Deviasi
2024	Rp10.939.520.000	Rp10.621.960.953	97,10%	-2,90%
2025	Rp4.320.477.000	Rp4.285.552.145	99,19%	-0,81%

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Dengan melihat perbandingan tersebut, persentase realisasi anggaran tahun 2025 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan walaupun pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi, pengelolaan anggaran dan kegiatan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

III.3.2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, terdapat target proyek pembiayaan kreatif sektor air minum yang siap dikerjasamakan hingga tahun 2029 yaitu sebanyak 5 (lima) proyek sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk tahun 2025, terdapat target 2 proyek pada lampiran RPJMN akan tetapi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran maka hanya 1 proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan yang berhasil direalisasikan yaitu SPAM Regional Ayung. Realisasi ini telah sesuai dengan target PK Direktur PPICK tahun 2025.

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK air minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2	9
KP 02.12.07 - Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1	5
KP 02.12.08 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	4
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	5
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	10	13
KP 02.12.08 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	2
KP 02.12.09 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	ha (kumulatif)	3.577 (2020-2024)	200	5.000
KP 02.12.09 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (kumulatif)	2,98 (2020-2024)	0,7	8,82
KP 02.12.09 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	31,5	41
KP 02.12.09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kab/kota (kumulatif)	32	32	43
KP 02.18.02 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)

Gambar III-8. Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029

Sumber: Lampiran III RPJMN 2025-2029

III.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (Benchmarking)

Dalam membandingkan kinerja antara Direktorat PPICK dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terdapat tantangan dalam melakukan perbandingan yang sifatnya *apple-to-apple*. Instansi-instansi ini, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memainkan peran penting dalam proses KPBU, namun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Kementerian Keuangan misalnya, memiliki peran strategis dalam implementasi skema pembiayaan inovatif. Salah satunya yaitu Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPI), dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah menyediakan skema dukungan pemerintah. Pada tahun 2024,

capaian kinerja Direktorat PDPPI khususnya terkait “Persentase pengembangan kebijakan dan kajian dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur” dari target 100% telah tercapai 100% sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel III.15. Walaupun tidak secara langsung terkait dengan indikator proyek, tetapi capaian tersebut dapat menggambarkan bahwa kebijakan dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan inovatif telah berjalan dengan baik. Sementara itu, Direktorat PPICK yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur cipta karya, memiliki target kinerja yang lebih terkait langsung dengan realisasi proyek KPBU yaitu “Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan”.

Dalam konteks lebih luas, perbandingan kinerja antara Direktorat PPICK dengan instansi lain dalam proses KPBU harus melihat pada kontribusi masing-masing instansi terhadap pencapaian tujuan keseluruhan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun setiap instansi memiliki fokus dan target kinerja yang berbeda, kontribusi keduanya bersifat komplementer dan saling mendukung.

Tabel III.15. Target Kinerja Direktorat PDPPI, Kementerian Keuangan Tahun 2025

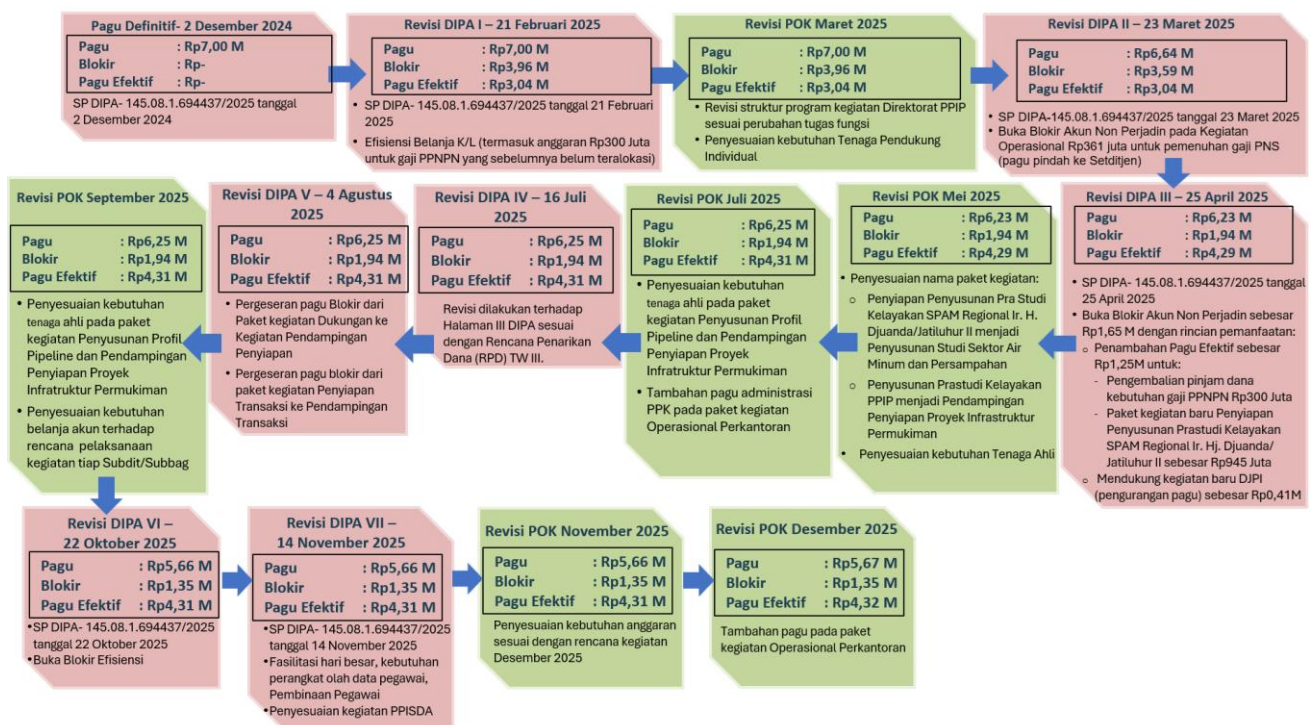
NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	GAP	INDEKS CAPAIAN
Internal Process Perspective (25%)					113,93%
6.	SS Perencanaan dan perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas				110%
6a-CP	Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan infrastruktur	100	120	20	120%
6b-N	Persentase pengembangan kebijakan dan kajian dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur	100%	100%	-	100%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDPPI, Kementerian Keuangan Tahun 2024

III.4. Analisis Realisasi Anggaran

III.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pada awal tahun anggaran, Pagu Definitif per 2 Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp7,00 miliar tanpa adanya blokir anggaran, sehingga seluruh pagu masih bersifat belum efektif. Penetapan ini dituangkan dalam SP DIPA Nomor 145.08.1.694437/2025 tanggal 2 Desember 2024. Selanjutnya, sepanjang tahun 2025 terdapat revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dan revisi perencanaan operasional kegiatan (POK) sebanyak 4 (empat) kali yang ditampilkan dalam gambar berikut.



Gambar III-9. Kronologis Revisi DIPA dan POK Dit. PPICK

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

Pada Revisi DIPA I tanggal 21 Februari 2025, dilakukan penyesuaian berupa blokir anggaran sebesar Rp3,96 miliar, sehingga pagu efektif menjadi Rp3,04 miliar. Blokir ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja K/L, termasuk penyesuaian alokasi anggaran sekitar Rp300 juta untuk gaji PPNN yang sebelumnya belum teralokasi secara memadai.

Pada Revisi POK Maret 2025, dilakukan revisi struktur program dan kegiatan Direktorat PPIP sebagai tindak lanjut perubahan tugas dan fungsi, serta penyesuaian kebutuhan tenaga pendukung individual. Revisi ini tidak mengubah total pagu, namun memengaruhi komposisi dan peruntukan anggaran kegiatan.

Pada Revisi DIPA II tanggal 23 Maret 2025, pagu mengalami penyesuaian menjadi Rp6,64 miliar dengan blokir Rp3,59 miliar, sehingga pagu efektif tetap Rp3,04 miliar. Pada tahap ini dilakukan pembukaan blokir akun nonperjalanan pada kegiatan operasional sebesar Rp361 juta untuk pemenuhan kebutuhan gaji PNS, dengan pergeseran pagu ke Setditjen.

Kemudian pada Revisi DIPA III tanggal 25 April 2025, pagu ditetapkan sebesar Rp6,23 miliar dengan blokir Rp1,94 miliar dan pagu efektif Rp4,29 miliar. Revisi ini mencakup pembukaan blokir akun nonperjalanan sebesar Rp1,65 miliar, dengan rincian pemanfaatan antara lain untuk pengembalian pinjaman dana kebutuhan gaji PPNPN sebesar Rp300 juta, dukungan paket kegiatan baru, serta pengurangan pagu sebesar Rp0,41 miliar untuk mendukung kegiatan DJPI.

Pada Revisi POK Mei 2025, dilakukan penyesuaian nomenklatur paket kegiatan, antara lain perubahan nama kegiatan menjadi Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan serta penyesuaian paket Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman, disertai penyesuaian kebutuhan tenaga ahli. Dampaknya, pagu tetap Rp6,23 miliar, blokir Rp1,94 miliar, dan pagu efektif Rp4,29 miliar.

Selanjutnya, Revisi POK bulan Juli 2025 dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga ahli pada paket Penyusunan Profil *Pipeline* dan Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman, serta penambahan pagu administrasi PPK pada paket operasional perkantoran. Pada tahap ini, pagu menjadi Rp6,25 miliar, blokir Rp1,94 miliar, dan pagu efektif meningkat menjadi Rp4,31 miliar.

Penyesuaian tersebut kemudian diformalkan dalam Revisi DIPA IV tanggal 16 Juli 2025 dan Revisi DIPA V tanggal 4 Agustus 2025, yang pada prinsipnya merupakan penyesuaian halaman III DIPA sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III, serta pergeseran pagu blokir antar paket kegiatan, khususnya antara kegiatan dukungan dan pendampingan penyiapan.

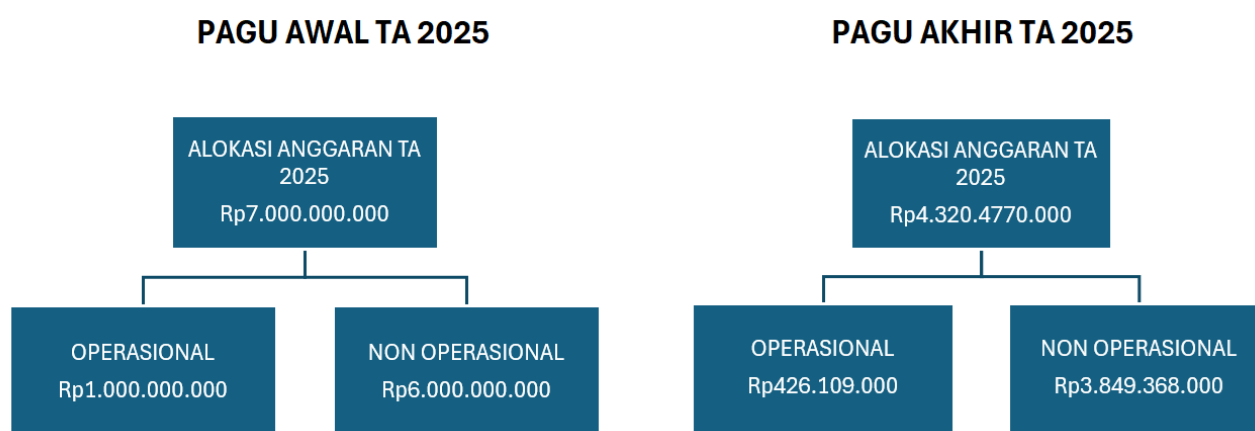
Pada Revisi POK September 2025, dilakukan kembali penyesuaian kebutuhan tenaga ahli serta penyesuaian belanja akun terhadap rencana pelaksanaan kegiatan tiap subdirektorat/subbagian. Secara keseluruhan, pagu tetap Rp6,25 miliar dengan pagu efektif Rp4,31 miliar.

Selanjutnya, Revisi DIPA VI tanggal 22 Oktober 2025 menetapkan pagu sebesar Rp5,66 miliar dengan blokir Rp1,35 miliar dan pagu efektif tetap Rp4,31 miliar, disertai pembukaan blokir efisiensi.

Pada Revisi DIPA VII tanggal 14 November 2025, dilakukan penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan fasilitasi hari besar, perangkat data pegawai, pembinaan pegawai, serta penyesuaian kegiatan Direktorat PPISDA. Pagu akhir ditetapkan sebesar Rp5,66 miliar, dengan blokir Rp1,35 miliar, dan pagu efektif Rp4,31 miliar.

Selanjutnya pada Revisi POK November 2025, dilakukan kembali penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi rencana penyelesaian Bulan Desember TA 2025 dan Revisi POK Desember 2025 dilakukan penyesuaian akhir untuk mengakomodasi operasional perkantoran.

Adanya perubahan anggaran yang terjadi tentu memerlukan perubahan pola pelaksanaan kegiatan, hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat berjalan. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan yaitu dengan menyesuaikan lokasi pelaksanaan kegiatan menjadi di dalam kantor maupun kantor-kantor Kementerian PU lainnya. Selain itu juga pelaksanaan kegiatan secara daring menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan agar kegiatan yang direncanakan dapat tetap dilaksanakan. Grafik pohon anggaran berdasarkan pagu awal dan akhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar III-10. Pohon Anggaran Pagu TA 2025 Direktorat PPICK

Sumber: Direktorat PPICK, 2025

III.4.2. Realisasi Anggaran TA-2025

Analisis kinerja anggaran Direktorat PPICK sepanjang tahun 2025 menunjukkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan. Dengan pagu anggaran total 7 miliar, Direktorat PPICK memegang tanggung jawab signifikan dalam memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I, Direktorat PPICK memulai tahun dengan anggaran rencana sebesar Rp38.860.000,00, hampir mencapai target dengan realisasi sebesar Rp38.850.051,00 juta. Ini menunjukkan kesesuaian perencanaan awal dengan kondisi lapangan, dengan hanya terjadi deviasi negatif relatif sangat kecil sebesar Rp9.949 (0.00%). Hal ini menandakan pengawasan anggaran yang baik dan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan proyek.

Memasuki Triwulan II, terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran menjadi Rp391.770.000,00 dari rencana Rp392.780.000,00, dengan deviasi negatif 0,26% atau

sebesar Rp1.010.000,00. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.



Gambar III-11 Rapat Capaian Kinerja Bulan November 2025

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

Memasuki Triwulan III, dari rencana anggaran Rp2.050.000.000,00 realisasi hanya mencapai Rp2.048.790.000 menyebabkan deviasi negatif 0,06% atau sebesar Rp1.210.000,00. Meskipun pada awal Triwulan II (Bulan Juli) sempat mengalami deviasi yang cukup besar disebabkan pergeseran termin penarikan remunerasi ekspert, namun pada akhir periode Triwulan III

Direktorat PPICK berhasil menstabilkan kembali capaian kinerja anggarannya. Memasuki Triwulan IV, Direktorat PPICK berhasil melampaui target kinerja anggarannya, dengan prognosis realisasi anggaran 98,36% atau Rp4.249.620.000,00 pada akhir periode TW IV realisasi anggaran yang dicapai melebihi proyeksi awal yaitu sebesar 99,19% atau Rp4.285.552.145,00 atau deviasi positif 0,83% atau Rp35.932.145,00. Ini menunjukkan upaya keras dalam penyesuaian strategi dan manajemen proyek untuk mengatasi tantangan yang muncul di triwulan sebelumnya.

Secara lebih rinci, pada bagian pertama, untuk Sasaran Kegiatan (SK) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengikuti pola yang serupa. Diawali dengan deviasi negatif kecil di tiga triwulan pertama, kemudian akhirnya mencapai target di Triwulan IV dengan deviasi positif.

Sementara itu, SK Dukungan Manajemen Internal, menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Di Triwulan I, II, III, dan IV realisasi anggaran hampir tidak terjadi deviasi. menunjukkan kemampuan Direktorat PPICK dalam mengelola sumber daya internalnya secara efisien.

Dari analisis ini, beberapa hal penting dapat disimpulkan. Pertama, Direktorat PPICK telah secara rutin melakukan monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan sehingga tindakan perbaikan bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih optimal sehingga menghasilkan deviasi positif pada seluruh kegiatan. Kedua, terkait dengan proyek KPBU,



Gambar III-12. Rapat Pembahasan Capaian Kinerja DJPI Tahun Anggaran 2025

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK

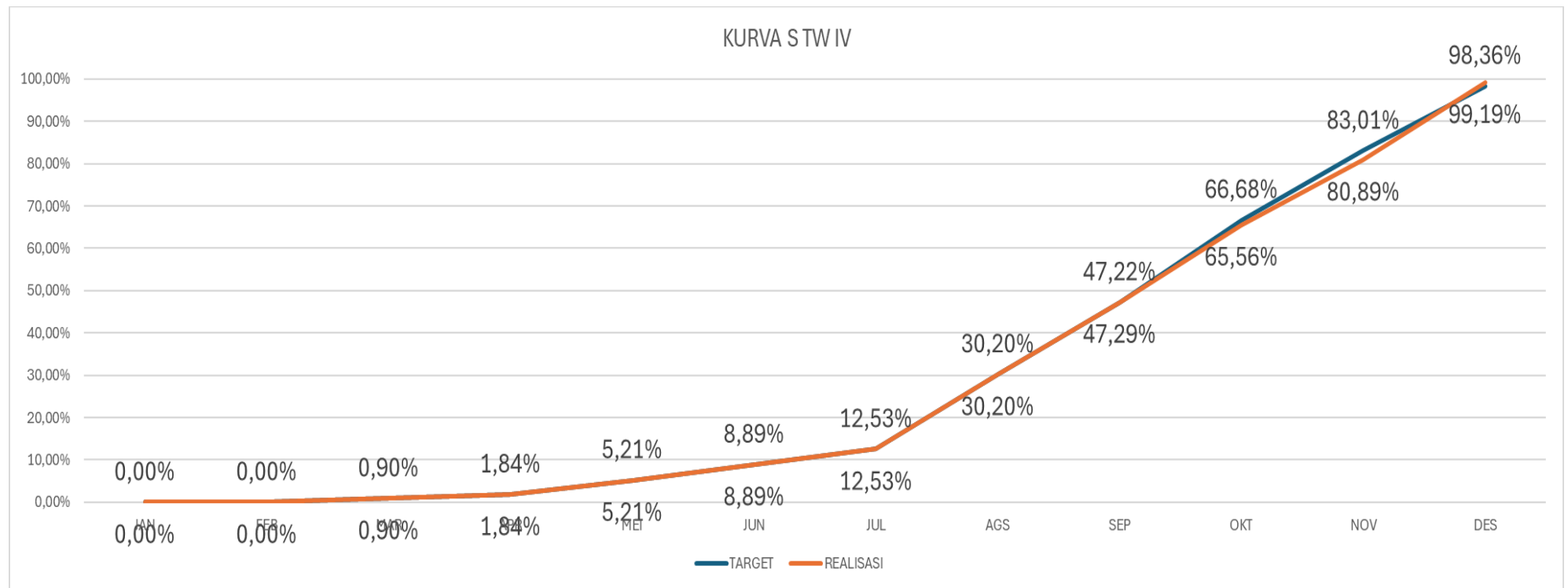
adanya komitmen yang tinggi dari PJPk daerah dan koordinasi yang lebih intensif untuk mempercepat pelaksanaan KPBU di daerah. Ketiga, adanya penambahan kegiatan karena urgensi/arahan/kebijakan pimpinan pada Triwulan IV yang mampu menambah ketercapaian kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, laporan e-monitoring ini menggambarkan perjalanan Direktorat PPICK dalam menavigasi kompleksitas pengelolaan anggaran pembiayaan infrastruktur. Meskipun menghadapi tantangan, Direktorat PPICK menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas, dua kualitas penting dalam pengelolaan proyek dan keuangan di sektor publik. Komitmen terhadap pencapaian target anggaran yang efisien dan efektif tidak hanya penting untuk kesuksesan pelaksanaan pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat nasional.

Ada pun rincian perbandingan target dan realisasi anggaran per triwulan dan kurva S dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel III.16. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPICK TA 2025 Per Triwulan

KEGIATAN/RO/KOMPONEN	PAGU	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		TARGET	AKTUAL	DEVIASI	TARGET	AKTUAL	DEVIASI	TARGET	AKTUAL	DEVIASI	TARGET	AKTUAL	DEVIASI
DIT.PPICK	4,320,477,000	39,320,000	38,860,000	-460,000	236,930,000	155,490,000	-81,440,000	2,241,030,000	2,048,810,000	-192,220,000	4,249,630,000	4,285,552,145	35,922,145
OPERASIONAL	426,109,000	39,320,000	38,860,000	-460,000	-	-	0	287,830,000	271,230,000	-16,600,000	419,120,000	425,561,379	6,441,379
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP	426,109,000	39,320,000	38,860,000	-460,000				287,830,000	271,230,000	-16,600,000	419,120,000	425,561,379	6,441,379
Non Operasional	3,894,368,000	-	-	0	236,930,000	155,490,000	-81,440,000	1,953,200,000	1,777,580,000	-175,620,000	3,830,510,000	3,859,990,766	29,480,766
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,290,114,000	-	-	0	145,000,000	63,980,000	-81,020,000	670,000,000	542,130,000	-127,870,000	1,268,960,000	1,279,356,029	10,396,029
Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	336,347,000				44,500,000	44,120,000.00	-380,000	170,000,000	139,280,000	-30,720,000	330,830,000	332,967,297	2,137,297
Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	485,783,000				16,500,000	16,040,000	-460,000	245,000,000	175,710,000	-69,290,000	477,820,000	478,458,346	638,346
Pengembangan Program Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	467,984,000				84,000,000	3,820,000	-80,180,000	255,000,000	227,140,000	-27,860,000	460,310,000	467,930,386	7,620,386
Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,541,631,000	-	-	0	18,200,000	17,900,000	-300,000	662,000,000	618,380,000	-43,620,000	1,516,350,000	1,530,376,237	14,026,237
Pendampingan Penyiapan Proyek Infrastruktur Permukiman	601,970,000				13,500,000	13,200,000	-300,000	235,000,000	233,790,000	-1,210,000	592,100,000	590,272,686	-1,827,314
Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Pesampahan	939,661,000				4,700,000	4,700,000	0	427,000,000	384,590,000	-42,410,000	924,250,000	940,103,551	15,853,551
Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	762,872,000	-	-	0	62,810,000	62,710,000	-100,000	490,000,000	486,820,000	-3,180,000	750,360,000	758,241,152	7,881,152
Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman	762,872,000				62,810,000	62,710,000	-100,000	490,000,000	486,820,000	-3,180,000	750,360,000	758,241,152	7,881,152
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	299,751,000	-	-	0	10,920,000	10,900,000	-20,000	131,200,000	130,250,000	-950,000	294,840,000	292,017,348	-2,822,652
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur	162,495,000				5,550,000	5,540,000	-10,000	44,200,000	43,920,000	-280,000	159,830,000	155,414,967	-4,415,033
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur	137,256,000				5,370,000	5,360,000	-10,000	87,000,000	86,330,000	-670,000	135,010,000	136,602,381	1,592,381

Sumber: ie-monitoring Kementerian PU, 2025

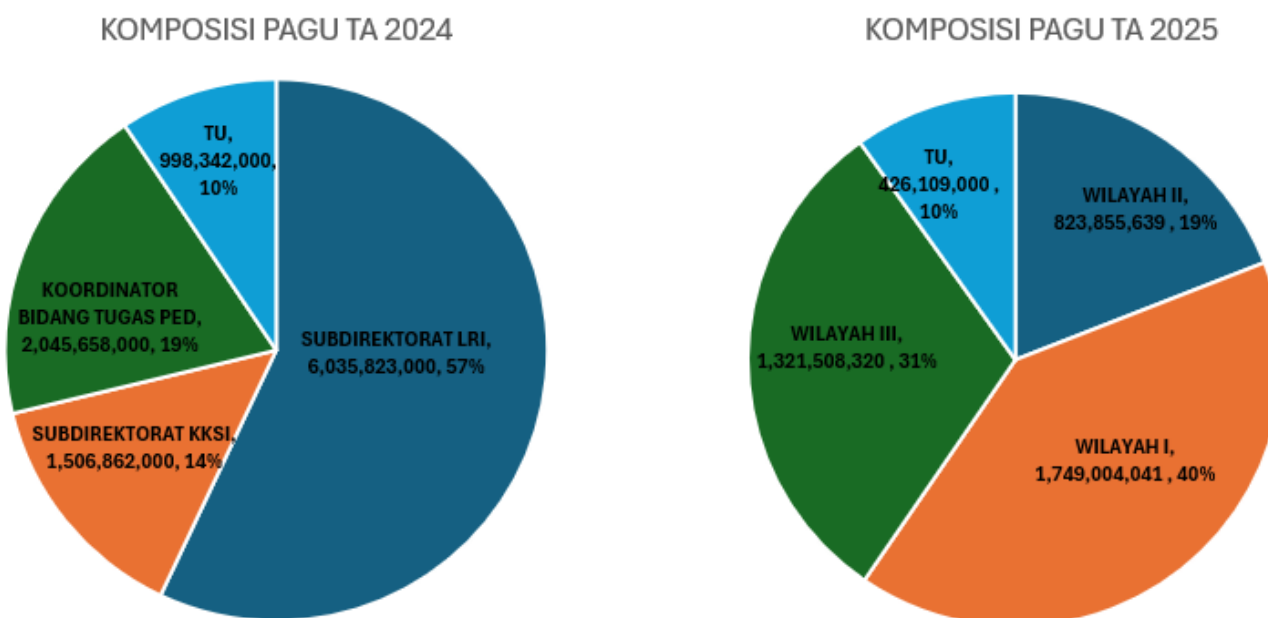


Gambar III-13. Kurva S Direktorat PPICK TA 2025 (status 10 Januari 2026)

Sumber: *ie-monitoring* Kementerian PU, 2025

III.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran TA-2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dalam kerangka penyusunan anggaran dan alokasi dana, Direktorat PPICK mendapatkan alokasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.000.000. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kali pemotongan dan pemblokiran anggaran sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, dari total anggaran tersebut, hanya sebesar Rp4.320.477.000 yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPICK hingga akhir Desember 2025. Anggaran ini kemudian dialokasikan secara strategis kepada subdirektorat dan subbagian tata usaha sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat PPICK. Komposisi pagu Direktorat PPICK pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar III-14. DIPA Direktorat PPICK TA 2024 dan 2025 Berdasarkan Unit Pelaksana

Sumber: hasil olah data Direktorat PPICK, 2025

Berdasarkan gambar Komposisi Pagu TA 2025, porsi anggaran terbesar dialokasikan kepada Wilayah I sebesar Rp1.749.004.041 (40%), diikuti oleh Wilayah III sebesar Rp1.321.508.320 (31%), Wilayah II sebesar Rp823.855.639 (19%), dan Subbagian Tata Usaha memperoleh alokasi sebesar Rp426.109.000 (10%). Komposisi ini mencerminkan fokus kebijakan TA 2025 yang menitikberatkan pada penguatan pelaksanaan program dan kegiatan berbasis wilayah.

Sebagai pembanding, pada TA 2024, struktur organisasi dan penganggaran masih menggunakan nomenklatur Direktorat PPIP. Pada tahun tersebut, komposisi pagu anggaran disusun berdasarkan subdirektorat yang dibagi berdasarkan tahapan KPBUI yaitu Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi,

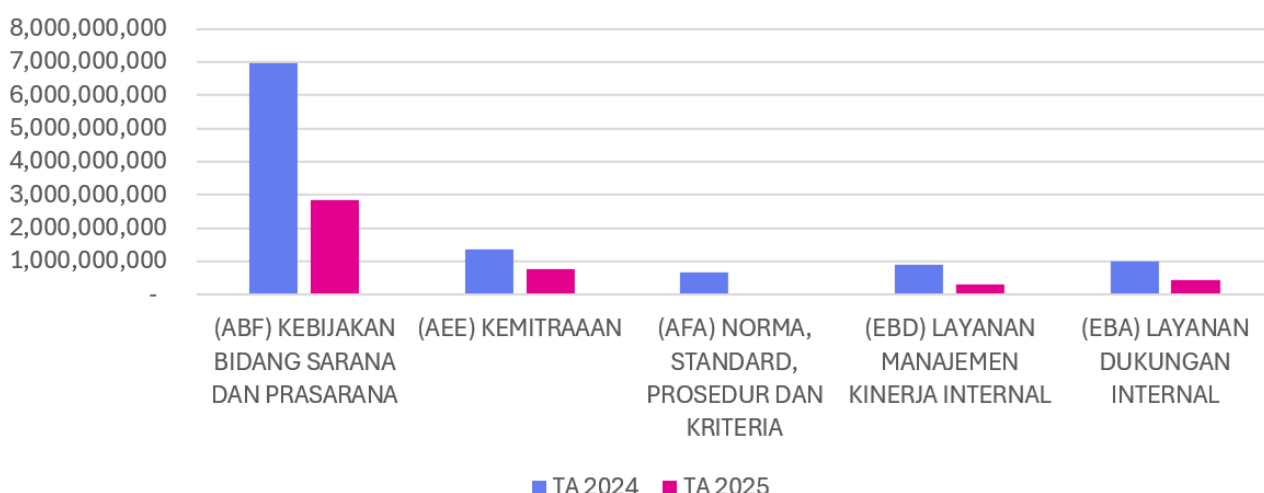
Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi, serta Subbagian Tata Usaha. Alokasi anggaran terbesar pada TA 2024 berada pada Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi sebesar 57%, diikuti oleh Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi sebesar 19%, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi sebesar 14%, dan Subbagian Tata Usaha sebesar 10%.

Pada tahun 2025, Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah I (PPICK Wilayah I) menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1.749.004.041 (40%). Anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus pada perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan kegiatan fasilitasi di tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU hingga melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait di Wilayah I, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur cipta karya. Dengan anggaran yang memadai, Subdirektorat PPICK Wilayah I telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses fasilitasi proyek di wilayah I, optimalisasi pendampingan transaksi proyek, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan program.

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah II (PPICK Wilayah II) diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 823.855.639 (19%). Anggaran ini ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi di tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU hingga melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait di Wilayah II serta memperkuat tata kelola data dan informasi sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan alokasi anggaran ini, Subdirektorat PPICK Wilayah II telah mampu mengoptimalkan penyiapan proyek dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di direktorat.

Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III (PPICK Wilayah III) mendapatkan alokasi sebesar Rp 1.321.508.320 (31%). Anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi di tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU hingga melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait di Wilayah III serta memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Zona Integritas di Direktorat PPICK. Dengan alokasi anggaran ini, telah digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan sejalan dengan reformasi birokrasi, yang pada gilirannya akan memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang efektif dan efisien.

Subbagian Tata Usaha (TU) menerima alokasi anggaran sebesar Rp 426.109.000 (10%). Anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung operasional keseluruhan Direktorat PPICK, termasuk manajemen administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kebutuhan logistik. Peran Subbag TU sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional sehari-hari Direktorat PPICK. Dengan dana yang dialokasikan, Subbag TU telah mampu meningkatkan efisiensi administratif dan operasional, sehingga memungkinkan Direktorat PPICK fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur.



Gambar III-15. DIPA Direktorat PPICK TA 2024 dan 2025 Berdasarkan Rumpun KRO

Sumber: hasil olah data Direktorat PPICK, 2025

Seperti yang terlihat pada Gambar III.16, untuk KRO Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat PPICK menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dasar. Fokus alokasi anggaran pada kelompok ini diarahkan pada pengembangan kebijakan yang inovatif dan aplikatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya tersebut mencakup perumusan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan sosial, serta penanganan berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia, termasuk aspek keberlanjutan dan pemerataan pembangunan.

Pada KRO Kemitraan diarahkan untuk membangun dan memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai entitas, baik pihak swasta, lembaga internasional, maupun pemerintah daerah. Melalui alokasi anggaran pada kelompok ini, Direktorat PPICK berupaya menciptakan sinergi yang efektif dalam pengembangan proyek infrastruktur, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, skema pembiayaan alternatif, serta transfer pengetahuan dan praktik terbaik (*best practices*). Pendekatan kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Sementara itu, KRO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tetap mendapatkan alokasi anggaran sebagai fungsi pendukung kebijakan teknis. Kegiatan pada kelompok ini difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan NSPK agar selaras dengan kebutuhan lapangan, kebijakan nasional, serta perkembangan regulasi, sehingga dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal, Direktorat PPICK bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan kinerja

organisasi. Fungsi ini menjadi instrumen penting dalam pengendalian pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja.

Adapun KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal mencakup pengelolaan aspek administratif, keuangan, sumber daya manusia, serta logistik yang mendukung operasional Direktorat PPICK. Alokasi anggaran pada kelompok ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja organisasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjamin kelancaran operasional harian, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara keseluruhan, perbandingan pagu anggaran TA 2024 dan TA 2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian besaran anggaran, Direktorat PPICK tetap mempertahankan fokus pada penguatan kebijakan, kemitraan strategis, serta tata kelola internal yang efektif dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur nasional.

III.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

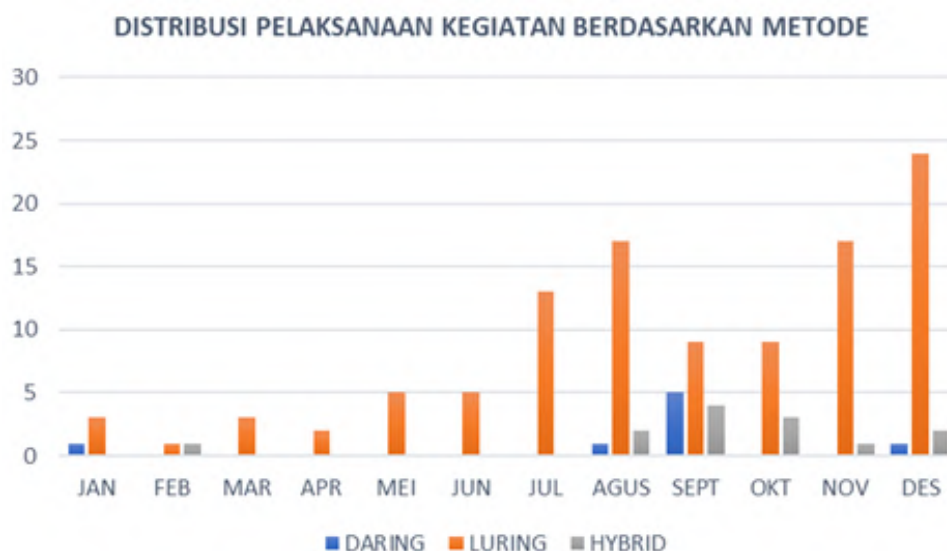
Subbab ini menjelaskan analisis atas efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja organisasi. Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada penggunaan sumber daya yang meliputi: 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sarana dan Prasarana, dan 3) Anggaran. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sumber daya digunakan secara optimal dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di direktorat.

III.5.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pegawai di Direktorat PPICK berjumlah 51 orang. Dengan jumlah pegawai tersebut, Direktorat PPICK telah mencapai kinerja sebesar 25,42% dari target 25% dan realisasi anggaran sebesar 97,10%. Pada tahun 2025, terdapat penambahan pegawai menjadi 55 orang. Dengan penambahan jumlah tersebut, telah tercapai kinerja pada masing-masing indikator yaitu IKK Tingkat Dukungan Manajemen sebesar 79,51% dari target 72,50%, IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya sebesar 104,00% dari target 100,00%, dan IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan sebesar 103,33% dari target 100%. Selain itu, capaian realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 99,19%. Berdasarkan sandingan data dan capaian kinerja tersebut, adanya penambahan target IKK dapat dicapai melebihi target seiring dengan adanya penambahan jumlah pegawai pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tercapainya kinerja Direktorat PPICK dapat dikatakan efisien, karena seluruh sumber daya baik teknis maupun administrasi telah dioptimalkan untuk mencapai target-target yang tertuang dalam PK tahun 2025, bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan dalam PK tahun 2025.

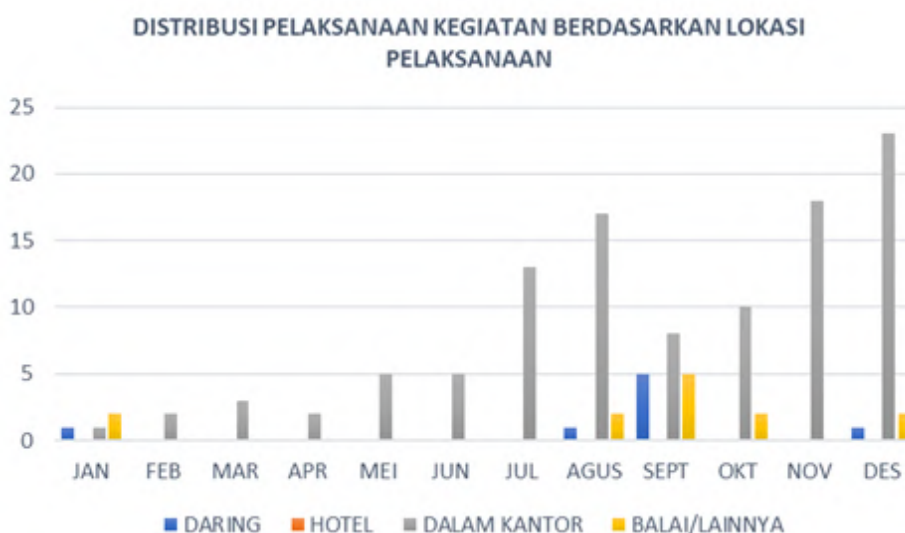
III.5.2. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Salah satu upaya melakukan efisiensi kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan proporsi pelaksanaan rapat di Direktorat PPICK berdasarkan metode pelaksanaan, yaitu daring dan luring serta dibandingkan dengan metode sepanjang tahun. Data yang terkumpul menunjukkan dinamika dalam pilihan metode rapat, yang berubah-ubah sepanjang tahun dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dan kondisi eksternal mempengaruhi keputusan dalam penyelenggaraan rapat.



Gambar III-16. Distribusi Kegiatan Direktorat PPICK Tahun 2025 Berdasarkan Metode Pelaksanaan

Sumber: hasil olah data Direktorat PPICK, 2025



Gambar III-17. Distribusi Kegiatan Direktorat PPICK Tahun 2025 Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan

Sumber: hasil olah data Direktorat PPICK, 2025

Sepanjang tahun 2025, terlihat bahwa rapat luring mendominasi metode pelaksanaan kegiatan Direktorat PPICK, sementara untuk rapat daring rata-rata dalam setahun sebesar 28%. Hal ini menunjukkan preferensi untuk interaksi langsung atau tatap muka, sehingga lebih efektif dalam melakukan diskusi dan mencapai tujuan bersama.

Dalam mendukung efisiensi kegiatan, rapat secara luring juga difasilitasi melalui daring, artinya jumlah peserta rapat dapat dikondisikan agar tidak terlalu banyak. Selain itu walaupun didominasi kegiatan secara luring, bila disandingkan dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan, maka 69% dilakukan di dalam kantor, baik menggunakan ruang rapat Direktorat PPICK, mau pun ruang rapat Uker atau Unor lain di Kementerian PU.



Gambar III-18. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I DJPI

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPICK, 2025

Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan antara rapat daring dan luring di Direktorat PPICK tidak bersifat statis, melainkan beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi berbagai situasi, sekaligus pemanfaatan teknologi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas komunikasi internal.

III.5.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan yang belum optimum dan dialihkan pada kegiatan yang lebih membutuhkan. Pada tahun 2025, dilakukan beberapa kali perubahan anggaran baik antar paket kegiatan maupun di dalam satu paket kegiatan. Perubahan tersebut menggunakan mekanisme revisi POK maupun revisi DIPA yang melibatkan Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pada tahun ini, perubahan anggaran lintas paket kegiatan juga berkonsekuensi terhadap penghapusan paket kegiatan dan pembuatan paket kegiatan baru. Paket kegiatan Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang sedari awal tahun sudah dianggarkan pada akhirnya dihapus untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan lingkup pekerjaan dan konsultan ekspert dilakukan revisi anggaran ke paket kegiatan Penyusunan Studi Sektor Air Minum dan Persampahan, sedangkan paket kegiatan Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang

sebelumnya sudah dianggarkan kemudian dihapus disebabkan *timeline* tahap transaksi yang bergeser mundur ketahun berikutnya, anggaran untuk paket kegiatan tersebut dialihkan untuk paket kegiatan Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman. Rincian realisasi anggaran dan output Direktorat PPICK TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.17. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Output Direktorat PPICK TA 2025

No	Kode MAK	Kegiatan/KRO/RO/ Komponen	Target Output	Pagu	Realisasi		Output (%)	
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA				4.320.477	4.285.552	99,19%	100	100
TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN EVALUASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA			100%	2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
1	7766. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
	7766.ABF.010	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	1.290.114	1.279.356	99,17	100	100
	7766.ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	1.541.631	1.530.376	99,27%	100	100
2	7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		299.751	292.017	97,42%	100	100
	7766.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Laporan	299.751	292.017	97,42%	100	100
JUMLAH PROYEK PEMBIAYAAN ALTERNATIF INFRASTRUKTUR AIR MINUM YANG SIAP DIKERJASAMAKAN			1 Proyek	762.872	758.241	99,39%	100	100
3	7766.AEE	Kemitraan		762.872	758.241	99,39%	100	100
	7766.AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	762.872	758.241	99,39%	100	100
TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN DIT PPICK			72,50%	426.109	425.561	99,87%	100	100
4	7766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		426.109	425.561	99,87%	100	100
	7764.EBA.994	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP	1 Layanan	426.109	425.561	99,87%	100	100

Sumber: Hasil Olah Data Direktorat PPICK, 2025

Efektivitas kinerja diukur dari kemampuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sementara efisiensi kinerja diukur melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Selama tahun anggaran 2025, terdapat beberapa proyek yang disiapkan dan difasilitasi. Direktorat PPICK telah melakukan berbagai upaya guna mendukung perkembangan proyek KPBU SPAM ke tahap berikutnya.

Salah satu proyek yang menonjol adalah KPBU SPAM Regional Ayung I. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Efektivitas kinerja Direktorat PPICK tercermin dari beberapa pencapaian penting selama tahun anggaran. Kinerja yang efisien juga terlihat dari penggunaan sumber daya yang optimal oleh Direktorat PPICK. Meninjau potensi proyek dan kinerja Direktorat PPICK selama tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa organisasi ini mampu beradaptasi dengan baik dan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan kesiapan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya.

III.5.4. Perbandingan Efisiensi/Efektivitas

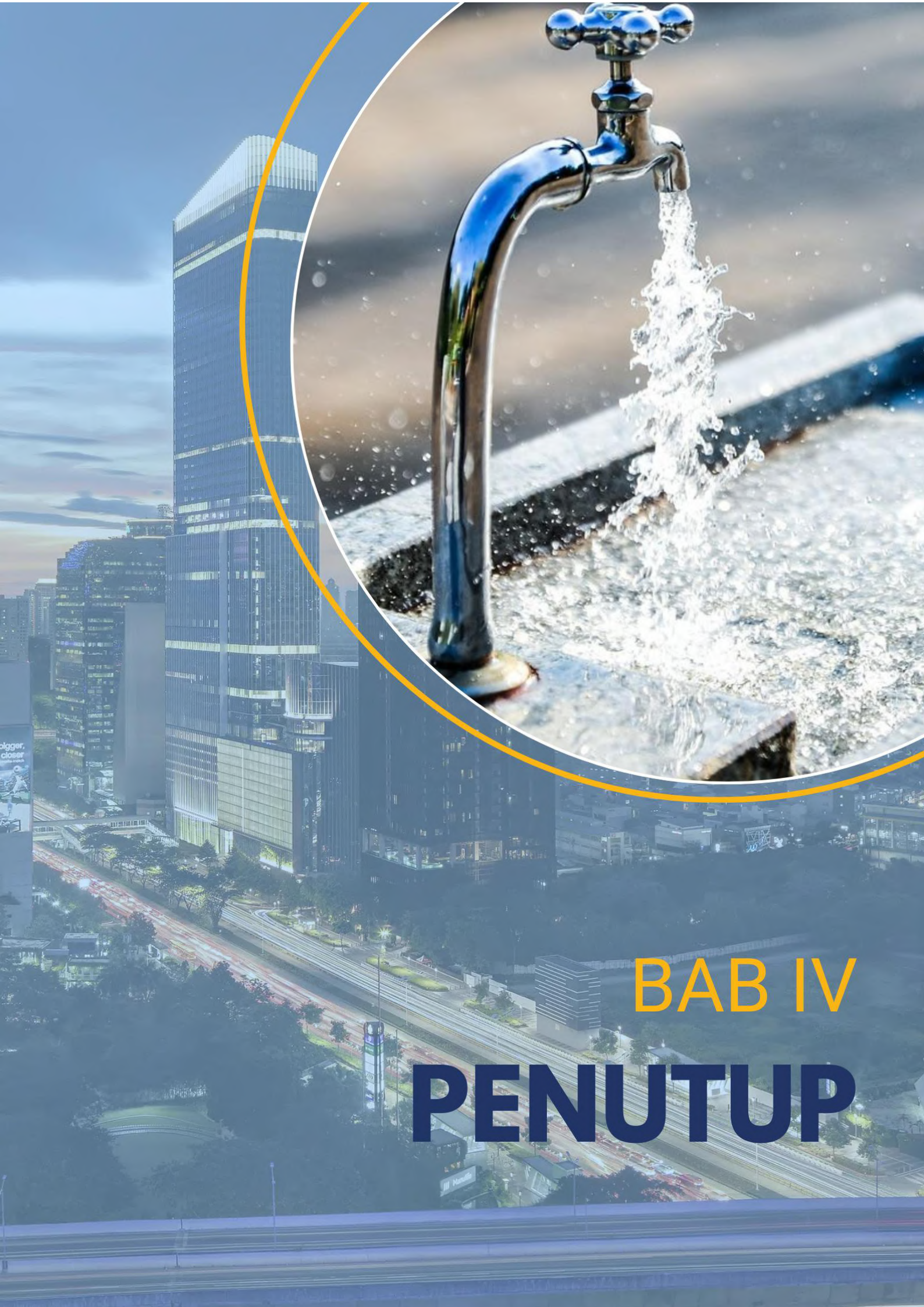
Perbandingan tingkat efisiensi/efektivitas capaian kinerja Direktorat PPICK pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.18. Perbandingan Efisiensi/Efektivitas Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025

IKK	2024			2025		
	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK	-	-	-	109,67	99,19	110,57
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	101,68	97,10	104,72	104,00		104,85
Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	-	-	-	103,33		104,17
	Rata-rata		104,72	Rata-rata		106,53

Sumber: Olahan Direktorat PPICK, 2025

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi/efektivitas Direktorat PPICK pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan tahun 2024. Pengelolaan anggaran yang optimal, penambahan jumlah SDM dan perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan merupakan faktor pendorong ketercapaian ini.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan rangkuman dari laporan ini dari bab pertama hingga bab ke-empat. Penutup ini bertujuan untuk merefleksikan kembali tujuan awal dan sejauh mana laporan ini berhasil menjawabnya, menyajikan evaluasi atas keseluruhan isu dan topik yang dibahas. Dengan menyediakan refleksi terhadap temuan utama dan rekomendasi yang disarankan, bab penutup berfungsi sebagai penuturan akhir yang efektif dalam memberikan pandangan jelas tentang langkah selanjutnya atau tindakan yang disarankan.

IV.1. Simpulan Umum

IV.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut dapat kami identifikasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal sehingga menghasilkan deviasi positif pada seluruh kegiatan.
- b. Komitmen beberapa PJKP Daerah yang tinggi untuk mempercepat pelaksanaan KPBU di daerah.
- c. Tata kelola fasilitasi kepada pemerintah daerah yang disempurnakan.
- d. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait yang lebih intensif.
- e. Pemantauan kinerja yang dilaksanakan secara berkala (bulanan dan triwulanan) dapat memitigasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara lebih optimal.
- f. Adanya penambahan kegiatan karena adanya urgensi/arahan/kebijakan dari pimpinan.

IV.1.2. Permasalahan

Laporan Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 ini dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Laporan Kinerja ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPICK diharapkan dapat lebih terukur dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mempermudah perbaikan-perbaikan atas permasalahan yang terjadi dan juga percepatan-percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja, baik *output* kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPICK adalah sebanyak 9 paket kegiatan yang seluruhnya merupakan kegiatan swakelola. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai

per tanggal 10 Januari 2026 berdasarkan data iemon PU dan e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp4.285.552.000 (75,50% dari total pagu DIPA). Besaran sisa anggaran terdiri dari self blocking sebesar Rp2.355.699.000 (23,88%) dan tidak terserap sebesar Rp34.925.000 (0,63%).

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPICK tahun ini adalah sebesar 79,51% untuk IKK Dukungan Manajemen Direktorat PPICK dari target kinerja sebesar 72,50% (deviasi positif 7,01%), 104,00 % untuk IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi PPICK dari target sebesar 100% dan 103,33% untuk IKK Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan dari target 100%. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2025 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel IV.1. Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target Output	Target Proyek	Realisasi Output	Realisasi Proyek	Deviasi
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK		72,50%		79,51%		+7,01%
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya		100%		104,00%		+4,00%
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	-	3	-	-
	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	1 Proyek	2	1 Proyek	-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	-	2	-	-
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan		100%		103,33%		+3,33%
Output	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	1 Proyek	1	1 Proyek	-

Sumber: Hasil Olah Data Direktorat PPICK, 2025

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya *timeline* dari target yang telah ditentukan bersama;
2. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui peraturan-peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam proses penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU;
4. Sulitnya mendapatkan data progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPk Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurang memadainya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan;
5. Terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran mengikuti kondisi di lapangan dan para pihak lain yang terlibat;
6. Jumlah SDM dan BMN yang tersedia masih kurang memadai untuk mendukung beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan.

IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Guna menunjang kinerja Direktorat PPICK yang lebih optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK
 - a. Pengusulan SDM dan BMN baru untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Implementasi AKIP yang lebih optimal;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM di Direktorat PPICK.
2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
 - a. Memperkuat pelaksanaan KPBU yang didukung ketersediaan NSPK yang operasional untuk dapat mempercepat proses tahapan KPBU dan meningkatkan minat investor;
 - b. Memperkuat koordinasi dan pertukaran data terkait progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPk Pemerintah Daerah.
 - c. Memperkuat umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala.
3. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan
 - a. Optimalisasi fasilitasi kepada PJPk daerah sesuai dengan tata kelola pemberian fasilitasi dari DJPI kepada pemerintah daerah;
 - b. Meningkatkan pemahaman baik untuk internal maupun pemerintah daerah terkait skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur cipta karya;

Tindak lanjut untuk perbaikan kinerja Direktorat PPICK adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat PPICK
 - a. Melaksanakan dukungan layanan kepegawaian dan kearsipan secara berkala.
 - b. Implementasi manajemen risiko pada kegiatan direktorat.
 - c. Mendorong SDM dalam pelaksanaan pelatihan teknis pembiayaan infrastruktur, AKIP, Manajemen Risiko, dan bidang manajemen lainnya.
2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan ketentuan efisiensi dan *self blocking* seperti yang terjadi pada tahun 2025, serta memastikan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran di tahun berikutnya dilaksanakan dalam bentuk koordinasi.
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang sesuai dengan pedoman serta meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian laporan.
 - c. Penyusunan produk hukum berupa NSPK untuk mendukung pelaksanaan proyek agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mengatur tata kelola internal.
3. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan
 - a. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi proyek dengan memanfaatkan *platform* fasilitasi digital yang telah dikembangkan.
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas internal Direktorat PPICK ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pembiayaan kreatif.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Dit. PPICK Awal Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

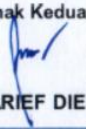
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

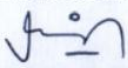
Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Pihak Pertama



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

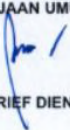
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU Infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%

Kegiatan: Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp 7.000.000.000,00

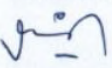
Jakarta, 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

Perjanjian Kinerja Dit. PPICK Revisi Juni 2025

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, Juni 2025

Pihak Pertama



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU Infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Anggaran
Rp6.288.787.000,00

Jakarta, Juni 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

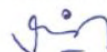
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Cipta Karya Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	SPAM Kota Balikpapan	Rp3,700,000,000,000.00
Transaksi	SPAM Regional Ayung I	Rp1,500,000,000,000.00

JAKARTA, JUNI 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

Perjanjian Kinerja Dit. PPICK Revisi Agustus 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

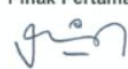
Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 12 Agustus 2025

Pihak Pertama



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	30%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp6.249.713.000,00

Jakarta, 12 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Cipta Karya Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	SPAM Kota Balikpapan	Rp3.700.000.000.000,00
Transaksi	SPAM Regional Ayung I	Rp1.500.000.000.000,00

JAKARTA, 12 AGUSTUS 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

Perjanjian Kinerja Dit. PPICK Revisi September 2025

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Pertama



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek

Kegiatan:
 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
 Rp659.867.000,00
 Rp5.590.046.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)
3		Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	CARA PENGUKURAN Dihitung dari Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan CATATAN - Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses menuju Prakuifikasi (PQ) - Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyiapan transaksi. - Perhitungan jumlah proyek kumulatif setiap tahun, sampai dengan tahun 2024 tercapai 8 proyek. - Sampai dengan tahun 2025 ditargetkan 9 proyek, sehingga target di tahun 2025 1 proyek.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

Perjanjian Kinerja Dit. PPICK Akhir Tahun 2025

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

Pihak Pertama



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%
IKK 2. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek

Kegiatan:
 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
 Rp596.357.000,00
 Rp5.079.819.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya pada Tahap Penyediaan dibandingkan dengan target (60%)
3		Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	CARA PENGUKURAN Dihitung dari Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan CATATAN - Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses menuju Prakuallifikasi (PQ) - Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyediaan transaksi. - Perhitungan jumlah proyek kumulatif setiap tahun, sampai dengan tahun 2024 tercapai 8 proyek. - Sampai dengan tahun 2025 ditargetkan 9 proyek, sehingga target di tahun 2025 1 proyek.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

Daftar Proyek KPBU Sektor Cipta Karya Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	SPAM Kota Balikpapan	Rp3.700.000.000.000,00
Transaksi	SPAM Regional Ayung I	Rp1.500.000.000.000,00

Jakarta, 24 Desember 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

Berita Acara Kesepakatan Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
 Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon: (021) 7264010, surel: ppiip.pembiayaan@pu.go.id

BERITA ACARA
 KESEPAKATAN KINERJA
 NOMOR PR0101/B/Pc/2026/1

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13, bulan Januari, tahun 2026, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat PPICK Tahun 2025 yang dihadiri oleh Direktur dan Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, sehingga dapat tercapai kesepakatan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
IKP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	72,50%	79,51%	109,67%
IKP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	100%	104,00%	104,00%
IKK. Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	1 Proyek	1 Proyek	103,33%

-2-

2. Capaian Kinerja Proyek KPBU Tahap Perencanaan dan Penyiapan TA 2025

No	Target Berdasarkan PK 2025	Realisasi
1	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)	SPAM Kota Balikpapan (Nilai Investasi = Rp3.700.000.000.000)
Total	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000	1 Proyek Tahap Penyiapan Rp3.700.000.000.000

3. Capaian Kinerja Proyek KPBU Siap Dikerjasamakan TA 2025

No	Target Berdasarkan PK 2025	Realisasi
1	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi = Rp1.500.000.000.000)
Total	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000	1 Kesepakatan Rp1.500.000.000.000

4. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya

No	Kode MAK	Kegiatan/KRO/RO/ Komponen	Target Output	Pagu	Realisasi		Output (%)	
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA				4.320.477	4.285.552	99,19%	100	100
TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN EVALUASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA			100%	2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
1	7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		2.831.745	2.809.732	99,22%	100	100
	7766.ABF. 010	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	1.290.114	1.279.356	99,17	100	100
	7766.ABF. 011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	1.541.631	1.530.376	99,27%	100	100
2	7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		299.751	292.017	97,42%	100	100
	7766.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Laporan	299.751	292.017	97,42%	100	100

-3-

No	Kode MAK	Kegiatan/KRO/RO/ Komponen	Target Output	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Output (%)	
1	2	3	4	5	(Rp Ribu)	(%)	Rencana	Realisasi
		JUMLAH PROYEK PEMBIAYAAN ALTERNATIF INFRASTRUKTUR AIR MINUM YANG SIAP DIKERJASAMAKAN	1 Proyek	762.872	758.241	99,39%	100	100
3	7766.AEE	Kemitraan		762.872	758.241	99,39%	100	100
	7766.AEE. 003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	762.872	758.241	99,39%	100	100
		TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL DIT PPICK	72,50%	426.109	425.561	99,87%	100	100
4	7766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		426.109	425.561	99,87%	100	100
	7764.EBA. 994	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP	1 Layanan	426.109	425.561	99,87%	100	100

(sumber: data ie-Monitoring akses 10 Januari 2026)

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya TA 2025 ini dibuat.

Jakarta, 13 Januari 2026

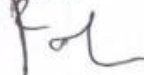
Yang menyepakati,

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah I



Denik Haryani

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah II



Fahrial Farid

Kepala Subdirektorat
Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Cipta Karya
Wilayah III



E. Hardiansyah Pranata P.

Mengetahui,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Dokumen Studi Kelayakan SPAM Kota Balikpapan

STUDI KELAYAKAN

PROYEK KPBU SPAM KOTA BALIKPAPAN

Revisi 1

Juli 2025

Disusun oleh: Konsorsium MKK

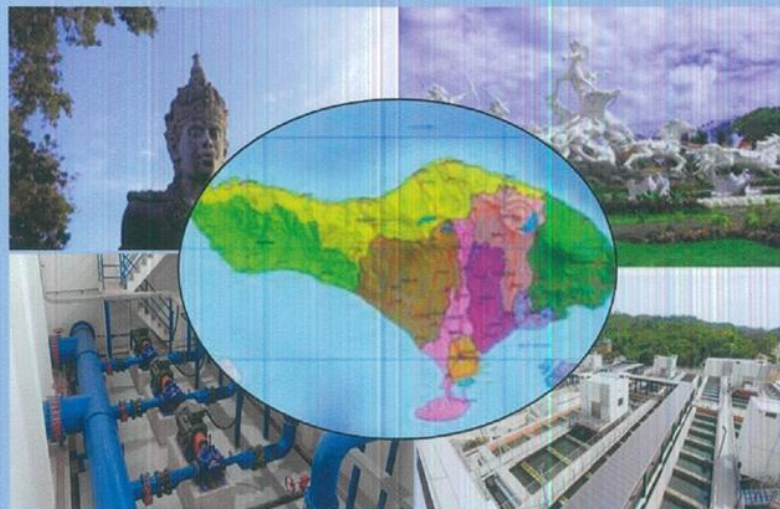
Dokumen Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ayung 1

KONSORSIUM SARBAGITA



Buku 1
FINAL
STUDI KELAYAKAN

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
SPAM – SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
AYUNG 1 SARBAGITA
KAPASITAS 1.750 Liter/Detik
PROVINSI BALI



TAHUN 2024

Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ayung 1



Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
Provinsi Bali

**DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
(REQUEST FOR QUALIFICATION / RFQ)
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK
KPBU *UNSOLICITED*
(SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)
SPAM AYUNG 1 - SARBAGITA PROVINSI BALI
KAPASITAS OLAH 1.750 LITER PER DETIK**

Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Jl. Kamboja No. 15

Denpasar, Bali
Indonesia

TAHUN 2025

Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ayung 1



Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
Provinsi Bali

**DOKUMEN PERMINTAAN PROPOSAL
(REQUEST FOR PROPOSAL / RFP)
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK
KPBU *UNSOLICITED*
SPAM (SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM)
AYUNG 1 – SARBAGITA
KAPASITAS 1.750 LITER PER DETIK**

Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
Jl. Kamboja No. 15
Denpasar, Bali
Indonesia

TAHUN 2025

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat PPIP Tahun 2024

		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110
Nomor : PR 0304 - Ps /186 Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2024	Jakarta, ²¹ Maret 2025	
Yth. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di- tempat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:		
A. Dasar Penugasan 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024; 2. Surat Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor: 18.4/SPT/Dp/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penugasan Evaluasi Implementasi AKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.		
B. Tujuan Evaluasi 1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. 2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP; 3. Menilai tingkat implementasi AKIP; 4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan 6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.		
C. Ruang Lingkup Evaluasi 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang		

memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian PU Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **86,40%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	86,40

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2024 lebih tinggi sebesar 2,40% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2023, berikut hasil implementasi AKIP tahun 2023:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	84,00

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman** disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah	-

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	Belum melakukan rapat pembahasan pemantauan yang dilakukan secara berkala setiap bulannya (sesuai dengan penyusunan laporan monev bulanan berdasarkan Permen PUPR 9/2018 dan rekomendasi Itjen pada LHE DJPI).
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1) Pembahasan terkait capaian kinerja dilakukan berkala setiap triwulan. Belum terdapat pembahasan setiap bulan (mengikuti penyusunan laporan monev bulanan dan catatan Itjen pada evaluasi AKIP DJPI Tahun 2023 yang menjelaskan berkala sesuai Permen PUPR No.9/2018). 2) Terdapat perubahan jumlah output dokumen dengan berkurangnya anggaran pada revisi DIPA ke-7 (Bulan Agustus 2024). perubahan aktivitas dari revisi anggaran kegiatan "Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dalam laporan monev bulanan telah disampaikan perubahan anggaran, namun tidak dibahas lebih lanjut langkah apa dalam mengantisipasi tetap tercapainya progres fisik agar tetap tercapai sebagai bentuk strategi dan kebijakan.
3.	Pelaporan Kinerja	

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Masih terdapat penyampaian Laporan Monev bulanan yang belum sesuai dengan ketentuan pada Permen PUPR Nomor 9/2018, diantaranya : - Laporan Monev Januari dan Februari (6 Maret 2024); - Laporan Monev Maret (15 Mei 2024); dan - Laporan Monev April (16 Mei 2024). Untuk Laporan Kinerja 2024 disampaikan tepat waktu. Pada Laporan Kinerja 2023, tanggal pengesahan tidak ada dan terdapat Nota Dinas Penyampaian pada 29 Januari 2024 (melebihi batas waktu penyampaian sesuai Permen PUPR 9/2018). Laporan Kinerja tahun 2020-2023 tidak dilengkapi tanggal.
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	-
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Terdapat tim evaluator yang belum memiliki sertifikat berdasarkan Surat Tugas Dirjen Nomor 18.5/SPT/Dp/2025
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	1) Terdapat rekomendasi LHE tahun 2023 dan 2022 yang belum selesai untuk ditindaklanjuti terkait penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan yang sesuai dengan permen PUPR 9/2018 (pada Bulan Jan, Feb, Mar dan April Tahun 2024 masih melebihi batas waktu).

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
		2) Belum terdapat persentase nilai efisiensi dalam laporan kinerja tahun 2023.

E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	-
2.	Pengukuran Kinerja	- Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan pemantauan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan - Melakukan penyampaian terkait penjelasan dari adanya perubahan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada laporan monev bulanan
3.	Pelaporan Kinerja	Memperhatikan batas waktu penyampaian laporan monitoring dan evaluasi berkala dan laporan kinerja kepada entitas di atasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Semua yang masuk dalam Tim Evaluator Internal dalam surat tugas harus memiliki sertifikat sesuai standar minimal Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 dan SE Irjen Nomor 2 Tahun 2023 - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Unor dan Unker tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja - Menyajikan perbandingan presentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,


Reni Ahiyanti
NIP. 196910181996032002

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
- Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Nota Kesepakatan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12110, Telepon : (021) 72801060

NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 05/PKS/Pk/ 2025
Tanggal : 31 Juli 2025

UPR	: UPR T-2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
Periode Evaluasi	: Tahun 2025
Nomor Surat Tugas	: 50/SPT/Pk/2025 Tanggal 28 Mei 2025
Disampaikan Tanggal	: 10 Juni 2025
Rapat Penutupan Evaluasi Tanggal	: 5 Juni 2025

HASIL EVALUASI

Nota Kesepakatan disampaikan kepada UPR T-2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (Direktorat PPICK), berdasarkan hasil evaluasi tanggal 28 Mei s.d. 5 Juni 2025 atas dokumen pendukung yang disampaikan melalui [link https://s.pu.go.id/NiQ1/evaluasi_mrdjpi](https://s.pu.go.id/NiQ1/evaluasi_mrdjpi) dan survei yang disampaikan pada [link https://s.pu.go.id/NiQ1/survei_evaluasi_mrdjpi2024](https://s.pu.go.id/NiQ1/survei_evaluasi_mrdjpi2024).

Secara garis besar, hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya sebagai berikut:

A. Kesimpulan pada Komponen Infrastruktur Manajemen Risiko

1. Hasil Reviu Dokumen Subkomponen:

No	Subkomponen	Nilai
1	Nilai Budaya Sadar Risiko	90
2	Nilai Struktur Manajemen Risiko	100
3	Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko	50
4	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	100

Hal yang menjadi catatan:

- Pada Nilai Budaya Sadar Risiko, dalam pengambilan keputusan/ kebijakan belum terdapat bukti konkrit bahwa Manajemen Risiko digunakan dalam pengambilan keputusan; dan
- Pada Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko, UPR T-2 Direktorat PPICK telah melakukan pencatatan *Loss Event Database*, namun belum semua data telah diinput pada Sistem Informasi Manajemen Risiko.

2. Nilai Hasil Survei Komponen Infrastruktur Manajemen Risiko adalah **96,84**.

B. Kesimpulan pada Komponen Proses Manajemen Risiko

1. Hasil Reviu Dokumen Subkomponen:

No	Subkomponen	Nilai
1	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	100
2	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	80
3	Nilai Identifikasi Risiko	70
4	Nilai Analisis Risiko	100

-2-

5	Nilai Evaluasi Risiko	70
6	Nilai Respon Risiko	75
7	Nilai Pemantauan dan Tinjauan	100
8	Nilai Pencatatan dan Pelaporan	40

Hal yang menjadi catatan:

- Pada Nilai Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria, penyusunan Manajemen Risiko masih melebihi batas waktu (tidak sesuai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR);
 - Pada Nilai Identifikasi Risiko, seluruh sasaran kegiatan di UPR T-2 Direktorat PPICK telah diidentifikasi risikonya, namun tujuan kegiatan utama yang terdapat dalam dokumen komitmen risiko tidak sesuai dengan tujuan kegiatan utama pada dokumen profil risiko. Selain itu, pernyataan risiko terkait turunnya Indeks Survei Penilaian Integritas di Direktorat PPICK belum dirumuskan dengan tepat (kategori risiko seharusnya risiko reputasi);
 - Pada Nilai Evaluasi Risiko, prioritas risiko belum diurutkan berdasarkan level risiko setelah pengendalian yang paling besar serta kategori risiko;
 - Pada Nilai Respon Risiko, rumusan inovasi pengendalian belum sesuai dengan opsi yang dipilih. Hal tersebut disebabkan oleh inovasi pengendalian yang ada belum mampu untuk mengurangi kemungkinan dan juga dampak berdasarkan pada nilai risiko yang direspon. Sebagai contoh, pada pernyataan risiko nomor 3, nilai risiko yang direspon menjadi lebih besar dengan adanya inovasi pengendalian. Pada pernyataan risiko nomor 2, terdapat pengurangan kemungkinan pada nilai risiko direspon, namun belum tercantum pada respon risiko yang dipilih. Pada pernyataan nomor 4, nilai risiko yang direspon tidak mencantumkan pengurangan dampak; dan
 - Pada Nilai Pencatatan dan Pelaporan, keseluruhan laporan penerapan MR tidak terdapat format tanda tangan sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. Selain itu Laporan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan I tidak disampaikan kepada pimpinan UPR di atasnya.
2. Nilai Hasil Survei Komponen Proses Manajemen Risiko adalah **96,76**.

C. Kesimpulan pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

1. Nilai Hasil Reviu Dokumen Subkomponen:

No	Subkomponen	Nilai
1	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	60

Hal yang menjadi catatan:

Hasil analisis terhadap seluruh risiko yang dikelola UPR T-2 Direktorat PPICK yaitu dari 4 risiko (2 risiko level terkendali, 2 risiko tidak terkendali), dengan rincian:

- Risiko 1 terdapat selisih 19 (aktual 25, direspon 6), tidak terkendali;
- Risiko 2 terdapat selisih 5 (aktual 1, direspon 6), terkendali;
- Risiko 3 terdapat selisih 0 (aktual 1, direspon 1), terkendali; dan
- Risiko 4 terdapat selisih 5, (aktual 11, direspon 6), tidak terkendali;

2. Nilai Hasil Survei Komponen Proses Manajemen Risiko adalah **93,06**

-3-

Kesimpulan Sementara Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR

1. Hasil Reviu Dokumen:

No.	Area Penilaian	Nilai Subkomponen	Bobot Subkomponen	Bobot Komponen	Nilai Reviu Dokumen
a	b	c	d	e	f (cxdxe)
A	Infrastruktur Manajemen Risiko				
1	Nilai Budaya Sadar Risiko	90	20%	35%	6,3
2	Nilai Struktur Manajemen Risiko	100	20%		7
3	Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko	50	30%		5,25
4	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	100	30%		10,5
B	Proses Manajemen Risiko				
1	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	100	20%	35%	7
2	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	80	20%		5,6
3	Nilai Identifikasi Risiko	70	10%		2,45
4	Nilai Analisis Risiko	100	10%		3,5
5	Nilai Evaluasi Risiko	70	10%		2,45
6	Nilai Respon Risiko	75	10%		2,625
7	Nilai Pemantauan dan Tinjauan	100	10%		3,5
8	Nilai Pencatatan dan Pelaporan	40	10%		1,4
C	Hasil Penerapan Manajemen Risiko				
1	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	60	100%	30%	18
Total Nilai Reviu Dokumen					75,575
Bobot Penilaian					80%
Nilai Reviu Dokumen Tertimbang					60,46

2. Hasil Survei:

No	Area Penilaian	Rata-Rata Area Penilaian Survei	Bobot Komponen	Nilai Survei
a	b	c	d	e (cxd)
1	Infrastruktur Manajemen Risiko	96,84	35%	33,89
2	Proses Manajemen Risiko	96,76	35%	33,87
3	Hasil Penerapan Manajemen Risiko	93,06	30%	27,92
Total Nilai Survei				95,68
Bobot Penilaian				20%
Nilai Survei Tertimbang				19,14

-4-

3. Hasil Akhir Nilai Reviu Dokumen Tertimbang dan Nilai Survei Tertimbang:

No.	Komponen Evaluasi	Nilai Evaluasi
1.	Nilai Reviu Dokumen Tertimbang	60,46
2.	Nilai Survei Tertimbang	19,14
Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		79,60
Tingkat Efektivitas/ Level		Managed/ 4

Rekomendasi

1. Menyusun format pencatatan berupa nota dinas/ prosedur lainnya yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan SOP internal terkait Manajemen Risiko di Direktorat PPICK;
2. Mengoptimalkan pengelolaan *Loss Event Database* dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko;
3. Memperhatikan batas waktu pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kriteria dalam SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
4. Agar memperhatikan perumusan tujuan kegiatan utama, pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko;
5. Agar dalam menyusun prioritas risiko memperhatikan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
6. Agar dalam penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko memperhatikan format sebagaimana pada pedoman serta disampaikan kepada UPR di atasnya; dan
7. Agar memperhatikan rancangan rumusan rencana tindak pengendalian dalam mitigasi risiko yang dapat menurunkan level risiko.

Tanggapan UPR dan Rencana Tindak Lanjut

1. UPR sepakat bahwa dokumen formal diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Telah ditambahkan rekapitulasi kegiatan rapat terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dalam pengambilan keputusan;
2. Data terkait *Loss Event Database* dari tahun 2022 hingga 2025 telah diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Risiko;
3. Terjadi keterlambatan karena belum terintegrasinya kalender risiko di tingkat unit organisasi, serta akan disusun jadwal pelaporan risiko tahunan yang sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
4. Penyusunan telah memperhatikan perumusan tujuan kegiatan utama, pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko;
5. Telah disusun prioritas risiko dengan memperhatikan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
6. Dalam penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko telah memperhatikan format sebagaimana pada SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 serta disampaikan kepada UPR di atasnya; dan
7. Di dalam rancangan rumusan level respon risiko akan disesuaikan dengan nilai yang dapat dicapai.

Tanggapan Evaluator

1. Diterima

- a) Pada Nilai Budaya Sadar Risiko, telah dilampirkan dokumen tambahan berupa Rekapitulasi Rapat Keterlibatan Pimpinan dalam Pengelolaan Risiko Januari - Desember 2024 lengkap dengan poin hasil rapat dan risiko strategis serta Nota Dinas untuk setiap rapat;
- b) Pada Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko, telah dilampirkan dokumen tambahan bukti *screenshot* penginputan *Loss Event Database* dari tahun 2022 hingga 2024 ke dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko sehingga menambah poin untuk penilaian ini;

-5-

- c) Pada Nilai Pencatatan dan Pelaporan, Laporan Penerapan MR telah ditandatangani oleh Pimpinan UPR dan telah memuat Pemantauan Inovasi Pengendalian, Tinjauan atas Risiko Baru, dan Daftar Pemantauan Level Risiko yang sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR sehingga menambah poin untuk penilaian ini; dan
- d) Pada Nilai Identifikasi Risiko, telah dilakukan perbaikan terkait pengkategorian risiko terkait turunnya indeks Survei Penilaian Integritas pada Laporan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan II hingga Triwulan IV sehingga menambah poin untuk penilaian ini.

2. Tidak Diterima

- a) Pada Nilai Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria, akan disusun jadwal pelaporan risiko tahunan yang sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. Hal tersebut tidak merubah poin penilaian dikarenakan masih suatu rencana;
- b) Pada Nilai Pencatatan dan Pelaporan, Laporan Penerapan MR Triwulan I Tahun 2024 belum disampaikan ke UPR di atasnya, namun disampaikan ke Sekretaris Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Hal tersebut tidak merubah poin penilaian;
- c) Pada Nilai Evaluasi Risiko, prioritas risiko belum diurutkan berdasarkan level risiko setelah pengendalian yang paling besar serta kategori risiko. Hal tersebut tidak merubah poin penilaian; dan
- d) Pada Nilai Respon Risiko, akan disesuaikan dengan nilai yang dapat dicapai. Hal tersebut tidak merubah poin penilaian dikarenakan masih suatu rencana.

Berdasarkan tambahan data dukung yang disampaikan, terdapat penyesuaian Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dari semula sebesar **79,60** menjadi sebesar **86,04** dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Reviu Dokumen:

No.	Area Penilaian	Nilai Subkomponen	Bobot Subkomponen	Bobot Komponen	Nilai Reviu Dokumen
a	b	c	d	e	f
					(cxdxe)
A	Infrastruktur Manajemen Risiko				
1	Nilai Budaya Sadar Risiko	100	20%	35%	7
2	Nilai Struktur Manajemen Risiko	100	20%		7
3	Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko	100	30%		10,5
4	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	100	30%		10,5
B	Proses Manajemen Risiko				
1	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	100	20%	35%	7
2	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	80	20%		5,6
3	Nilai Identifikasi Risiko	100	10%		3,5
4	Nilai Analisis Risiko	100	10%		3,5
5	Nilai Evaluasi Risiko	70	10%		2,45
6	Nilai Respon Risiko	75	10%		2,625
7	Nilai Pemantauan dan Tinjauan	100	10%		3,5

-6-

8	Nilai Pencatatan dan Pelaporan	70	10%		2,45
C	Hasil Penerapan Manajemen Risiko				
1	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	60	100%	30%	18
Total Nilai Reviu Dokumen					83,625
Bobot Penilaian					80%
Nilai Reviu Dokumen Tertimbang					66,9

2. Hasil Survei:

No	Area Penilaian	Rata-Rata Area Penilaian Survei	Bobot Komponen	Nilai Survei
a	b	c	d	e
				(cxd)
1	Infrastruktur Manajemen Risiko	96,84	35%	33,89
2	Proses Manajemen Risiko	96,76	35%	33,87
3	Hasil Penerapan Manajemen Risiko	93,06	30%	27,92
Total Nilai Survei				95,68
Bobot Penilaian				20%
Nilai Survei Tertimbang				19,14

3. Hasil Akhir Nilai Reviu Dokumen Tertimbang dan Nilai Survei Tertimbang:

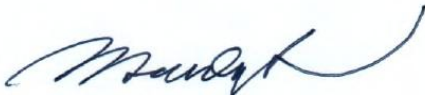
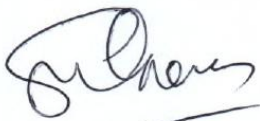
No.	Komponen Evaluasi	Nilai Evaluasi
1.	Nilai Reviu Dokumen Tertimbang	66,90
2.	Nilai Survei Tertimbang	19,14
Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		86,04
Tingkat Efektivitas/ Level		Managed/ 4

Rekomendasi Akhir

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya selaku Unit Pemilik Risiko agar:

- Memperhatikan batas waktu pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kriteria dalam SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
- Agar memperhatikan perumusan tujuan kegiatan utama, pernyataan risiko, penyebab, dampak, serta kategori risiko;
- Agar dalam menyusun prioritas risiko memperhatikan SE Menteri PUPR No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
- Agar dalam penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko memperhatikan format sebagaimana pada pedoman serta disampaikan kepada UPR di atasnya; dan
- Agar memperhatikan rancangan rumusan rencana tindak pengendalian dalam mitigasi risiko yang dapat menurunkan level risiko.

-7-

Kesimpulan Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2	
Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya untuk Tahun 2024 adalah pada level 4/ Managed. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Risiko UPR telah efektif serta telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap.	
Pihak Evalutan UPR T-2	Pihak Evaluator UPR T-2
Pemilik Risiko Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya,  <u>Meike Kencanawulan Martawidjaja</u> NIP. 196905311997032001	Jakarta, Juli 2025 Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko,  <u>Ika Agus Pawiyarti</u> NIP. 198408132009122002
Pengelola Risiko Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Wilayah III,  <u>Encik Hardiansyah Pranata Putra</u> NIP. 198501212008121001	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko,  <u>Arum Prihati Musyarofa</u> NIP. 197310222005022001
Mengetahui, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan,  <u>Agus Sulaeman</u> NIP. 196808271997031002	



MENTERI PEKERJAAN UMUM

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

**Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum**

**SEBAGAI
Juara II**

Unit Kerja Transformasi Digital Terbaik

Jakarta, 3 Desember 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DODY HANGGODO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366 Faksimile (021) 7220219

Nomor : PA 0101-Sd/1089 Jakarta, 1 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu set
 Hal : Penyampaian Hasil Akhir Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025

Yth. Daftar Penerima Terlampir
 di Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan Penilaian Transformasi Digital PU tahun 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 telah dilaksanakan yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari : *Launching Technical Meeting*, Pengumpulan Bukti Dukung, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II dan Pleno Penetapan Pemenang;
2. Seluruh tahapan penilaian telah menghasilkan 3 (tiga) terbaik, sebagai berikut:
 - a. Transformasi Digital Kategori Unit Organisasi setara Eselon I
 1. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 3. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
 - b. Transformasi Digital Kategori Unit Kerja/Balai setara Eselon II
 1. Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 2. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 3. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
 - c. Transformasi Digital Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai setara Eselon III
 1. Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga;
 2. Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
3. Segala keputusan hasil penilaian oleh Tim Penilai adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Selanjutnya...

Selanjutnya dalam menunjang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, PUSDATIN Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Pengecekan Keaslian Dokumen

Komang Sri Hartini

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PU (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

No	Unit Organisasi	Nilai	Peringkat Terbaik
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	97.73	1
2	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	96.80	2
3	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	92.08	3
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.25	4
5	Direktorat Jenderal Bina Marga	88.63	5

Keterangan:

 : Terbaik 1 Penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unor setara Eselon I

Kategori Unit Kerja (Unker)/Balai setara Eselon II

No	Unit Organisasi	Nilai	Peringkat Terbaik
1	Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	98.33	1
2	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	97.00	2
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	95.95	3
4	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.92	4
5	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	93.83	5

Keterangan:

 : Terbaik 1 Penilaian Transformasi Digital Tahun 2025 Kategori Unker/Balai setara Eselon II





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Patimura Nomor 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681

Nomor : UM0202-Sj/1434 Jakarta, 31 Oktober 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

Yth. Bapak dan Ibu (mohon lihat daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala ANRI tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal sejak tanggal 30 April s.d. 3 Juli 2025 terhadap 63 (enam puluh tiga) Unit Kerja di tingkat Pusat, yang terdiri atas 9 (sembilan) Unit Sekretariat Organisasi selaku Unit Kearsipan dan 54 (lima puluh empat) Unit Kerja selaku Unit Pengolah.
2. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal meliputi Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan bidang kearsipan, Penggunaan/Layanan Arsip, Pengolahan Arsip Aktif dan Inaktif, Alih Media Arsip, Penyusutan Arsip, Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, dan Sarana Penunjang Kearsipan.
3. Instrumen pengawasan menggunakan formulir penilaian dari ANRI dan hasil pengawasan tersebut diverifikasi oleh ANRI. Hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dari ANRI (bobot 60%) dan nilai pengawasan kearsipan internal Kementerian PU (bobot 40%). Nilai pengawasan kearsipan, khususnya nilai sub aspek Alih Media Arsip menjadi salah satu indeks penilaian Reformasi Birokrasi kelompok RB General (Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip).
4. Secara umum, berdasarkan hasil verifikasi tim ANRI, pengelolaan kearsipan di Kementerian PU masuk dalam kategori "Baik". Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:
 - a. Pemberkasan arsip elektronik.
 - b. Peran Unit Kearsipan/Sekretariat Unor dalam pembinaan ke Unit Kerja.
 - c. Giat penyusutan arsip, khususnya dengan cara pemusnahan dan penyerahan sesuai proseddur.
 - d. Kompetensi dan pemberdayaan arsiparis, khususnya yang diangkat melalui jalur PPPK.
 - e. Penggunaan sarana kearsipan yang sesuai standar minimal.

5. Bersama...

-2-

5. Bersama ini kami sampaikan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 pada 63 Unit Kerja sebagaimana terlampir. Unit Kerja diharapkan dapat memperbaiki kekurangan pengelolaan kearsipan dan/atau melengkapi dengan lebih baik lagi.
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

 Sekretaris Jenderal,
Wida Nurfaida
NIP. 197410212005012008

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI AUDIT KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI
3.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	85,92	A - Memuaskan
4.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga	82,45	A - Memuaskan
5.	Direktorat Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga	81,98	A - Memuaskan
6.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	80,70	A - Memuaskan
7.	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	78,51	BB – Sangat Baik
8.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	77,76	BB – Sangat Baik
9.	Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya	77,70	BB – Sangat Baik
10.	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ditjen Bina Marga	77,33	BB – Sangat Baik
11.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga	77,23	BB – Sangat Baik
12.	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	76,93	BB – Sangat Baik
13.	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	76,43	BB – Sangat Baik
14.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	75,22	BB – Sangat Baik
15.	Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air	74,89	BB – Sangat Baik



Issue No.2, Date:09.12.2025



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM